

PERKEMBANGAN PARTAI KOMUNIS INDONESIA 1945 - 1955

SKRIPSI



Oleh :

DJAROT PRIJONO

NIM : 92214005

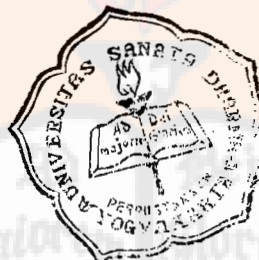
NIRM : 92005201060412004

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
1998**

**PERKEMBANGAN PARTAI KOMUNIS INDONESIA
1945 - 1955**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Di Universitas Sanata Dharma



OLEH :

DJAROT PRIJONO

NIM : 92214005

NIRM : 92005201060412004

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
1998**

**PERKEMBANGAN PARTAI KOMUNIS INDONESIA
1945 - 1955**

SKRIPSI

OLEH :

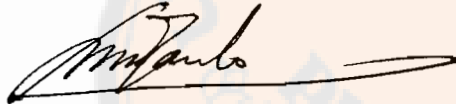
DJAROT PRIJONO

NIM : 92214005

NIRM : 92005201060412004

Telah disetujui oleh :

Pembimbing I



Drs. G. Moedjanto, M.A.

Tanggal 17 April 1998

Pembimbing II



Drs. A.K. Wiharyanto

Tanggal 19 April 1998

**PERKEMBANGAN PARTAI KOMUNIS INDONESIA
1945 - 1955**

SKRIPSI

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

DJAROT PRIJONO

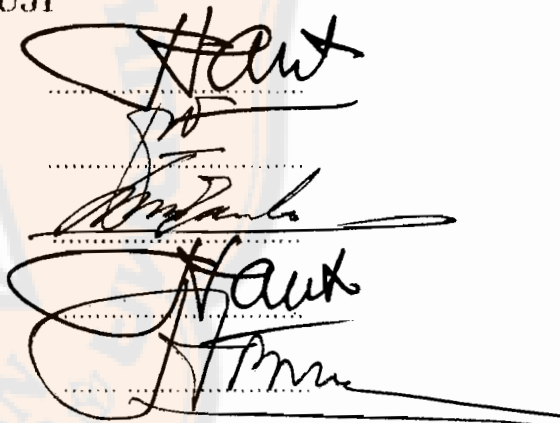
NIM : 92214005

NIRM : 92005201060412004

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji
pada tanggal 23 Mei 1998
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

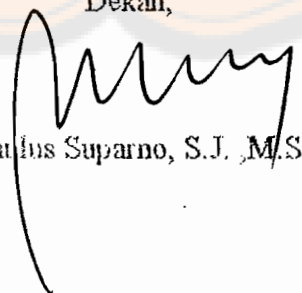
SUSUNAN PANITIA PENGUJI

Ketua : Drs. A.K. Wiharyanto
Sekretaris : Drs. B. Musidi, M.Pd.
Anggota : 1. Drs. G. Moedjanto, M.A.
2. Drs. A.K. Wiharyanto
3. Drs. J.B.M. Mudjihardjo



Yogyakarta, Juli 1998
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta

Dekan,



Dr. Paulus Suparno, S.J., M.S.T.

Motto : Ilalang berkembang di lahan otoriter
Bunga subur di taman Demokrasi

Persembahan

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Dunia ilmu pengetahuan.
2. Bagi yang memerlukan.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Adapun skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menempuh ujian sarjana pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Penulis mengakui bahwa penyusunan skripsi ini tidak mungkin selesai jika tanpa bantuan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial.
2. Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah.
3. Bapak Drs.G.Moedjanto, M.A., selaku pembimbing I Yang telah bersedia membimbing dan mengoreksi skripsi ini hingga selesai.
4. Bapak Drs. A.K.Wiharyanto, selaku pembimbing II yang telah banyak memberi semangat, dukungan , koreksi, dan masukan hingga selesainya skripsi ini.
5. Staf Perpustakaan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, yang telah banyak memberikan pelayanan peminjaman buku-buku yang diperlukan penulis bagi penyusunan skripsi ini.
6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan.

Disatu pihak penulis bertanggung jawab atas otentisitas skripsi ini, dan di lain pihak penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis dengan senang hati bersedia menerima sumbangan baik pemikiran, kritik, maupun saran yang membangun guna penyempurnaannya. Semoga skripsi ini berguna bagi siapa saja.

Yogyakarta, April 1998

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Permasalahan.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Landasan Teori.....	14
F. Metode Penelitian.....	25
BAB II. KEBERADAAN PKI DALAM KONSTELASI POLITIK INTERNASIONAL.....	28
A. Gambaran Umum Tentang Komunis.....	28
B. Hubungan PKI Dengan Dunia Internasi- onal.....	36
C. Keterkaitan PKI Dengan Uni Soviet...	44
BAB III. GERAKAN PENOLAKAN PKI TERHADAP PROKLAMA- SI KEMERDEKAAN INDONESIA SELAMA TAHUN 1945.....	50
A. Kondisi Gerakan Komunis di Indonesia Selama Tahun 1945.....	50
B. Arti Proklamasi 17 Agustus 1945 Bagi PKI.....	60

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

	C. Pergolakan Daerah Pada Awal Kemerde- kaan.....	63
BAB	IV. PERJUANGAN PKI SEJAK BERDIRINYA KEM - BALI SAMPAI PEMBERONTAKAN MADIUN.....	67
	A. Perjuangan PKI Secara Legal Parlemen- ter.....	67
	B. Aliansi PKI Dalam Front Demokrasi Rakyat.....	95
	C. Pemberontakan PKI di Madiun.....	111
BAB	V. PERKEMBANGAN PKI SETELAH PEMBERONTAKAN 1948 SAMPAI PEMILU 1955.....	121
	A. Pengaruh Agresi Belanda II Bagi PKI	124
	B. Razia "Agustus 1951".....	127
	C. Sikap PKI Terhadap Kekuatan Politik Lain.....	136
	D. PKI Berusaha Memenangkan Pemilu.....	145
BAB	VI. KESIMPULAN.....	150
	DAFTAR PUSTAKA.....	153
	LAMPIRAN	

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul **Strategi Partai Komunis Indonesia 1945-1955** ini disusun dengan metode penelitian kepustakaan serta dengan teknik diskriptik analitik.

Skripsi ini bertujuan untuk membahas empat permasalahan yaitu: pertama, Keberadaan PKI dalam Konstelasi politik Internasional antara tahun 1945-1947; Kedua, gerakan penolakan PKI terhadap proklamasi Kemerdekaan selama tahun 1945; Ketiga, Perkembangan PKI dari tahun 1946-1948; Keempat perkembangan PKI dari tahun 1949-1955.

Sel-sel bawah tanah PKI telah tumbuh sejak masa pendudukan Jepang, kemudian usaha konsolidasi dari sel-sel partai mulai dirintis sejak 7 Nopember 1945, dengan ditandai berdirinya PKI kembali dengan pimpinan M. Yusuf. PKI mengalami pertumbuhan pesat dalam periode 1946-1947. PKI berusaha merebut kekuasaan pada tahun 1948 di Madiun. Perkembangan selanjutnya, hampir merupakan pengulangan strategi di atas. Orang-orang komunis mulai membangun sel-sel komunis dalam satuan-satuan gerilya selama 1949-1950. Mereka mulai mengkonsolidasikan diri dalam bentuk partai komunis pada tanggal 10 Juni 1950. PKI berkembang secara parlementer sejak tahun 1951. PKI mampu menjadi partai terbesar keempat, setelah PNI, Masyumi, dan NU dalam pemilihan umum 1955. PKI mampu merebut 5.901.890 suara Dewan Perwakilan Rakyat dari 35.445.974 suara yang ada, sedangkan untuk Konstituante dapat merebut 6.138.535 suara dari 37.063.054 suara yang terkumpul.

ABSTRACT

Djarot Prijono : The Strategy of Indonesian Communism
Party 1945-1955

This thesis made use of a library research method applying to descriptive-analytical approach.

PKI (Indonesian Communist Party) experienced a rapid development during the 1945-1955's period. This party began its growth with the strategy of "Sell-system", keeping an consolidation in a kind of political party, and developed on the strategy of "double revolutionanre", namely, it developed parliamen tarily and non parliamentarily, and then finally held a coup de'etat by the orm power. The cells of PKI'S underground strategy already grew up since the colonialilsm of Japanese, and then the consolidative endeavors of the party's cells eventually were initiated and astablished since November 7, 1945, denoted by the reestablished of PKI and it was led by M. Yusuf.

PKI experienced the rapid growth during the period of 1945. 1947. PKI undertook to hold coup de'etat of political power in 1945 in Madiun. The further progress almost reuviewed the same strategy above. The communists began estabilishing the commnism in the groups of guerrilla, during 1949-1950. They strated to consolidate them selves according to their communism party of ways in June 10, 1950.

PKI developed parliamentarily since 1951 PKI was abl to be the fourth greatest party, after PNI (Indonesia National Party), Masyumi and NU in the general vote of 1955.

PKI succeeded in getting 5.901.890 of voters for Representatives Board (PR) of \$ 5.445.974 of voters, and for constituates. PKI was able to get 6.138.535 of voters of 37.063.654 of then collected voters.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sejarah perkembangan sistem kepartaian di Indonesia, keberadaan Partai Komunis Indonesia (PKI) merupakan salah satu topik yang tetap menarik sebagai bahan kajian sejarah sampai saat ini. Tidak saja para sejarawan dalam negeri, sejarawan luar negeri pun sangat antusias untuk mengkaji arti keberadaan PKI dan pengaruhnya terhadap kondisi politik yang melingkupinya. PKI memiliki daya tarik tersendiri, sehingga senantiasa menjadi bahan studi sejarah.

Keberadaan PKI dalam kehidupan politik di Indonesia menjadi sumber aspirasi yang tidak pernah kering bagi para peneliti. Bahkan karya-karya tulis mengenai PKI bermunculan dalam berbagai versi. Kenyataan itu menimbulkan adanya pandangan ambivalen yang tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi terjadi pula dalam opini publik dunia.¹ Pendapat tersebut diperkuat oleh Ketchum dan Brumberg, menurutnya masalah komunisme ini umumnya dipandang dari dua sisi, yaitu satu sisi, komunisme dianggap sebagai penyelamat manusia, gerakan yang tertib dan sumber perdamaian, tetapi disisi lain, komunisme

¹ Subhan Sd, **Langkah Merah Gerakan PKI 1950-1955** (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1996), hlm.3.

merupakan suatu kejahatan, kekuatan pemecah belah, dan merupakan sandiwara perdamaian.²

Pandangan ambivalen tersebut sebenarnya tak lepas dari pesona yang dimiliki PKI khususnya dan komunisme pada umumnya. Mengenai hal itu Brzezinski menulis :³

.... komunisme menarik bagi orang bodoh maupun bagi orang yang canggih. Ia memberikan kesadaran akan arah penjelasan yang memuaskan dan pembenaran moral. Ia membuat para penganutnya mempunyai rasa bahwa dirinya adil, benar, dan rasa percaya diri sekaligus. Tidak ada lagi hal yang merugikan. Ia mengaku sebagai filsafat dan sains sekaligus.⁴

Dalam kajian sejarah, kasus-kasus seperti di atas sangat mungkin terjadi mengingat fakta yang seratus prosen obyektif sangat sulit diperoleh. Subyektifitas seorang penulis dapat muncul dalam setiap fase penelitian.⁵

Munculnya ambivalensi mengenai keberadaan PKI dalam sistem kepartaian di Indonesia, mengindikasikan adanya pertentangan yang tajam antara PKI dengan kekuatan-kekuatan politik yang ada. Dari kasus tersebut tentulah

² Richard Ketchum and Abraham Brumberg, **What Is Communism ? A Picture Survey of World Communism** (Saduran H. Abddoerraoef) (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), hlm. 7-9.

³ Subhan Sd., loc. cit.

⁴ Zbigniew Brzezinski, **Kegagalan Besar, Munculnya dan Runtuhnya Komunisme dalam Abad Kedua Puluh** (terj.) (Bandung : Remaja Rosda Karya, 1990), hlm. 2.

⁵ Sartono Kartodirdjo, **Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah** (Jakarta : Gramedia, 1992), hlm. 88.

banyak hal yang layak untuk di cermati, tidak saja untuk kepentingan studi sejarah, namun juga untuk pemahaman yang lebih obyektiv terhadap PKI, yang sampai saat ini masih menjadi polemik.

Bangsa Indonesia secara bulat telah membubarkan dan menyatakan PKI sebagai partai terlarang di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pada tanggal 5 Juli 1966. Hal itu ditandai dengan keluarnya Surat Keputusan No. 1/3/1966, yang ditandatangani oleh Letnan Jendral Soeharto atas nama Presiden Republik Indonesia. keputusan tersebut masih diperkuat dengan Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966.⁶ Seiring dengan terjadinya gerakan dekomunisasi di Uni Soviet, juga di beberapa Negara Eropa Timur, diantaranya Hungaria, Bulgaria, Rumania, Cekoslovakia, dan Jerman Timur, beberapa rakyat Indonesia mulai mempertanyakan tentang masih perlu tidaknya dikembangkan sikap anti PKI dan kewaspadaan terhadap bahaya laten komunisme. Bagi mereka komunisme sudah ambruk dan sudah bangkrut, sehingga bukan lagi menjadi ancaman bagi bangsa dan negara. Sebagian yang lain tetap berpegang teguh bahwa PKI adalah bahaya laten yang harus senantiasa diwaspadai sampai kapanpun juga. Kembali merebaknya polemik tersebut menjadi alasan tersendiri dari penulisan karya ilmiah ini.

Pada dasarnya Bangsa Indonesia belum bisa dikatakan

⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia, **Gerakan September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia** (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1995), hlm. 153.

benar-benar terbebas dari ancaman komunisme. Meskipun Pemerintah Indonesia sendiri telah melarang dan menyatakan PKI sebagai bahaya laten yang harus selalu diwaspadai sejak tahun 1966, dan sebagian negara komunis di dunia sudah mengalami kehancuran. Komunis pada dasarnya hanya bisa dihancurkan dalam bentuknya sebagai partai. Komunis sebagai ideologi tidak akan pernah mati, setiap kali ada kesempatan akan bangkit dan berkembang kembali.

Kaum komunis selalu membangun partai dan ideologinya dalam setiap kesempatan yang ada tanpa kenal putus asa. Doktrin *Menang Kalah* telah menjadikan orang-orang komunis sangat militan, gigih, dan pantang menyerah. Andai kata partai meraih kemenangan, mereka tidak cepat menunjukkan kebanggaannya, namun pada saat itu tetap waspada. Mereka merasa mendapatkan tantangan untuk lebih berkembang demi cita-citanya menciptakan masyarakat komunis. Sebaliknya kalau mereka mengalami kekalahan, ditumpas dan dikejar-kejar oleh pemerintah yang sedang berkuasa, mereka justru semakin tercabuk dan tertantang untuk berusaha tegak kembali.⁷

Diantara partai berazaskan Marxis yang berkembang di Indonesia, seperti Partai Sosialis Indonesia, Partai Murba, Partai Buruh, dan Partai Persatuan Rakyat Marhaen

⁷ Goenawan Moehammad, **Rangkaian Peristiwa Pemberontakan Komunis di Indonesia** (Jakarta: LSIK, 1988), hlm. 35.

Indonesia.⁸ ternyata PKI memiliki sifat yang berbeda dengan partai lainnya. PKI cenderung mewujudkan cita-citanya dengan cara menghancurkan masyarakat lama melalui revolusi. Hal ini dikarenakan PKI memakai azas Marxis hasil penapsiran dari Lenin (Marxisme-Leninisme) yang lebih dikenal dengan Komunisme.⁹ Berbeda dengan partai-partai sosial demokrat, meskipun juga berazaskan Marxis, perjuangan mereka dalam rangka mewujudkan cita-citanya lebih bersifat evolusi, tanpa kekerasan, persuasi dan konstitusional parlementer.¹⁰

PKI sudah berdiri sejak Desember 1920 dan dinyatakan sebagai partai terlarang baru pada tanggal 5 Juli 1966. Bagi sebuah partai di Indonesia, kemampuan bertahan selama empat puluh enam tahun merupakan sebuah prestasi tersendiri. PKI telah ikut mewarnai bahkan mendominasi kehidupan politik nasional, dalam kurun waktu tersebut. Partai ini berulang kali jatuh, dan berulang kali pula bisa bangkit kembali. Kenyataan ini menunjukkan betapa solidnya PKI.

⁸ Kementrian Penerangan Republik Indonesia, **Kepartai-an di Indonesia** (Djakarta; DEPPEN RI, 1951), hlm. 279.

⁹ Pinardi, **Lihat Peristiwa Coup Berdarah PKI September 1984 di Madiun** (Djakarta: Inkopak Hazera, 1966), hlm. vii.

¹⁰ Sutarjo Adisusilo Jr, **Kapita Selekta Sejarah Eropa Abad XVIII-XIX; Revolusi, Nasionalisme, Demokrasi, Komunisme** (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 1994), hlm. 117.

Seringnya PKI melakukan pemberontakan dan aksi-aksi kekerasan lainnya, membuat partai ini senantiasa dianggap sebagai ancaman potensial bagi setiap pemegang kekuasaan yang sah di Indonesia. Terhitung sampai saat ini PKI telah melakukan, setidaknya dua kali gerakan politik yang dikenal sebagai suatu pemberontakan terhadap publik Indonesia. Pemberontakan pertama terjadi pada saat negara sedang menghadapi berbagai masalah dan kendala pasca proklamasi kemerdekaan RI. PKI di bawah pimpinan Muso melakukan gerakan yang dikenal dengan pemberontakan Madiun (Madiun Affair) tahun 1948. Kekuatan mereka dihancurkan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI), tokoh-tokohnya ditembak mati, dipenjara atau menghilang.¹¹ PKI mengulangi aksi serupa, pada tahun 1965. Pemberontakan 1965 atau lebih dikenal dengan gerakan tiga puluh september (G-30S/PKI), terjadi bukan hanya karena kelihaian dan kelicikan PKI, tapi juga dikarenakan impotensi partai-partai non komunis dan kelemahan masyarakat feodal pada saat itu telah memberikan kekuasaan mutlak kepada satu orang, yaitu Soekarno.¹²

Pemberontakan PKI yang senantiasa terulang, mengindikasikan dua kenyataan berikut: Pertama, kebijakan pemerintah terhadap PKI terkadang walau secara tidak

¹¹ Subhan Sd., *op. cit.*, hlm. 2-3.

¹² Panitia Kursus Kader Katulik, *Dari Madiun ke Lubang Buaya Dari Lubang Buaya ke... ?* (Jakarta : Sekretariat nasional K.M., 1967), hlm. 6.

langsung, telah memberi angin segar tersendiri bagi perkembangan PKI. Kedua menunjukkan bahwa PKI memiliki keunggulan-keunggulan untuk dapat tetap bertahan, bahkan berkembang kembali setelah dihancurkan.

Karya tulis ini hanya akan membahas tentang perkembangan PKI antara tahun 1945-1955. Pembatasan secara temporal sangat berperan dalam menentukan tingkat kedalaman suatu penulisan ilmiah. Pengambilan periode 1945-1955 sebagai obyek penelitian, bukanlah semata-mata hanya untuk membatasi obyek penelitian, tapi lebih dari itu ada landasan historisnya. Tahun 1945 diambil sebagai titik pangkal penelitian dalam karya tulis ini. Semenjak proklamasi 17 Agustus 1945, sebenarnya bangsa Indonesia telah memulai sebuah era baru dan dengan tatanan yang baru pula. Negara nasional yang terbentuk merupakan simbol kemerdekaan dalam menentukan eksistensi hidup serta masa depannya sendiri. Kemerdekaan telah menempatkan berbagai kekuatan politik pada masa Kolonial Belanda, untuk mengambil peranan dalam konstelasi politik nasional pasca proklamasi.¹³ Seperti halnya kekuatan politik lainnya, PKI mulai tahun 1945 (21 Oktober 1945) telah muncul dan berkiprah secara legal dalam sistem politik nasional, lahir pula suatu kebutuhan dan tuntutan tanggung jawab dari ilmu sejarah, untuk menghasilkan karya sejarah Indonesia sebagai sejarah nasional. Sebuah karya sejarah yang lebih

¹³ Sartono kartodirdjo., *op. cit.*, hlm. 7.

bersifat empiris, ilmiah, dan nasiosentris.¹⁴ Titik akhir yang diambil dalam penelitian ini adalah tahun 1955. Pada tahun tersebut PKI mendapat kemenangan politik secara legal melalui pemilihan umum 1955. Partai ini bisa keluar sebagai partai terbesar ke-4 setelah PNI, Masjumi dan NU.¹⁵

Sejarah perkembangan PKI dalam periode tersebut (1945-1955) senantiasa ditanggapi dengan sikap yang kontroversial oleh golongan lain. Sebagian orang memandang gerakan PKI saat itu memiliki arti tersendiri bagi bangsa dan negara. Sebagian yang lain menganggap PKI telah menjalankan praktek politik yang merugikan kepentingan bangsa dan negara. Lepas dari adanya polemik tersebut, yang jelas selama kurun waktu 1945-1955 telah banyak strategi yang dimainkan oleh PKI dalam rangka mewujudkan cita-citanya membentuk masyarakat komunis di Indonesia. Selama masa tersebut setiap pasang surut perkembangan PKI selalu berimbas terhadap kehidupan politik nasional.

Sebenarnya sikap kontroversial yang ada dapat di eliminir, sejauh kajian yang dilakukan terpusat dalam hal strategi yang digunakan PKI sepanjang perjalanan sejarahnya. Sejauh penelitian yang telah berkembang Sneeveliet adalah pembawa idiologi Marxis di Indonesia. Dia

¹⁴ Sartono Kartodirdjo., *op. cit.*, hlm. 7.

¹⁵ M. Rusli Karim, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia Sebuah Potret Pasang Surut* (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), hlm. 121.

bekas anggota Sociaal Democratische Arbeid Partij (SDAP) di Nederland. Sneevliet telah ikut andil dalam melahirkan generasi komunis di Indonesia. Perserikatan Komunis Hindia terbentuk pada 23 Mei 1920, dan sekaligus terdaftar sebagai anggota Komunis Internasional (Komintern). Baru pada sekitar Desember 1920, Perserikatan Hindia Belanda mengubah namanya menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI).¹⁶ PKI semakin giat melakukan konsolidasi sejak saat itu. PKI mengatur keanggotaan secara konsentris dan mengembangkannya dengan sistem sel. PKI juga melakukan kursus-kursus politik yang memberi uraian tentang Marxisme-Leninisme, dalam rangka meningkatkan pemahaman idiologi dari para anggotanya.¹⁷

PKI menjalankan strategi gerakan bawah tanah sampai tahun 1945, setelah mengalami kegagalan dalam perlawanannya terhadap Kolonialisme Belanda tahun 1926. Partai ini kembali muncul secara legal pada 21 Oktober 1945.¹⁸ Partai menjalankan strategi infiltrasi kedalam kekuatan politik lain selama kurun waktu 1945-1947, karena kondisi partai masih lemah dan terpecah belah. Amir Syarifudin merupakan salah satu tokoh yang telah berjasa dalam mengembangkan partai ini melalui strategi infiltrasi

¹⁶ G. Moedjanto, **Indonesia Abad Ke-20 I Dari Kebangkitan nasional Sampai Linggarjati** (Yogyakarta: Kanisius, 1988), hlm. 41-42.

¹⁷ Harry Poeze, **Tan Malaka Pergulatan Menuju Republik Indonesia** (Jakarta: Graffiti, 1988), hlm. 349.

¹⁸ Goenawan Moehammad., *op. cit.*, hlm 28.

dalam tubuh Partai Sosialis Indonesia.¹⁹ Partai ini lambat laun mulai menjadi kuat kembali seiring dengan kedatangan orang-orang PKI dari luar negeri. Muso mulai menjadi penentu arah perkembangan PKI sejak 1947-1948. Dia memimpin PKI dengan konsepnya yang dikenal dengan "Jalan Baru Bagi Republik Indonesia". Tokoh ini kemudian menggabungkan sejumlah kekuatan sayap kiri (Partai Buruh, Partai Sosialis, Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, Barisan Tani Indonesia dan Pemuda Sosialis Indonesia) dengan PKI.²⁰

Di masa-masa sulit ketika proses politik bermuara dalam kondisi krisis, PKI justru membuat jalannya sendiri. PKI-FDR mulai melakukan aksi-aksi yang bertujuan untuk mendiskreditkan pemerintah RI. Mereka melakukan pemogokan, penculikan, teror senjata dan pembunuhan di beberapa kota. Pemberontakan Madiun pada 19 September 1948 merupakan puncak dari segala kerusuhan sepanjang tahun 1947-1948.²¹

Kegagalan pemberontakan tahun 1948 tidak menyurutkan PKI untuk beraksi kembali. Masa sesudah tahun 1948 sebenarnya merupakan masa-masa sulit bagi PKI, partai dalam keadaan hancur, nasib para tokohnya tidak menentu, namun justru secara perlahan mereka bangkit kembali.

¹⁹ John D. Legge, **Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan: Peranan Kelompok Syahrir** (Jakarta: Graffiti, 1993), hlm. 197.

²⁰ Goenawan Moehammad, *loc. cit.*

²¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia., *op. cit.*, hlm 18.

Tokoh-tokoh PKI yang tidak ditembak mati banyak yang dihukum dan banyak pula yang bersembunyi antara tahun 1948-1950. Selama tahun 1950-1951, tokoh-tokoh yang bersembunyi, sesudah tidak divonis mati oleh pemerintah, pelan-pelan muncul kembali. PKI kembali bergerak di bawah tanah sepanjang tahun 1951-1952, jalan ini merupakan alternatif satu-satunya, setelah mereka melakukan pemogokan dan kerusuhan di tahun-tahun itu.²² Baru pada tahun 1952 partai ini bergerak secara legal, dan anehnya justru mendapat kemenangan politik pada pemilu 1955. Masa itu sebenarnya sangat singkat, tetapi PKI mampu memanfaatkannya dengan sangat baik. Perjuangan partai pada saat itu lebih mengarah pada perjuangan jalur parlementer. Kecurigaan kekuatan politik lain terhadap PKI berangsur-angsur hilang. Rakyat mulai tertarik untuk masuk menjadi anggota PKI, hingga akhirnya dalam pemilu 1955 PKI keluar sebagai empat besar partai politik di Indonesia. Dengan perolehan suara sebanyak 6.176.914 (16,4%) dan perolehan kursi sebanyak tiga puluh sembilan kursi di parlementer.²³ Seperti halnya PNI dan Nahdhatul Ulama (NU), PKI pun memperoleh suara terbesar dari Pulau Jawa yaitu sekitar 20,6%, terutama dari Propinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, PKI berhasil mendapatkan 27,4% suara dalam pemilihan

²² Subhan Sd., *op. cit.*, hlm. 4.

²³ Ulf Sundhaussen, *Politik Militer Indonesia 1945-1967 Menuju Dwi Fungsi ABRI* (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 163.

tingkat propinsi.²⁴

Gambaran perkembangan PKI dari 1920-1955 ditampilkan di sini, semata-mata hanya untuk menyatukan persepsi awal sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut. Penulisan mengenai perkembangan komunisme di Indonesia, bukanlah dimaksudkan untuk menyebarluaskan ajaran komunis. Hal ini perlu ditegaskan guna mencegah timbulnya salah pengertian. Komunisme jelas bertentangan dengan Pancasila, dan pernah menyebabkan timbulnya tragedi nasional pada tahun 1948 dan pada tahun 1965.²⁵ Penulisan ini semata-mata hanyalah sebuah kajian ilmiah, yang berusaha menyajikan fakta-fakta sejarah secara obyektif. Hal itu sesuai dengan Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966, yang kurang lebih berisi tentang:

"... Bahwa mempelajari paham komunisme atau Marxisme-Leninisme adalah dalam rangka mengamankan Pancasila dan secara ilmiah seperti pada universitas-universitas dapat dilakukan secara terpimpin."²⁶

B. Rumusan Permasalahan

Setelah ditentukan batasan-batasan, baik mengenai batasan ruang dan waktu, perlu adanya perumusan sejumlah

²⁴ Manai Sofyan, **Kehormatan Bagi yang Berhak** (Jakarta: Yayasan mencerdaskan kehidupan Bangsa, 1994), hl. 53

²⁵ Hardi, **Menarik Pelajaran dari Sejarah** (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1988), hlm. 134.

²⁶ Meriam Budiardjo, **Dasar-Dasar Ilmu Politik** (Jakarta: PT. Gramedia, 1993), hlm. 77.

permasalahan yang terintegrasi dan kronologis. Sehingga selain menjadi jelas maksudnya, juga terdapat kerangka pikir yang logis dan bulat. Beranjak dari materi pokok, yaitu perkembangan PKI antara tahun 1945-1955 maka ada sejumlah permasalahan yang relevan untuk menjadikan kajian lebih lanjut. Adapun permasalahan-permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah keberadaan PKI dalam konstelasi politik internasional antara tahun 1945-1947 ?
2. Bagaimanakah gerakan penolakan PKI terhadap Proklamasi Kemerdekaan Indonesia selama tahun 1945?
3. Bagaimanakah perkembangan PKI dari tahun 1946-1948?
4. Bagaimanakah perkembangan PKI dari tahun 1949-1955?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui lebih jauh tentang strategi Partai Komunis Indonesia antara tahun 1945-1955, dalam mewujudkan cita-citanya, yaitu merebut kekuasaan dan mendirikan negara sosialis komunis di Indonesia.

2. Tujuan Khusus

- a. Mendiskripsikan dan menganalisa keberadaan PKI dalam konstelasi politik internasional antara

tahun 1945-1947.

- b. Mendiskripsikan dan menganalisa gerakan penolakan PKI terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia selama tahun 1945.
- c. Mendiskripsikan dan menganalisa perkembangan PKI dari tahun 1946-1948.
- d. Mendiskripsikan dan menganalisa perkembangan PKI dari tahun 1949-1955.

D. Manfaat Penelitian

- 1. Bagi perkembangan penulisan sejarah Indonesia
Untuk memperkaya khasanah tulisan sejarah lokal di Indonesia.
- 2. Bagi Universitas Sanata Dharma
Untuk melaksanakan salah satu butir dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu penelitian.
- 3. Bagi dunia pendidikan
Untuk menambah pembendaharaan pengetahuan khususnya sejarah lokal di Indonesia.
- 4. Bagi peneliti
 - a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya penelitian sejarah lokal di Indonesia.
 - b. Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pendidikan Universitas Sanata Dharma.

E. Tinjauan Pustaka

Sebelum masuk pada pembahasan mengenai permasalahan tersebut diatas, maka penulis akan menguraikan beberapa

hal seputar judul dan istilah yang sering muncul. hal itu sengaja diuraikan sebagai landasan berpikir untuk memperjelas arti dari beberapa kata penting dalam tulisan ini. Dengan demikian diharapkan nantinya ada kesamaan persepsi mengenai konsep-konsep yang dikemukakan oleh penulis.

Judul skripsi ini adalah *Strategi Partai Komunis Indonesia 1945-1955*. Strategi berarti siasat, cara atau teknik untuk mencapai tujuan.²⁷ Sedangkan partai komunis adalah sebuah partai politik yang berideologikan komunisme. Setiap unit sejarah memiliki lingkup temporal dan spasial (ruang dan waktu).²⁸

Penulis mengajukan dimensi ruang Indonesia, sedangkan untuk dimensi waktunya penulis mengambil kurun waktu dari 1945-1955. Dalam kurun waktu tersebut nampak bahwa strategi yang dijalankan PKI mampu membentuk pola dasar perkembangan, nampak pula adanya pengulangan pola dasar tersebut.

Pola dasar yang senantiasa terulang inilah yang menjadi ciri khas dan identitas PKI. Mereka selalu bangkit dengan membentuk sel-sel partai. Orang-orang komunis membangun dirinya dari sebuah sel. Sel adalah elemen terkecil dari suatu organisasi komunis, ia hanya beranggotakan beberapa lusin saja. Bila sebuah sel terlampau besar

²⁷ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm.890.

²⁸ Sartono Kartodirdjo, *op.cit.*, hlm.2-3.

maka sel tersebut harus dipecah. Setiap sel dipimpin oleh seorang ketua dan seorang sekretaris. Orang-orang komunis dalam fase awal perkembangan sangat giat membangun sel, tetapi berusaha agar setiap sel jumlahnya tidak terlalu banyak. Mereka sadar bahwa solidaritas hanya akan bisa dibangun dengan kuat dalam suatu kelompok homogen yang kecil. Mereka mendirikan sel-sel di pabrik, toko, sekolah, desa dan komunitas kecil lainnya. Dalam sel-sel tersebut mereka akan menjalin suatu keakraban emosional, dan akan menyelenggarakan diskusi-diskusi terhadap masalah-masalah yang mereka hadapi. Akhirnya partai yang terbentuk nanti diharapkan mampu mengakomodasikan segala permasalahan mereka dalam program-program partai dan dalam aksi-aksi bersama.²⁹

Sel-sel tersebut, setelah berkembang menjadi banyak akan dikonsolidasikan ke dalam sebuah partai politik yang berideologi komunis, atau dikenal sebagai partai komunis. Mengenai format partai komunis terdapat perbedaan pendapat yang prinsipil antara Marx sendiri dengan Lenin. Dalam pemikiran Marx, partai komunis hendaknya besar dan mempunyai massa yang banyak dari kaum buruh, yang dipimpin oleh orang-orang komunis. Partai menurut Marx dikenal orang sebagai partai massa. Sementara menurut Lenin, partai komunis haruslah kecil, militan, terdiri dari

²⁹ Maurice Duverger, **Partai-Partai Politik Dan Kelompok-Kelompok Penekan Suatu Pengantar Komprehensif** (Jakarta: Bina Aksara, 1981), hlm.12.

"profesional revolutionaries" untuk memimpin kaum proletar. Partai kader seperti itulah menurut Lenin mampu mewujudkan suatu masyarakat komunis.³⁰ Dalam perkembangannya di beberapa negara kedua konsep tersebut digabung menjadi suatu bentuk partai campuran. Bentuk itu menciptakan stratafikasi dalam keanggotaan partai. Keanggotaan tersusun secara konsentris, anggota inti yang benar-benar sudah komunis menjadi kader pokoknya, lingkaran bagian luarnya lagi merupakan simpatisan dan lingkaran paling luar adalah massa rakyat (floating mass). Lingkaran terluar bukanlah anggota partai tapi keberadaan mereka sangat penting untuk mendukung aksi-aksi partai.³¹

Organ-organ partai disusun secara bertingkat, Komite Central (CC) di tingkat pusat, Komite daerah besar (CDB) ada di daerah tingkat I, Komite seksi (CS) di daerah tingkat II, Komite sub seksi (CSS) di daerah kecamatan, Komite resort (CR) di desa-desa.³² Partai inilah yang akan memperjuangkan hak-hak kaum buruh, karena menurut marx dan Lenin partai ini lebih sebagai suatu ekspresi kelas sosial dalam kehidupan politik suatu bangsa, maka penekanan lebih banyak diberikan pada dasar sosial yang menggaris bawahinya, bukan tentang ideologinya, bukan

³⁰ Delier Noer, **Pemikiran Politik di Negeri Barat** (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm.177-181.

³¹ G. Moedjanto, *op.cit.*, hlm.42.

³² CCPKI, **AD/ART (Konstitusi) Partai Komunis Indonesia** (Djakarta: P.I.R. Order, 1964), hlm.52.

tentang mesin penggerak organisasinya (struktur partai) juga bukan tentang pembuat keputusan atau *decision making* (strategi partai).³³

PKI berusaha keras untuk merebut kekuasaan, baik secara parlementer maupun non parlementer. Orang-orang komunis senantiasa beranggapan bahwa hanya merekalah yang paling kompeten membela rakyat, hanya merekalah yang mau menderita dengan rakyat, dan negara hanya akan makmur serta adil apabila partainya yang berkuasa. Kaum komunis menganggap negara sebagai alat untuk mencapai komunisme dalam arti bahwa segala alat kekuasaannya harus dikerahkan untuk mencapai tujuan itu.³⁴ Beberapa konsep yang perlu dipahami sebagai landasan berpikir sesuai dengan tema penulisan ini antara lain :

1. Partai Politik

- a. Suatu kelompok yang terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional guna melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.
- b. Merupakan kelompok anggota yang terorganisir secara rapi dan stabil yang dipersatukan dan dimotivasi oleh ideologi tertentu, yang berusaha mencari dan

³³ Maurice Duverger, *op.cit.*, hlm.3.

³⁴ Miriam Budihardjo, *op.cit.*, hlm.46.

mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melalui pemilihan umum, guna melaksanakan alternatif kebijakan umum yang mereka susun. Alternatif kebijakan umum yang mereka susun itu merupakan hasil perpaduan dari berbagai kepentingan yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan cara memberi dan mempertahankan kekuasaan guna melaksanakan kebijakan umum dapat melalui pemilihan umum dan cara-cara lain yang sah.³⁵

2. Partai Komunis Indonesia

Satu-satunya partai politik di Indonesia yang berazaskan marxisme-Leninisme (ajaran marxisme yang ditafsirkan oleh Lenin dan dikenal dengan Komunisme) dan bertujuan membentuk masyarakat sosialis di Indonesia. Sosialisme Indonesia adalah susunan masyarakat Indonesia dimana semua alat-alat produksi dimiliki dan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.³⁶

3. Komunisme

Dalam kaitannya dengan istilah Marxisme, dipahami tidak hanya sebagai sistem sosial, politik, dan ideologi saja, tetapi juga mencerminkan suatu gaya hidup yang

³⁵ Ibid., hlm. 50 Lihat juga Ramlan Surbakti, **Memahami Ilmu Politik** (Jakarta: Gramedia, 1992), hlm. 116.

³⁶ Kementrian Penerangan Republik Indonesia., **op.cit.**, hlm. 281.

berdasarkan pada nilai-nilai Marxisme yang ditafsirkan oleh Lenin.³⁷

4. Marxisme

a. Ajaran yang bersumber pada gagasan Karl marx (kadang kala tidak dapat dipisahkan dari Frederick Engels) khususnya yang tercakup dalam manifesto komunis dan kapitalis.³⁸

b. Ajaran-ajaran Karl Marx yang disistimatisir oleh pengikut-pengikutnya yang dalam pokok-pokoknya meliputi tiga bidang, yaitu:

- 1) Bidang pertama mengenai filsafat, yang dikenal sebagai *Wijsgeering materialisme* atas filosofi materialisme, yaitu suatu pandangan yang menomor satukan benda diatas jiwa.
- 2) Ajaran yang kedua mengenai Ilmu Sejarah, yang dikenal dengan *Historis materialisme*, yaitu suatu pandangan yang menganggap bahwa sejarah perkembangan masyarakat adalah sejarah perjuangan kelas sampai pada suatu saat kelas proletarlah yang akan merebut dan menguasai negara dan akhirnya mempercepat terbentuknya masyarakat tanpa kelas.³⁹

³⁷ Meriam Budiardjo., *op.cit.*, hlm.77.

³⁸ Sutardjo Adisusilo Jr, *loc.cit.*

³⁹ Goenawan Moehammad., *op.cit.*, hlm.3.

3) Dalam bidang ekonomi Marx menyatakan bahwa buruh juga merupakan komoditi biasa yang dapat diperjualbelikan diantara para pemilik modal. Bedanya komoditi buruh dapat menghasilkan sesuatu yang mempunyai harga lebih dari dirinya sendiri dan hal itu menjadi kepunyaan pemilik modal. Teori ini dikenal dengan *Labour Value Theory* (Teori Nilai Lebih).⁴⁰

5. Revolusioner

Suatu perubahan total dalam struktur sosial dan juga dalam struktur politik (hanya untuk melukiskan tujuan utama yang ingin mereka capai).⁴¹

6. Revisionis

Golongan yang pada umumnya menerima analisa Marx tetapi berpendapat bahwa tujuannya dapat dicapai tanpa revolusi.⁴²

7. Doktrin Zhdanov

Doktrin ini disebut pula dengan politik garis keras terhadap kubu kapitalis. Menurut doktrin ini dunia dipisah dalam dua kubu yang saling bertentangan, yaitu kubu komunisme dan kubu kapitalisme.⁴³

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 4.

⁴¹ Maurice Duverger, *op.cit.*, hlm. 65.

⁴² Meriam Budiardjo, *op.cit.*, hlm.83.

⁴³ Sekretariat Negara Republik Indonesia, *op.cit.*, hlm. 15.

8. Doktrin Dimitrov

Doktrin ini membenarkan adanya kerja sama kubu komunis dengan kubu kapitalis terutama dalam menghadapi musuh bersama yaitu kubu fasis. Doktrin ini berlaku sampai 1947.⁴⁴

9. Demokrasi Rakyat

Merupakan bentuk pemerintahan negara dalam masa transisi, menurut komunisme pemerintahan ini bertugas menjamin perkembangan negara ke arah sosialisme.⁴⁵

10. Jalan Baru Untuk Republik Indonesia

Merupakan konsepsi politik Muso, yang isinya berupa koreksi besar-besaran atas kesalahan dalam bidang organisasi, politik, strategi dan taktik yang selama ini telah dilakukan oleh PKI.⁴⁶

11. SOB (Staat van Oorlog en Beleg)

Undang-undang keadaan darurat perang milik pemerintah kolonial Belanda. Dalam undang-undang tersebut dikatakan dalam keadaan SOB, kekuasaan sepenuhnya berada ditangan militer. Di zaman Republik Indonesia untuk pertama kalinya SOB digunakan pada waktu kabinet Hatta tahun 1948, kemudian oleh kabinet Natsir pada

⁴⁴ Ibid., hlm.14.

⁴⁵ Meriam Budiardjo, *op.cit.*, hlm. 89.

⁴⁶ Panitia Kursus Kader katolik, *op.cit.*, hlm.14. lihat juga Jamal marsudi, **Jalan baru Untuk Republik Indonesia** (Jakarta: Yayasan Pembaharuan, 1951), hlm. 1-15.

1952.⁴⁷

12. Diktator Proletariat

Menurut Lenin merupakan bentuk pemerintahan yang berkuasa pada masa transisi, dari sebuah masyarakat kapitalis menuju terbentuknya masyarakat komunis. Diktator Proletariat memiliki tugas pokok, melakukan transformasi secara revolusioner dari masyarakat kapitalis menuju masyarakat komunis.⁴⁸

13. Front Persatuan Nasional

Persatuan organisasi-organisasi yang dibentuk oleh PKI, untuk melaksanakan strategi partai ini dalam usahanya memperluas anggota dan simpatisannya.⁴⁹

14. Front Demokrasi Rakyat (FDR)

Sebuah badan yang dibentuk oleh Amir Syarifuddin pada 26 Februari 1948 di Solo. FDR merupakan *jelmaan* dari fraksi sayap kiri yang terdiri dari : PKI, PSI, PBI, BTI, SOBSI dan PESINDO.⁵⁰

15. Pemuda Sosialis Indonesia (PESINDO)

Organisasi laskar yang berhaluan komunis, dan menjadi tulang punggung kekuatan pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. organisasi ini didirikan di Yogyakarta

⁴⁷ D.N. Aidit, **Pilihan Tulisan I.** (Republik Rakyat Tiongkok; CC PKI, 1959), hlm. 15.

⁴⁸ Miriam Budihardjo, **op.cit.**, hlm. 82. lihat juga V.I. Lenin, **op.cit.**, hlm 71.

⁴⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, **op.cit.**, hlm.66.

⁵⁰ G. Moedjanto, **op.cit.**, hlm.31.

pada bulan Nopember 1945 oleh sekelompok pemuda yang berhaluan komunis. Markas besarnya ada di Madiun sejak tahun 1946 sampai tahun 1948.⁵¹

16. Barisan Tani Indonesia (BTI)

Merupakan bentuk fusi dari RTI (Rukun Tani Indonesia), BTI sendiri, SAKTI (Sarekat Tani Indonesia).⁵²

17. Pendidikan Politik Tentara (PEPOLIT)

Satu badan dalam kementerian pertahanan yang dibentuk oleh Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin pada tahun 1946, direncanakan sebagai komisar politik untuk tentara. PEPOLIT dipimpin oleh Sukono Djojopratiknyo, yang oleh Amir Syarifuddin diberi pangkat meliter Jendral.⁵³

18. Biro Perjuangan

Satu badan pelaksana dalam kementerian pertahanan (1946), yang bertugas mengendalikan dan mengkoordinasikan laskar-laskar. Badan ini dipimpin oleh Djoko Sujono dan Ir. Sakirman dari laskar rakyat yang berhaluan komunis. Keduanya diberi pangkat militer Mayor Jenderal.⁵⁴

⁵¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, *op.cit.*, hlm. 73.

⁵² M.C. Ricklefs, **Sejarah Indonesia Modern** (terj) (Yogyakarta: GAMA Universitas Press, 1991), hlm. 324. lihat juga Hidley, **The Communist Party of Indonesia 1951-1963** (Barkley and Los Angeles: University of Clifornia Press, 1966), hlm. 160-180.

⁵³ Sekretariat Negara RI., *op.cit.*, hlm.72.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 64.



19. Komunis Internasional (KOMINTERN)

Disebut juga dengan Internasionale III, adalah suatu badan kolektif internasional dari partai-partai komunis di seluruh dunia, yang didirikan atas prakarsa Lenin dalam bulan Maret 1919.⁵⁵

20. Komite Informasi (KOMINFORM)

Pada bulan September 1943 Komintern dibubarkan, dan sebagai gantinya dibentuk COMINFORM (Comunis Information). Tepatnya pada tanggal 22 September 1947, di Warsawa, Polandia.⁵⁶

F. Metode Penelitian

Penulis menyadari, bahwa dalam rangka merekonstruksi sejarah perkembangan PKI antara tahun 1945-1955, sangat diperlukan adanya metode penelitian, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan cara studi pustaka. Penulis menggunakan metode itu karena data-data yang mendukung proses rekonstruksi sebagian besar dalam bentuk pernyataan, bukan dalam bentuk statistik. Studi pustaka semakin menjadi sebuah pilihan yang cukup rasional, mengingat batasan waktu yang diambil adalah antara tahun 1945-1955.⁵⁷

⁵⁵ D.N. Aidit, *op.cit.*, hlm. 97.

⁵⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia, *op.cit.*, hlm. 74.

⁵⁷ I Gusti Ngurah Agung, *Metode Penelitian Sosial: Pengertian dan Pemakaian Praktis* (Jakarta: PT Gramedia, 1992), hlm.9.

Melalui studi pustaka peneliti berusaha mencari data-data yang telah didokumentasikan secara tertulis, baik dalam bentuk buku-buku, majalah, surat kabar, ensiklopedia, maupun bentuk-bentuk publikasi lainnya. Dari sejumlah literatur tadi, penulis mengambil teori-teori, hukum, dalil, atau konsep-konsep para ahli yang terdapat dalam sejumlah literatur tersebut. Penulis secara aktif mengikuti perkembangan penelitian dalam bidang yang sedang diteliti, memanfaatkan data-data sekunder maupun primer dan menghindari duplikasi penelitian agar dapat menghasilkan sebuah karya ilmiah yang benar-benar obyektif.⁵⁸

Dalam penelitian ini penulis berusaha menampilkan sebanyak mungkin sumber primer, namun bila ada beberapa sumber primer yang sebenarnya penting tapi tidak dapat dijangkau dengan berbagai alasan, maka diusahakan sebuah subsistensi. Subsistensi tersebut diadakan dengan mengumpulkan dan membandingkan sejumlah data sekunder. Metode ini dikenal dengan metode komprehensif analisis komparatif historis.⁵⁹

Penulis selanjutnya melakukan verifikasi (kritik sumber) untuk memperoleh kabsahan, baik berupa kritik intern maupun kritik ekstern. Kritik intern dipakai untuk menguji kredibilitas data yang diperoleh. Sedangkan kritik ekstern digunakan untuk menguji otentisitas atau keaslian

⁵⁸ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (ed), **Metode Penelitian Survei** (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm. 45.

⁵⁹ Sutarjo Adisusilo Jr., *op.cit.*, hlm 119.

suatu sumber.⁶⁰ Secara umum dapat dikatakan bahwa tahap verifikasi bertujuan untuk membuang informasi yang tidak dapat dipertanggung jawabkan otentisitasnya serta kredibilitasnya.⁶¹

Setelah data-data hasil verifikasi tersusun secara kronologis, logis dan kausalis, kemudian secara beruntun akan dilakukan interpretasi data atau penafsiran, analisis, sintetis atau penyatuan data, dan yang terakhir adalah proses penulisan.⁶² Karya ilmiah yang dihasilkan dari proses tersebut, agar tidak terkesan naratif sedapat mungkin dianalisis dengan pendekatan berbagai bidang disiplin ilmu, seperti bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dll. Metode ini disebut juga dengan metode sejarah multi dimensional.⁶³

⁶⁰ Louis Gottschalk, **Mengerti Sejarah**(terj) (Jakarta: UI Press, 1975), hlm. 95.

⁶¹ Sumadi Suryabrata, **Metodologi Penelitian** (Jakarta: C V Rajawali,1989), hlm. 18.

⁶² Kuntowijoyo, **Pengantar Ilmu Sejarah** (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1995), hlm. 89. lihat juga Koetjaraningrat, **Metode-Metode Penelitian Masyarakat** (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 269.

⁶³ Sartono Kartodirdjo, *op.cit.*, hlm.4.

BAB II

KEBERADAAN PKI DALAM KONSTELASI POLITIK INTERNASIONAL

1945-1947

A. Gambaran Umum Tentang Komunisme

Komunisme, merupakan istilah yang tidak asing bagi bangsa Indonesia umumnya. Komunisme pernah menjadi ideologi dari sebuah partai besar yang bernama PKI. Partai ini telah ikut mewarnai sejarah perkembangan Bangsa Indonesia semenjak masa pergerakan melawan Belanda sampai pada tahun 1960-an. Komunisme, akhirnya dinyatakan sebagai bahaya laten dan terlarang keberadaannya di Indonesia, baik dalam bentuk partai maupun ideologi. Tindakan itu diambil karena dalam kiprahnya selama itu dirasa sangat merugikan bangsa dan negara Indonesia. Komunisme mengandung pengertian yang sangat luas, tidak sesempit apa yang kita pahami selama ini, yang hanya memahami komunisme semata-mata sebagai sesuatu yang terlarang.

Komunisme merupakan kumpulan ajaran Karl Marx yang telah disistimatisasi oleh Lenin. Usaha Lenin mensistimatisasi ajaran Marx secara tidak langsung telah membantu penyebaran dari ajaran tersebut, yang sebelumnya sangat susah dipahami. Karl Marx memang tidak memiliki kemampuan menulis secara sistimatis. Tulisan-tulisannya kadang kala mengandung banyak keraguan, kurang memenuhi persyaratan ilmiah modern, seperti ketepatan, konsepsi statistik, dan probabilitas dewasa ini, sehingga susah untuk dipahami.

Menurut Sidney Hook gaya penulisan Marx lebih mencerminkan keberadaan sebagai seorang aktivis revolusioner daripada seorang penulis profesional.¹

Ajaran-ajaran Marx sendiri tidaklah muncul demikian saja secara insidental. Marxisme sebagai suatu pencerminan atau refleksi dari kondisi sosial saat itu, serta bentuk kesadaran historis dari Marx. Tampilnya Karl Marx yang menghebohkan dunia filsafat abad ke-19 dan menghebohkan dunia politik pada abad ke-20, bermula pada awal abad ke-19 di Eropa Barat. Pada waktu itu kaum buruh hidup dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Kemajuan industri secara pesat telah menimbulkan keadaan sosial yang merugikan kaum buruh. Mereka mendapat upah yang begitu rendah, jam kerja yang panjang, tenaga kerja wanita dan anak-anak diperlakukan secara sewenang-wenang, tinggal di dalam rumah-rumah kumuh dan gelap, bekerja dalam pabrik-pabrik yang tidak terjamin keamanan dan keselamatannya.²

Dalam keadaan yang buruk tersebut berkembanglah konsep-konsep sosialisme dari sejumlah cendekiawan Eropa. Meskipun menurut Aidit sosialisme sudah berkembang sejak jaman Yunani kuno, dengan tokoh pemikirannya seperti Plato (427-347 SM). Seiring dengan semakin matangnya masyarakat kapitalis, yang membawa ketidakadilan terhadap kaum buruh,

¹ Sidney Hook, **Marx and The Marxists** (london-New York : van Nostrand Company inc), hlm. 11.

² D.N. Aidit, **Tentang Marxisme** (Djakarta: Akademi Ilmu Sosial Aliarcham, 1966), hlm. 100.

semakin berkembang pula adanya tuntutan suatu masyarakat adil makmur, tidak ada perbedaan miskin dan kaya, tidak ada penindasan dan tidak ada pula penghisapan manusia atas manusia. Ide-ide sosialis semacam itu mulai muncul kembali pada awal abad ke-16, dengan tokoh-tokohnya antara lain Sir Thomas More (1478-1535) dan seorang filsuf Italia yang bernama Tomoso Campanella (1568-1638).³

Sosialisme memang baru berkembang dengan pesat pada abad ke-19, tak kurang dari sejumlah cendekiawan seperti Robert Owen dari Inggris (1771-1858), Saint Simon (1760-1825), Fourier (1772-1837) keduanya dari Perancis. Mereka telah menjadi pendukung konsep sosialisme.⁴ Orang-orang ini terdorong oleh perasaan perikemaniausiaan, tetapi tanpa disertai tindakan-tindakan maupun konsepsi yang nyata mengenai tujuan dan strategi dari perbaikan itu, sehingga orang lain memandang teori mereka tidak lebih hanya sebagai angan-angan belaka. Karena itu mereka lalu disebut sebagai kaum *Sosialisme Utopia*⁵. Mereka mampu menggariskan perlunya suatu masyarakat yang lebih egaliter, dimana kekayaan dibagikan secara lebih merata dan adil, serta adanya pembatasan atas milik pribadi. Namun mereka mengalami kegagalan dalam mewujudkan ide-ide terse-

³ Ibid., hlm. 101-102.

⁴ F.Engels, **Perkembangan Sosialisme Dari Utopia Menjadi Ilmu** (Djakarta: Jajasan Pembaharuan, 1963), hlm. 41.

⁵ Miriam Budiardjo, **Dasar-Dasar Ilmu Politik** (Jakarta: PT Gramedia pustaka Utama, 1993), hlm. 78.

but pada tataran pragsis. Mereka tidak mempunyai strategi yang jelas untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Tokoh-tokoh tersebut hanya mampu menekankan perlunya ada kerja sama antara berbagai kelas sosial dengan mempertahankan akhlak yang tinggi.⁶

Marx merasa prihatin terhadap keadaan buruk kaum buruh dan merasa tidak puas terhadap kaum sosialis utopia, yang hanya bisa berteori dan bicara tanpa bertindak secara riil. Pada awal abad ke-19 Marx mulai mengembangkan konsepsi-konsepsi baru dan strategi baru yang lebih radikal, untuk merombak masyarakat liberal kapitalis yang dinilainya sakit. Konsepsi-konsepsi itu mulai dikenal orang dengan sosialisme ilmiah, yang nantinya akan lebih dikenal dengan Marxisme.⁷

Untuk memahami Marxisme serta partai-partai yang berideologi Marxisme, ada baiknya pula kalau kita menguasai falsafah yang melandasinya. Dasar filsafati dari Marxisme adalah filsafat materialisme. Demikian pula bila kita berusaha memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan PKI, tak bisa di lepaskan sama sekali dari pemahaman filsafat materialisme. Karena bagi orang-orang PKI sendiri penguasaan akan filsafat materialisme menjadi

⁶ Sutarjo Adisusilo JR., **Kapita Selekta Sejarah Eropa Abad XVIII-XIX (Revolusi, Nasionalisme, Demokrasi, Komunisme)** (Jogjakarta:Universitas Sanata Dharma, 1994), hlm.114.

⁷ K. Marx and F. Engels, **Manifesto Of The Communist Party** (Moscow: Foreign Language Publising House,---), hlm. 106-108.

sesuatu yang penting dalam rangka pemahaman idiologi partainya. Seperti ditegaskan sendiri oleh Aidit:

"Dengan memahami filsafat bagi mereka akan menjadi jelas filsafat itu adalah dasar teori dari pada segala taktik, garis pedoman, dan politik partai"⁸

Secara umum kita pahami bersama bahwa dengan filsafat seseorang tidak hanya tahu kebenaran, tetapi juga tahu sebab dari kebenaran tersebut. Di dunia ini banyak terdapat aliran filsafat, dan masalah hubungan antara pikiran manusia dengan eksistensi material adalah masalah terpokok dari semua aliran filsafat tersebut. Atas dasar konsepsi-konsepsi tersebut, aliran filsafat dapat dikelompokkan kedalam tiga aliran utama, yaitu: Idialisme, Materialisme dan Pragmatisme.⁹

Skripsi ini tentu hanya akan menguraikan mengenai aliran filsafat materialisme (realisme), dan sedikit tentang aliran idialisme, tentang pragmatisme tidak akan diuraikan di sini karena memang tidak banyak terkait dengan Marxisme. Meskipun Marx berguru pada Hegel, seorang filsuf idialis, namun teori-teori yang dihasilkan oleh Marx lebih berorientasi pada filsafat materialisme. Kalau dalam pandangan Hegel dan kaum idealis pada umumnya akal

⁸ D.N. Aidit, **Pengantar Filsafat Marxis** (Djakarta: DEPAGITROP CC PKI,---), hlm.1.

⁹ J. Sudarminto, SJ, **Filsafat Pendidikan** (Yogyakarta : Universitas Sanata Dharma, 1994), hlm.35.

budi adalah yang menentukan, sedangkan pengetahuan inderawi hanyalah bayangan atau tiruan dari ide-ide akal budi. Idealisme secara umum adalah aliran filsafat yang berpendapat bahwa yang sungguh rial itu bersifat rohani (ide atau gagasan-gagasan) yang ada dalam subyek. Benda-benda material menurut aliran ini tidak bisa ada dalam dirinya sendiri lepas dari subyek yang mengamatinya dan memikirkannya. Keberadaan dan arti benda-benda material tersebut tergantung dari subyek yang mengamatinya dan memahaminya dengan akal budi.¹⁰

Sebaliknya menurut Marx dan kaum materialisme pada umumnya, cenderung beranggapan bahwa dunia material merupakan dunia yang rial bukan sesuatu yang maya. Dunia material bukan hanya ada dalam pemikiran manusia, melainkan dalam dirinya sendiri sebagai fakta obyektif, semua itu lepas dari subyek yang mengamatinya. Panca indera dan akal budi manusia sepenuhnya ditentukan oleh benda atau obyek luar dan bukan sebaliknya. Bagi kaum materialisme gagasan dan pengetahuan seseorang itu benar kalau ada korespondensinya atau kesesuaiannya antara apa yang ada di dalam pikiran dan apa yang senyatanya ada di luar pikiran. Obyek pengetahuan sebagai realitas di luar subyek menjadi penentu terakhir apakah pengetahuan itu benar atau salah.¹¹

¹⁰ Ibid., hlm. 35-36.

¹¹ Ibid., hlm. 35.

Meskipun dalam bidang filsafat Marx menentang pendirian Hegel, namun Marx masih mau mengambil hukum *Dialektika* dari Hegel. Hukum tersebut kemudian diformulasikan dengan khasanah materialisme. Marx dan Engels memadukan materialisme dengan dialektika untuk membentuk satu kesatuan organik. Mereka berdua meluaskan materialisme pada kehidupan sosial. Dengan menggunakan hukum-hukum materialisme untuk menafsirkan masalah masalah sosial, mereka berharap bisa menemukan tenaga-tenaga penggerak materialis dalam hukum-hukum perkembangan sosial. Formula-si yang dikembangkan oleh Marx dan F. Engels belakangan dikenal orang dengan *Materialisme Dialektika Historis*.¹²

Karl Marx termasuk pemikir yang sangat produktif, banyak konsep-konsep sosial kemasyarakatan yang telah dihasilkannya. Ajaran-ajarannya mencakup konsep dialektik materialisme historis, konsep negara demokrasi, kerja dan keterasingan, masyarakat kelas dan pembagian kerja, negara dan perjuangan kelas, teori-teori tentang ekonomi dan ideologi. Meskipun demikian sampai akhir hayatnya Marx tidak pernah menguraikan secara detail, menyangkut bagaimana suatu masyarakat komunis yang dicita-citakannya bisa terwujud.

Lepas dari kenyataan tersebut, fakta menunjukkan bahwa ajaran-ajaran Marx dengan segala kelebihan dan kekurangannya tetap menarik banyak orang. Akibatnya muncul

¹² D.N. Aidit, *op. cit.*, hlm. 26.

banyak varian-varian Marxian, sesuai dengan cara penafsiran masing-masing terhadap Marxisme. Lenin merupakan salah seorang penafsir ajaran Marx, yang memiliki banyak pengikut. Bagi Lenin dan pengikutnya, idiologi Marxis merupakan pengetahuan, sehingga tidak bersifat dogmatis melainkan terus berkembang menuju kesempurnaan. Ajaran-ajaran Karl Marx yang tadinya ditujukan khususnya kepada masyarakat Eropa Barat abad ke-19, yang sudah maju industrialisasinya, oleh Lenin ditambah, diubah dan dilengkapi sesuai dengan kondisi objektif setempat, sehingga bisa diaplikasikan di dalam suatu negeri agraris seperti Rusia. Setelah keberhasilannya dalam mendirikan negara Uni Soviet, Lenin mengukuhkan diri sebagai penafsir ajaran Marx paling benar.¹³

Dari proses sejarah Rusia inilah lahir Marxisme-Leninisme. Marxisme-Leninisme inilah yang akhirnya menjadi idiologi pegangan dari partai-partai komunis di seluruh dunia, termasuk dalam hal ini PKI. Bahkan di dalam konstitusinya PKI menyatakan bahwa seluruh pekerjaan PKI didasarkan atas teori Marxisme-Leninisme.¹⁴

¹³ M.I.Sajuti, **Kesimpulan-Kesimpulan Riwayat Partai Komunis Rusia** (saduran) (Solo: Perpustakaan Rakyat, 1947), hlm. 10. Lihat juga Mirian Budiarjo, *op.cit.*, hlm. 83.

¹⁴ Central Komite Partai Komunis Indonesia, **AD-ART (konstitusi)PKI** (Jakarta :CC-PKI, 1964), hlm.5.

B. Hubungan PKI Dengan Dunia Internasional

PKI dan kebanyakan partai-partai komunis di dunia ini secara tidak langsung telah terstruktur secara sentralistik dengan Partai Komunis Uni Soviet (PKUS) di Moskow. Dalam hal ini PKUS berdiri sebagai atasan sedangkan partai-partai komunis dari negara lain dalam posisi sebagai partai bawahan. Bentuk hubungan semacam ini telah dilakukan oleh PKI, semenjak partai ini dikukuhkan secara resmi menjadi anggota Komunis Internasional (KOMINTERN) pada tahun 1920.¹⁵

Posisi PKI tersebut telah mempengaruhi pula pola hubungannya dengan dunia luar yang dilakukan selama itu. PKI menerapkan pola hubungan luar negeri yang berbeda-beda antara negara yang satu dan yang lainnya. Perbedaan itu didasarkan atas sistem yang berlaku dalam suatu negara. Hubungan vertikal yaitu dengan negara induknya, Uni Soviet, terjalin dengan erat dan terpelihara dengan baik pula. Kemudian hubungan secara horisontal berlangsung dengan lingkungan sekitarnya, dalam hal ini masih bisa dibedakan kedalam dua bentuk. Bentuk pertama adalah bentuk hubungan PKI dengan negara-negara sosialis selain Uni Soviet.¹⁶ Hubungan berlangsung dengan erat baik secara

¹⁵ G. Moedjanto, *Indonesia Abad Ke-20 I* (Yogyakarta : Kanisius, 1993), hlm. 42.

¹⁶ Istilah negara sosialis yang dimaksud di sini adalah negara yang berideologi komunis, bukan tipe negara sosialis moderat yang banyak berkembang di Eropa Barat. Penggunaan istilah negara sosialis terhadap negara-negara

bilateral maupun multilateral (dalam wadah Komintern). Bentuk kedua adalah bentuk hubungan dengan negara-negara yang berlainan sistim. PKI akan selalu mendukung hubungan kerja sama dengan negara-negara nasionalis yang baru merdeka, karena PKI memiliki semangat yang sama dengan negara-negara nasionalis tersebut, dalam hal menentang segala bentuk imperialisme kapitalisme. Sebaliknya PKI dengan keras akan menentang segala bentuk hubungan dengan negara-negara kapitalis. Hubungan hanya bisa dilakukan dalam tingkat partai, yaitu antara PKI dengan partai komunis di negara-negara kapitalis tersebut.

Secara prinsipil partai-partai komunis merupakan pendukung setia asas internasionalisme. Mereka meletakkan kepentingan nasionalnya di bawah kepentingan internasional kaum buruh. Internasionalisme komunis mampu menghasilkan semangat emosional yang tinggi, bahkan melebihi semangat emosional yang dihasilkan oleh nasionalisme.

Hal itu bertentangan dengan pendapat Lyman Tower Sargent:¹⁷

"Internasionalisme mirip dengan nasionalisme tetapi tidak menghasilkan semangat emosional yang sama,

...Continued...

yang berideologi komunis, semata-mata untuk menghindari adanya keracunan. Karena pada dasarnya menurut Mark tanpa komunis bukanlah negara tetapi suatu komunitas masyarakat tanpa penindasan serta tanpa penghisapan, yang berbentuk setelah hapusnya negara.

¹⁷ Lyman Tower Sargent, *Idiologi-Idiologi Politik Kontemporer* (terj) (Jakarta: Erlangga, 1987), hlm. 20-21.

dalam nasionalisme ada ikatan simbol seperti lagu kebangsaan, bahasa, bendera, yang mampu memberi ikatan lebih erat. Internasionalisme adalah masalah nalar."

Bahkan Karl Marx sendiri telah menegaskan bahwa kaum buruh tidak mengenal negara, tidak mengenal cinta tanah air, dan tidak mengenal nasional.¹⁸

Dalam terminologi komunis, internasionalisme lebih dikenal sebagai sebuah gerakan yang bernama internasionale. Internasionale merupakan suatu wadah dari sejumlah organisasi internasional dari partai-partai sosialis dan partai-partai komunis.¹⁹ Internasionale merupakan organisasi yang berpaham pada ajaran Marxis yang pada intinya adalah organisasi komunis. Organisasi tersebut bertujuan menghimpun gerakan radikal sosialis dan komunis seluruh dunia, menggerakkan revolusi melawan kapitalis (membentuk masyarakat tanpa kelas dan melenyapkan negara kebangsaan).

Internasionale I telah didirikan pada tahun 1864 di London, Inggris. Organisasi buruh internasional itu dipimpin oleh Karl Marx. Dalam anggaran dasarnya dicantumkan semboyan *Workers of All Countries Unite* yang sekaligus

¹⁸ Abdurachman Autorkhanov, *Communism nationalism and One's native land dalam Problem's of The Peoples of The USSR* (Munich: 98, 1965), hlm. 17.

¹⁹ *Ensiklopedia Indonesia Vol. III* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1982), hlm. 1465.

menjadi jiwa internasional mereka.²⁰ Internasionale I dibubarkan pada tahun 1876, karena adanya pertentangan kelas, dan desakan kaum pemilik modal di negara-negara Eropa.

Internasionale II didirikan di Paris pada 1889, dalam rangka menghimpun gerakan kaum buruh di seluruh Eropa, yang sedang dilanda industrialisasi. Organisasi ini akhirnya bubar juga dikarenakan adanya perpecahan sikap diantara anggotanya. Sebagian anggotanya tetap memperhatikan kepentingan nasionalnya, mereka dikenal sebagai kaum sosialis moderat. Sebagian yang lain menghendaki perjuangan buruh melampaui batas-batas negara kebangsaan, kelompok ini dikenal juga sebagai kelompok komunis. Bagi kaum komunis internasionalisme lebih penting dan seorang buruh tidak boleh memiliki tanah air.²¹

Selanjutnya Internasionale II pecah menjadi dua bentuk. Kaum komunis pada tahun 1919 membentuk wadah baru yang disebut *Komunis Internasional* (komintern) atau dikenal juga dengan internasionale III, di Moskow. Kejadian tersebut mendorong beberapa partai sosialis Eropa memisahkan diri dan membentuk wadah sendiri yang bernama *Sosialis Internasional*. Menurut Lenin tugas pokok komitern adalah menyebarkan faham komunis dan mengkoordinir gerakan

²⁰ Sutan Syahrir, **Sosialisme Indonesia Membangun, Kumpulan Tulisan** (Jakarta: LEPPENAS, 1982), hlm. 62.

²¹ Sutarjo Adisusilo JR, *loc.cit.*

kaum buruh revolusioner di seluruh dunia.²² Dalam wadah inilah terjalin hubungan dari berbagai macam kepentingan baik itu politik, ekonomi, budaya, maupun militer dari partai-partai komunis. Mengenai komintern Aidit berpendapat:

"Komintern atau disebut juga Internasionale III adalah badan kolektif internasional dari partai-partai komunis di seluruh dunia. Sebagai organisasi internasional Komintern mengeratkan hubungan dan kerja sama, serta memimpin gerakan proletariat di seluruh dunia, baik di negeri-negeri yang maju maupun di negeri-negeri jajahan yang terbelakang".²³

Komintern akhirnya dibubarkan pada bulan September 1947 dan diganti dengan wadah yang baru yang bernama *Communism Information* (Cominform). Bagi mereka yang menyetujui gagasan Karl Marx maka tugasnya begitu jelas, yaitu ikut berjuang dengan kaum buruh mempolitisir aktivitas mereka dan menunjukkan bahwa setiap perjuangan kelas adalah perjuangan politik dan ekonomi. Mereka diharapkan memperbesar kekuatan proletariat dalam suatu gerakan internasional.²⁴ Lenin, sebagai salah satu pengikut Marx yang telah berhasil mendirikan sebuah negara sosialis, berusaha

²² Sutarjo Adisusilo JR, *loc.cit.*

²³ D.N. Aidit, **Pilihan Tulisan I** (Republik Rakyat Tiongkok: Panitia Penerbitan Karya-Karya D.N Aidit, 1965), hlm. 97.

²⁴ Sutarjo Adisusilo JR., *op.cit.*, hlm.134.

memadukan konsep hubungan partai yang digariskan oleh Marx dengan kondisi obyektif yang ada di Rusia. Pengalaman revolusi Rusia 1917, mengajarkan pada Lenin tentang dasar-dasar hubungan dengan negara lain. Menurut Lenin negeri-negeri sosialis harus menjalankan politik koeksistensi secara damai terhadap negara-negara di sekitarnya yang berbeda sistem. Pemikiran itu didasari atas kesadaran bahwa revolusi proletariat tak mungkin sekaligus mencapai kemenangan dalam semua negara, seperti yang diramalkan Marx, revolusi hanya akan berhasil dalam satu negara atau beberapa negara dahulu, sedangkan yang lainnya akan tetap bersistem borjuis sampai beberapa waktu lamanya. Sehingga negara-negara sosialis akan tetap bertetangga dengan negara-negara kapitalis yang borjuis. Untuk tetap menjamin kelangsungan revolusi proletariat, negara-negara sosialis yang telah terbentuk harus menjalankan politik koeksistensi secara damai dengan negara-negara di sekitarnya yang berlainan sistem. Politik koeksistensi damai adalah suatu garis politik yang dijalankan oleh proletariat yang telah memegang kekuasaan, dalam rangka mengurus hubungan luar negerinya.

Koeksistensi damai sebenarnya merupakan tindakan kamuflatif dari negara-negara sosialis-komunis, disaat eksistensinya terancam. Politik ini dijalankan untuk menghindari peperangan secara langsung dengan pihak kapitalis di sekitarnya. Seperti ditegaskan Lenin:

"Negeri sosialis (Komunis) bertentangan sekali dengan imperialis-kapitalis. Imperialisme internasional... tak mungkin... hidup berdampingan dengan Republik Soviet, ditinjau baik dari kedudukan obyektifnya maupun dari kepentingan ekonomi kelas kapitalis yang terwujud di dalamnya. Jadi hidup berdampingan antara Republik Soviet dengan negeri-negeri imperialisme dalam jangka panjang adalah tak mungkin dibayangkan, yang satu atau yang lainnya mesti menang pada akhirnya".²⁵

Konfrontasi terhadap negara-negara kapitalis di sekitarnya akan dilakukan setiap saat, apabila kondisi obyektif memungkinkan. Kaum komunis senantiasa akan berlindung dalam koeksistensi damainya, selagi kondisi obyektif yang ada belum memungkinkan untuk menjalankan politik konfrontasi. Dalam posisi terjepit mereka senantiasa berteriak-teriak tentang solidaritas, perdamaian dan demokratisasi, bahkan sering kali mengklaim sebagai pahlawan perdamaian dan demokratisasi. Lenin sendiri sering melakukan hal serupa, seperti dinyatakannya sebagai berikut:

"Hanya kelas buruh saja apabila ia berhasil merebut kekuasaan dapat melaksanakan politik damai, bukan dalam kata-kata tetapi dalam perbuatan rial."²⁶

Pernyataan tersebut bertentangan sekali dengan perilaku

²⁵ Redaksi Renmin Ribao dan Hongqi, **Dua Matjam Politik Ko-Eksistensi Setjara Damai Jang Bertentangan Sama Sekali** (Peking: Pustaka Bahasa Asing, 1964), hlm 4-5.

²⁶ Ibid., hlm. 2-3.

politik Lenin terhadap lawan-lawannya selama ini, terhadap mereka hanya ada satu sikap yaitu, hancurkan!.²⁷

Pelaksanaan politik koeksistensi damai tetap tidak lepas dari landasan fundamental politik luar negeri Uni Soviet, yaitu internasionalisme proletar. Dalam hal ini Lenin Mengatakan:²⁸

"Tugas terbesar Soviet adalah membantu kaum buruh seluruh dunia dalam perjuangannya menggulingkan kapitalisme"

Pelaksanaan politik ini juga sangat terkait erat dengan sistem yang berlaku dalam suatu negara. Hubungan dengan sesama negara sosialis akan berlangsung dengan erat, atas dasar prinsip saling membantu, saling membela dan memperkokoh persatuan diantara negara-negara sosialis di dalam wadah komintern. Terhadap negara-negara yang baru merdeka dan yang masih dijajah kaum komunis sangat menaruh perhatian yang sangat besar. Kepentingan fundamental dari negara-negara tersebut hampir sama dengan negara-negara sosialis, yaitu menentang segala bentuk penindasan yang dilakukan oleh kaum imperialis kapitalis. Hubungan dalam tingkat partai (Komunis) merupakan bentuk hubungan yang memungkinkan dilakukan, dengan negara-negara kapitalis. Hubungan tingkat negara tidak terjalin dengan semestinya,

²⁷ Rene Fulop Miller, **Lenin dan Gandhi** (Djakarta: Balai Pustaka, 1951), hlm. 116.

²⁸ Redaksi Renmin Ribao dan Hongqi, **op.cit.**, hlm.7.

karena menurut Lenin hubungan semacam ini semata-mata hanya untuk mempertahankan perdamaian dan mencegah invasi dari negara-negara kapitalis tersebut. Negara-negara sosialis biasanya akan memanfaatkan situasi damai tersebut untuk secara rahasia membantu gerakan proletariat revolusioner yang ada di negara tersebut.²⁹

C. KETERKAITAN PKI DENGAN UNI SOVIET

Semenjak berdirinya Komintern pada Maret 1919, di Moskow, Uni Soviet mulai menjadi pusat orientasi dari partai-partai komunis yang ada di dunia ini. Sebagai lembaga kolektif internasional dari partai-partai komunis, Komintern mampu mengikat loyalitas sejumlah partai komunis pada garis kebijakan Partai Komunis Uni Soviet (PKUS). Sejak PKI menyatakan bergabung secara resmi ke dalam Komintern pada Desember 1920, maka partai itu pun mulai berjalan berdasarkan garis kebijakan PKUS. Karena pada saat itu PKI (masih bernama Perserikatan Komunis India) dengan suara bulat menerima 21 syarat yang diajukan oleh Komintern, yang isinya, antara lain, sebagai berikut:

- a. Pengakuan secara konsisten terhadap diktator proletariat dengan perjuangan untuk mengamankan dan mempertahankannya.
- b. Pemutusan kerjasama secara menyeluruh dengan kaum reformis dan centris serta menyingkirkan mereka dari

²⁹ Ibid., hlm. 8.

partai.

- c. Melaksanakan perjuangan dengan kombinasi legal dan ilegal.
- d. Bekerja secara sistematis di dalam negara, militer, organisasi buruh reformasi, dan parlemen borjuis.
- e. Setiap partai anggota komintern adalah partai komunis dan dibentuk atas prinsip sentralisme demokrasi.
- f. Semua keputusan dari Kongres Komintern akan mengikat terhadap semua partai yang berafiliasi dengan Komintern.
- g. Komintern juga terikat untuk mempertimbangkan adanya perbedaan kondisi dari setiap partai yang berbeda dari tempat bekerja dan berjuang dan secara umum resolusi yang diajukan mengenai suatu masalah hanya akan di terima apabila resolusi ini memungkinkan.³⁰

Setelah mengalami kegagalan dalam perlawanan 1926 melawan kapitalis Belanda, aktivitas PKI baru muncul kembali pada tahun 1935. Pada saat itu Muso, tokoh perlawanan 1926, membangun kembali PKI ilegal di Surabaya, berdasarkan Doktrin Dimitrov. ³¹Doktrin itu merupakan garis perjuangan Uni Soviet yang terbaru dalam menghadapi kubu kapitalis imperialis. Berdasarkan Doktrin Dimitrov,

³⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia, **Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia Latar Belakang Pemberontakan Partai Komunis Indonesia Latar Belakang, Aksi, dan Penumpasan** (Jakarta : PT. Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 11.

³¹ Arnold C.Brackman, **Indonesian Communism a History** (New York: Frederick A. Praeger inc., 1963), hlm.30.

kaum komunis harus bekerjasama dengan kaum liberal kapitalis dalam menghadapi ancaman fasisme. Penganut komunis di Indonesia, diantaranya Amir Syarifuddin, mulai menyesuaikan diri dengan doktrin tersebut. Setelah Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942, Amir Syarifuddin bekerjasama dengan Belanda dalam menghadapi Fasisme Jepang. Dia bersedia menerima bantuan sejumlah dana untuk melakukan gerakan intelegen bagi kepentingan Belanda, selama pendudukan Jepang.³² Meskipun Jepang telah dikalahkan oleh sekutu pada tahun 1945, kaum komunis masih tetap memegang teguh Doktrin Dimitrov. Mereka yakin bahwa setelah perang usai negara-negara Eropa Barat pasti akan mengalami keguncangan politik, ekonomi dan sosial, dan akhirnya akan jatuh dalam kekuasaan kaum komunis. Dan suatu Eropa Barat yang komunis, pasti akan mengharmoniskan, dan memerdekakan bangsa-bangsa jajahannya di Asia dan Afrika. Sehingga kaum komunis Indonesia lebih suka menempuh garis lunak, dengan berunding dan berkompromi dalam menghadapi Belanda setelah Kemerdekaan. Apalagi pada saat itu parlemen negeri Belanda sedang dikuasai oleh kaum kiri.

Perkembangan politik internasional yang terjadi dengan cepat, sama sekali di luar dugaan dan perhitungan kaum komunis. Amerika Serikat mulai membendung perkem-

³² B.R.O'G. Anderson, *The Pemuda Revolution Indonesian Politics 1945-1946* (Michigan: University Microfilm, 1967), hlm.36.

bangsan komunisme di Eropa dengan rencana Marshaalnya. Sehingga, jatuhnya Eropa ke dalam kekuasaan komunis, yang telah diramalkan sejak perang masih berlangsung, akhirnya hanya menjadi angan-angan belaka. Uni Soviet akhirnya merubah garis perjuangan Dimitrov ke dalam bentuk perjuangan garis keras, sesuai dengan *Doktrin Zhadanov* ³³ Doktrin Zhadanov diumumkan dalam pembentukan Communist Information (Comiform), di Warsawa pada September 1947. Doktrin itu menganjurkan pada seluruh partai komunis yang ada di dunia ini untuk mengobarkan peperangan lokal melawan blok kapitalis-imperialis terutama Amerika Serikat. Perang itu menurut ajaran Moskow harus dilakukan secara bersamaan oleh bangsa-bangsa yang sedang terjajah, karena hanya dengan cara demikian kemerdekaan dapat dicapai. Dengan berlindung kepada perang kemerdekaan, maka jalan untuk menyebarkan komunisme akan terbuka, sementara blok kapitalis-imperialis akan menjadi berantakan.³⁴ Pada dasarnya doktrin itu membagi dunia menjadi dua kubu yang saling bertentangan, yaitu antara blok komunis dibawah pimpinan Uni Soviet dan blok kapitalis di bawah pimpinan Amerika Serikat.

Konferensi pemuda komunis dari partai-partai komunis seluruh Asia diadakan di Calcuta, India pada tanggal 19-26

³³ Kursus Kader Katulik, *Dari Madiun Ke lubang Buaja Dari Lubang Buaja Ke...?* (Djakarta: Gunung Sahari, 1967), hlm.9.

³⁴ G.Moedjanto.*op.cit.*, hlm.33.

Februari 1948, dalam rangka membahas pelaksanaan doktrin Zhadanov di Asia. Indonesia diwakili oleh Fransisca Fangidai dan Soepeno. Konferensi itu menghasilkan pengukuhan dan strategi pelaksanaan Doktrin Zhadanov.³⁵ Uni Soviet mengirimkan Muso kembali ke Indonesia untuk melaksanakan doktrin baru tersebut. Sehingga PKI sejak saat itu mulai melaksanakan perjuangan garis keras sesuai tuntutan Moskow. Pihak komunis yang semula menganut paham diplomasi dalam menghadapi imperialisme-kapitalisme, kini berubah haluan, mereka mulai melakukan perjuangan bersenjata dan anti segala macam bentuk perundingan dengan blok kapitalis-imperialis. PKI menolak dengan keras adanya perundingan-perundingan dengan Belanda. Partai itu bahkan menentang pelaksanaan berbagai macam perundingan yang telah dihasilkan oleh anggota-anggotanya sendiri, misalnya perjanjian Renville yang dihasilkan sendiri oleh Amir Syarifudin. PKI seenaknya menentang dan menuntut pembatalan Renville, serta mengecam Hatta yang berusaha melaksanakan persetujuan itu, sebagai penjual bangsa dan negara kepada Belanda. PKI menuntut pula agar politik luar negeri Republik Indonesia yang anti imperialis itu, tegas-tegas memihak pada blok Uni Soviet yang anti imperialisme.³⁶

Demikianlah uraian bab II di atas, pada bab berikut-

³⁵ Ibid., hlm.34.

³⁶ Himawan Soetanto, **Perintah Presiden Soekarno, "Rebut Kembali Madiun"** (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm.110.

nya akan diuraikan mengenai gerakan komunis di Indonesia selama tahun 1945. Uraian tersebut akan dibagi dalam beberapa sub yaitu kondisi golongan komunis di tahun 1945, arti proklamasi bagi kaum komunis, dan PKI mulai berdiri secara legal dalam sistem politik nasional.



BAB III

GERAKAN PENOLAKAN PKI TERHADAP PROKLAMASI SELAMA TAHUN 1945



A. Kondisi Gerakan Komunis di Indonesia Selama Tahun 1945

Secara empiris sangat sukar melacak dan merekonstruksi keberadaan PKI pada tahun tersebut. Periode ini dapat dikatakan sebagai periode terakhir strategi perlawanan bawah tanah PKI terhadap Jepang dapat pula dikatakan sebagai masa transisi menuju perjuangan legal dalam sebuah pemerintahan nasional. PKI mengalami kemunduran drastis dalam tahun itu. Seiring dengan terpecah belahnya organisasi partai, aktivitas partai pun seakan tidak lagi menemukan lagi bentuknya yang kongkret. Bahkan menurut Herbert Feith dan Lance Castles, dalam masa itu PKI kehilangan fungsinya.¹

Semenjak doktrin Dimitrov menjadi garis perjuangan resmi kaum komunis di seluruh dunia dalam melawan fasisme, PKI dengan gigih melakukan perlawanan bawah tanah terhadap Jepang. Bahkan menurut B.R.O'G Anderson, di Indonesia pada saat itu tidak ada golongan yang pantas dikategorikan sebagai kekuatan perlawanan terhadap fasisme Jepang,

¹ Herbert Feit and Lance Castle (ed), **Indonesian Political Thingking 1945-1965** (Ithaca and London: Cornell University Press, 1970), hal. 245.

kecuali kelompok bawah tanah komunis.² Cara pandang Anderson ini mungkin mengacu pada model gerakan bawah tanah anti fasis, yang dilakukan oleh kelompok Marquis di Perancis, Partisan di Yugoslavia, maupun gerilyawan Cina Komunis di Malaya dan gerilyawan komunis di Filipina, kelompok-kelompok bersenjata tersebut melawan fasisme Jepang maupun Jerman, dengan mengkombinasikan strategi perang gerilya, sabotase dan propaganda anti fasis. Sebagian peneliti Barat, memang cenderung memandang rendah gerakan-gerakan anti fasis di Indonesia, selain golongan komunis. Mereka beranggapan bahwa kelompok-kelompok tersebut tidak lebih hanya sebagai kelompok diskusi, yang kegiatannya hanya membicarakan keadaan perang dan situasi dalam negeri saat itu. Bahkan kelompok-kelompok ini memiliki jumlah keanggotaan yang relatif kecil, keanggotaannya hanya melingkupi teman-teman dekat.³ Strategi yang digunakan PKI dalam menghadapi Jepang, memang identik dengan strategi perlawanan kelompok-kelompok perlawanan yang telah disebut di atas. Namun PKI lebih berhasil dalam propaganda anti fasisnya, daripada usaha-usaha sabotase dan perang gerilya. Cu Liep Goan,

² Anton E. Lucas, **Peristiwa Tiga Daerah Revolusi Dalam Revolusi** (Jakarta: Pustaka Utama Graffiti, 1989), hlm.86.

³ Aboe Bakar L, **Kilas Balik Revolusi: Kenangan, Pelaku dan Saksi** (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992), hlm. 74. lihat juga B.R.O'G.Anderson, **The Pemuda Revolution: Indonesian Politics 1945-1946** (Michigan: University Microfilms, 1967), hlm.47.

seorang anggota PKI bawah tanah dan juga ketua orang-orang Cina perantauan (Chung Hua Hui) memberikan kesaksian bahwa:⁴

"salah satu sasaran kegiatan gerakan bawah tanah adalah membangkitkan perasaan anti Jepang di kalangan penduduk Jawa, dengan kampanye bisikan. PKI memfitnah beberapa orang sebagai kambing hitam, untuk memancing Jepang bertindak keras terhadap orang-orang Jawa."

PKI menentang dengan keras segala tindakan kelompok pejuang dari golongan lain, yang sekiranya dapat mengakibatkan membaiknya kondisi perekonomian rakyat, atau bahkan membaiknya hubungan rakyat dengan pemerintah Jepang. Orang-orang komunis sangat berkepentingan menjaga ketidakadilan dan penindasan yang ada dalam masyarakat, sampai batas-batas tertentu. Dalam hal ini sampai akumulasi kebencian masyarakat terhadap Jepang berada diatas ambang toleransi. Kondisi obyektif inilah yang senantiasa dinantikan oleh PKI, untuk bisa memobilisasi rakyat dalam sebuah revolusi. Inti dari gerakan bawah tanah ini adalah kader-kader PKI illegal yang berdirinya dirintis oleh Muso pada tahun 1935 di Surabaya.⁵

Jepang bersikap keras terhadap PKI, secara berturut-turut Jepang melakukan razia terhadap eksistensi PKI. Hingga akhirnya setiap bentuk ketidaksetujuan terhadap

⁴ Anton E. Lucas, *op.cit.*, hlm. 115.

⁵ Arnold C. Brackman, *Indonesian Communism: A History* (New York: Frederick Preager, 1963), hlm. 27-32.

kebijakan Jepang akan dianggap komunis. Akibat adanya razia tersebut hampir sebagian besar basis gerakan bawah tanah di pulau Jawa hancur. Basis Keresidenan Pekalongan merupakan satu-satunya sel bawah tanah yang masih utuh. Kegiatan PKI bawah tanah di keresidenan tersebut, terpusat di daerah hutan Jati Sukowati di Pemalang Selatan. Dalam razia itu beberapa anggota PKI tertangkap, bahkan sejumlah pimpinannya telah dijatuhi hukuman mati.⁶

Represivitas Jepang terhadap PKI, selama tiga setengah tahun berkuasa di Indonesia, praktis melumpuhkan partai ini. Aktivitas partai sudah tidak nampak lagi semenjak akhir tahun 1944. Kader-kader PKI tak mampu berbuat banyak hingga akhir tahun 1945, dimana mereka mulai terlihat dalam aksi-aksi kerusuhan di beberapa daerah. Strategi bawah tanah yang ditempuh semenjak tahun 1935, telah mengakibatkan PKI tidak populer dalam masyarakat pada umumnya. Rakyat menjadi takut untuk bersinggungan dengan PKI, dan lebih suka bergabung dengan gerakan agama dan nasionalis. Kedua golongan terakhir pada saat itu mendapat dukungan dari rakyat, karena juga mulai memperjuangkan kemerdekaan Indonesia meskipun secara kooperatif.⁷ Kondisi ini berlangsung hingga akhir tahun 1945.

⁶ Anton E. Lucas, *op.cit.*, hlm. 78.

⁷ Sutomo, *Sesudah Madiun.....* (Jakarta____, 1964), hlm 8.

Soekarno-Hatta, atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada jam. 10.00, tanggal 17 Agustus 1945. Pembacaan teks proklamasi dilakukan di rumah Soekarno jalan Pegangsaan Timur 56.⁸ PKI memasuki alam kemerdekaan tersebut tanpa persiapan sama sekali. Ketika golongan politik lain sibuk mengkonsolidasikan diri dalam rangka ikut menentukan arah gerak negara republik Indonesia yang baru didirikan, PKI justru terperosok dalam perpecahan dan pertikaian antar fraksi dalam tubuh organisasinya sendiri. Masing-masing fraksi memiliki pandangan politik dan strategi yang saling bertentangan antara satu dengan lainnya.⁹ Beberapa fraksi dalam tubuh PKI itu sendiri antara lain:

a. Komunis van der Plas

Adalah golongan komunis yang mau bekerja sama dengan bekas gubernur Hindia Belanda Jawa Timur, van der Plas, dalam melawan Jepang. Amir Syarifudin, yang pada saat itu sebagai pemimpin Gerindo, menjadi pemimpin dari golongan komunis itu. Pemerintah Belanda memberikan dana sebesar F. 25.000 (\$ 10.000) untuk kelompok bawah tanah ini.¹⁰

⁸ G. Moedjanto, **Indonesia Abad Ke-20 Jilid 2** (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm.89.

⁹ Arnold C.Brackman, *op.cit.*, hlm.43.

¹⁰ Soebadio Sastrosatomo, **Perjuangan Revolusi** (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), hlm. 105. lihat juga Arnold C. Brackman, *op.cit.*, hlm.34. lihat juga B.R.O'G. Anderson, *op.cit.*, hlm.36.

b. Komunis Sibar (Sarekat Indonesia Baru)

Adalah organisasi anti fasis yang dibentuk oleh orang-orang PKI angkatan 1926, yang dibuang di Boven Digul. Organisasi ini dibentuk pada bulan Agustus 1944 di Melbourne, Australia. Selain orang-orang PKI organisasi ini juga beranggotakan orang-orang nasionalis radikal eks-Boven Digul, dan para pegawai Belanda.¹¹

c. PKI Widarta:

Adalah kelompok PKI ilegal yang dipimpin oleh Widarta. Kelompok ini pada dasarnya juga setuju bahwa perjuangan melawan fasis harus dilakukan bersama dengan Sekutu, dalam wadah front anti fasis. Tetapi kelompok itu menganggap bahwa wadah tersebut hanyalah bersifat sementara, selanjutnya front persatuan tersebut harus digunakan untuk melawan kolonialisme dan imperialisme lainnya setelah Jepang kalah.¹²

d. PKI Yusuf :

Adalah kelompok komunis yang bersifat nasional. Kelompok ini tidak pernah tergabung dalam wadah komunis internasional, sehingga tidak pernah ada ikatan sekalipun dalam bentuk program kerja dengan partai komunis lain. Kelompok ini dipimpin oleh Mr. M. Yusuf dan Mr. Suprpto, keduanya bukan anggota PKI ilegal yang

¹¹ Ibid., hlm. 133.

¹² Anton E. Lucas, *op.cit.*, hlm. 278.

didirikan pada tahun 1935.¹³

e. AKOMA (Angkatan Komunis Muda) :

Golongan ini muncul diawal kemerdekaan, dengan pemimpinnya Ibnu Parna, seorang pendiri Sarekat Marhaen Revolusioner (Samare) pada masa pendudukan Belanda. Akoma merupakan gerakan komunis yang lebih berorientasi pada nasionalisme, sehingga sangat bermusuhan dengan organisasi PKI ilegal.¹⁴

f. Komunis Abdulmadjid :

Kelompok komunis yang pernah tergabung dengan perhimpunan Indonesia di negeri Jepang. Mereka mempunyai hubungan yang erat dengan Partai Komunis Belanda (CPN), baik dalam bentuk ideologi maupun program politik. Mereka di bawa ke Indonesia oleh Belanda dengan harapan bisa melemahkan negara Republik Indonesia yang baru terbentuk. Mereka beranggapan Republik Indonesia adalah buatan Jepang. Kelompok ini mengharapkan adanya kesinambungan perjuangan ideologi bersama dalam hubungan egaliterian yang hangat dengan Belanda, seperti yang telah mereka lakukan di Negeri Belanda dalam menghadapi Nazi Jerman. Di bawah pimpinan Abdulmadjid Joyo Diningrat, kelompok ini akhirnya bergabung dalam partai sosialis, yang lebih mapan

¹³ Soebadio Sastrosatomo, *op.cit.*, hlm. 206.

¹⁴ Arief Priyadi, *Wawancara Dengan Sayuti Malik* (Jakarta: CSIS, 1977), hlm. 45.

keberadaannya.¹⁵

g. Komunis Sosialis :

Adalah golongan orang-orang komunis yang bernaung dalam Partai Rakyat Sosialis (Paras), yang didirikan 19 November 1945 di Yogyakarta. Ideologi partai ini tetap Marxisme-Leninisme, dengan orientasi pada negara Uni Soviet. Mereka memakai nama sosialis karena menurut penafsiran mereka tingkat perjuangan bangsa Indonesia masih dalam tingkat revolusi untuk menyusun masyarakat sosialis belum ke masyarakat komunis. Jadi tidak ada hubungan sama sekali dengan sistem sosialis demokrat di Eropa Barat. Mereka tetap beranggapan bahwa partai-partai sosialis demokrat yang banyak berkembang di Eropa Barat adalah reformis. Tokohnya antara lain Tan Ling Djie. Kelompok ini akhirnya melakukan fusi dengan Partai Sosialis (Parsi) pada tanggal 17 Desember 1945 menjadi Partai Sosialis.¹⁶

h. Komunis Tan Malaka :

Adalah kelompok komunis nasionalis yang paling besar. Dikenal sebagai kelompok Trotskys yang ada di Indonesia oleh PKI ilegal. Kelompok ini tidak berinduk pada komintern dan lebih berorientasi pada revolusi permanen di tingkat nasional. Kaum komunis ini menentang segala bentuk perundingan dengan Belanda,

¹⁵ Anton E. Lucas, *op.cit.*, hlm. 278.

¹⁶ Soebadio Sastrosatomo, *op.cit.*, hlm. 185.

perundingan hanya mungkin dilakukan atas dasar pengakuan kemerdekaan Indonesia secara penuh.

Disinyalir oleh beberapa ahli, masih ada beberapa golongan lagi, diantaranya kelompok Setiadjid dengan partai buruhnya, yang sering dianggap berkaitan erat dengan tokoh Semaun. Semaun sejak masih di Perhimpunan Indonesia sudah sangat tidak setuju berhubungan dalam bentuk apapun dengan CPN, dia khawatir kalau pimpinan gerakan buruh Indonesia jatuh ke partai komunis Belanda.¹⁷ Adanya kenyataan bahwa Setiadjid adalah salah satu dari sekian tokoh komunis yang keberadaannya di Indonesia, karena jasa CPN dan kurangnya data yang bisa menunjukkan arah orientasi politik dari kelompok ini, maka tidak dimasukkan dalam klasifikasi di atas. Perpecahan ini berlangsung terus hingga tahun 1948, dimana pada saat itu Muso berhasil menggabungkan semua golongan komunis tersebut ke dalam satu partai, yaitu PKI. Hanya partai-partai komunis nasionalis yang tak mau bergabung.

Perkembangan politik nasional di tingkat pusat berlangsung sangat cepat, setelah proklamasi kemerdekaan. Bahkan ada kesan pemerintah secara terburu-buru berusaha melengkapi diri dengan syarat-syarat yang diperlukan untuk berlangsungnya suatu pemerintah modern. PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) membentuk undang-undang

¹⁷ John Ingleson, *Road to Exile The Indonesian Nationalist Movement 1927-1934* (Singapore: Heinemann Educational Book, 1974), hlm. 17.

dasar, memilih Soekarno-Hatta sebagai presiden dan wakil presiden, pada tanggal 18 Agustus 1945. Kemudian pada tanggal 19 Agustus PPKI memutuskan pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 propinsi diseluruh bekas koloni Hindia-Belanda. Selanjutnya pada tanggal 22 Agustus PPPKI memutuskan pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang semula bertugas sebagai kepolisian saja. Kemudian menyusul dibentuknya kabinet pertama dengan 12 kementerian dan pelantikan Komite Nasional Indonesia (KNI) pada 29 Agustus 1945.¹⁸

Perkembangan tersebut praktis tidak bisa diikuti secara aktif oleh PKI, karena mereka disibukkan oleh pertikaian internal dan mereka juga tidak memiliki pemimpin yang berkaliber nasional. Amir Syarifudin merupakan tokoh satu-satunya pemimpin PKI, yang berkaliber nasional pada saat itu. Namun dia sampai saat itu masih mendekam di penjara Lowok Waru, Malang, Jawa Timur.¹⁹ Sehingga praktis dapat dikatakan bahwa PKI tidak terlibat sama sekali dalam proses konsolidasi pemerintah pusat, dan juga tidak dapat berpartisipasi dalam struktur pemerintahan yang sudah terbentuk.

¹⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia, **Risalah Sidang Badan Penyelenggara Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945** (Jakarta: Grafika Indonesia, 1995), hlm. 410-412.

¹⁹ Sekretarian Negara Republik Indonesia, **Gerakan September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia** (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 1955), hlm. 15-16.

B. Arti Proklamasi 17 Agustus 1945 Bagi PKI

Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan simbol kemenangan bangsa Indonesia, khususnya kemenangan golongan nasionalis dan golongan agama. Di lain pihak proklamasi tersebut juga menjadi bukti kekalahan golongan komunis dalam mewujudkan terbentuknya negara sosialis (komunis), setelah runtuhnya kekuasaan Jepang. PKI pada hakekatnya tidak pernah mengakui proklamasi 17 Agustus 1945 sebagai proklamasi kemerdekaan rakyat Indonesia, namun karena proklamasi tersebut didukung rakyat sepenuhnya, maka PKI tidak akan berani melakukan penolakan secara konfrontatif. PKI tidak akan sanggup melawan rakyat yang sedang diliputi antusiasme dan heroisme tersebut, mengingat kondisi PKI sendiri sangat lemah.

Berdasarkan ideologi komunis hanya PKI-lah yang berhak untuk mengantarkan bangsa Indonesia ke gerbang kemerdekaan. Aroganisme ini tertanam secara dogmatis dalam setiap kader PKI. Marx mengajarkan pada kaum buruh, bahwa hanya kaum buruh sendirilah yang bisa memperjuangkan nasib kaum buruh dari penghisapan kaum kapitalis-imperialis, dengan tanpa pamrih. Nasib kaum buruh tidak mungkin disandarkan pada golongan lain, apalagi pada kaum borjuis kapitalis.²⁰ Secara historis PKI mengklaim bahwa para pendahulunya adalah yang selama ini paling gigih berjuang

²⁰ Politbiro CC PKI, **Tegakkan PKI Yang Marxis-Leninis Untuk Memimpin Revolusi Demokrasi Rakyat Indonesia** (Republik Rakyat Cina: Delegasi CC PKI, 1971), hlm. 36-37.

melawan penjajahan Belanda dan Jepang. Sehingga menurut orang-orang PKI, tidak ada hak sama sekali bagi golongan idiologi lain untuk mengambil alih kekuasaan di Indonesia. Secara politik, PKI khususnya dan komunisme pada umumnya adalah pihak yang menang dalam perang dunia kedua, yang menurut mereka adalah perang antara idiologi fasis disatu-fihak melawan komunisme dan kapitalis di lain pihak. Maka sudah selayaknya kalau PKI menjadi pihak yang paling berhak atas Indonesia, demikianlah kurang lebih jalan pikiran orang-orang PKI.²¹

Proklamasi 17 Agustus 1945, atau dalam bahasa PKI disebut dengan istilah Revolusi Agustus 1945, bagi PKI tidak lebih hanya sebagai revolusi kelas borjuis. Tujuan dari revolusi tersebut tidak lain, hanya untuk mengadakan peralihan kekuasaan belaka, dengan tetap menjamin kepentingan kapitalisme. Berkembangnya kapitalisme merupakan bukti bahwa kemerdekaan yang ada hanyalah semu, karena penghisapan kaum modal terhadap kelas proletar tetap berlangsung.²² Adanya dukungan sebagian besar rakyat Indonesia terhadap proklamasi menurut PKI, tidak lebih sebagai efek real dari aksi manipulasi kelas borjuis nasional. Kelas proletar, tani, dan elemen-elemen patriotik lainnya mampu dimobilisasi di awal revolusi Agustus 1945, karena mereka terbutakan oleh semangat anti

²¹ Subadio Sastrosatomo, *op.cit.*, hlm. 44.

²² Politbiro CC PKI, *op.cit.*, hlm. 33.

imperialisme yang sengaja didengung-dengungkan oleh kelas borjuis nasional.

Bagi PKI revolusi Agustus harusnya menjadi landasan pelaksanaan revolusi sosial, hingga akhirnya terwujud sisoalisme dan komunisme di Indonesia. Revolusi Agustus 1945 harus diarahkan pada dua tujuan, tidak hanya mengusir imperialisme dari Indonesia, tetapi juga harus menghancurkan sisa-sisa feodalisme dan imperialisme tersebut sampai ke akar-akarnya, membebaskan kaum tani dari penindasan feodalis pribumi maupun asing.²³ Semua aparatur pemerintahan kolonial beserta elemen-elemen pendukungnya selama penjajahan berlangsung harus dihancurkan. Kemudian dibentuk negara yang sama sekali baru, dengan sebuah diktator proletariat yang bertugas menindas dengan kekuatan senjata setiap musuh politiknya. Dalam istilah golongan komunis negara dalam masa transisi seperti ini disebut *Negara Demokrasi Rakyat*.

Seperti ajaran Marx sendiri yang antara lain :

"Bahwa penghancuran mesin negara, yaitu kemiliteran dan birokrasi adalah syarat pendahuluan dari pada setiap revolusi rakyat yang sesungguhnya. Bersamaan dengan itu membuat alat kekuasaan yang sama sekali baru yang bertugas untuk menindas dengan kekerasan dan tidak kenal ampun terhadap perlawanan kelas penindas yang telah digulingkan."²⁴

Gambaran ideal PKI tentang sebuah revolusi ternyata tidak

²³ Ibid., hlm. 33.

²⁴ Ibid., hlm. 41.

dapat menemukan bentuknya, diawal kemerdekaan itu, dan akhirnya hanya bersifat utopis. PKI tidak mampu merumuskan idealisme revolusinya kedalam tataran praksis dengan strategi yang tepat. Mungkin hal ini lebih dikarenakan kondisi organisasi partai mereka yang sangat lemah, dan kondisi obyektif masyarakat Indonesia pada saat itu yang jauh dari analisis Marx untuk sebuah revolusi.

C. Pergolakan Daerah Pada Awal Kemerdekaan

Ketidakpuasan PKI akhirnya menemukan bentuknya pada akhir tahun 1945, yaitu pada saat terjadinya pergolakan disekeliling daerah di Indonesia. Perbedaan kepentingan dan orientasi politik yang untuk sesaat bisa diredam, akhirnya mencuat kembali kepermukaan. Pertentangan mulai mengarah pada bentuk-bentuk ketidakpuasan terhadap pemegang kekuasaan, ketika tokoh-tokoh politik sudah mulai memikirkan sistem politik yang cocok dan sesuai dengan keperluan-keperluan mendasar dari hajat hidup sebagian besar masyarakat. Perpecahan kian menguat takkala masing-masing golongan dengan orientasi ideologi berusaha mengambil alih kekuasaan, atau setidaknya tidaknya memaksakan sistem yang diyakininya untuk diterapkan secara nasional.

Perpecahan politik ditingkat nasional diikuti pula dengan pergolakan di daerah-daerah. Kalau dalam percaturan politik nasional di tingkat pusat PKI gagal untuk ikut serta secara aktif, maka ditingkat daerah PKI mampu berbuat banyak. Terutama dalam revolusi sosial yang terja-

di di kerisidenan Pekalongan, atau yang dikenal dengan revolusi tiga daerah (Kabupaten Brebes, Tegal, dan Pema-
lang), pada bulan Oktober sampai Desember 1945. Perlawanan politik yang terorganisir dan menonjol di tiga daerah dalam rangka membentuk pemerintahan baru, didominasi oleh kaum komunis. Munculnya kepemimpinan revolusioner komunis di tiga daerah itu berasal dari berbagai kelompok PKI ilegal yang sebelumnya telah berjuang melawan Jepang.²⁵

PKI ilegal bersama-sama dengan golongan agama, dan nasionalis radikal berhasil memobilisasi massa untuk mengadakan revolusi sosial. Tujuan dari revolusi sosial itu adalah menghapuskan tatanan lama, seperti misalnya kepala desa, pamong desa, camat, wedana, serta pemerin-
tahan kabupaten.²⁶ Situasi ini memungkinkan karena memang pemerintah pusat belum didukung oleh organisasi militer yang kuat, yang mampu menjamin pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat dan menjaga loyalitas daerah.²⁷

Revolusi sosial di Kerisidenan Pekalongan merupakan cermin kebencian rakyat terhadap penjajah dan bentuk ketidakpercayaan terhadap kemampuan pemerintah pusat. Orang-orang PKI menganggap kepemimpinan nasional bersifat feodal dan tidak lebih sebagai alat fasisme Jepang.

²⁵ Anton E. Lucas, *op.cit.*, hlm. 73.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 141.

²⁷ Audrey R. Kahin, *Regional Dynamics of The Indone-
sian Revolution* (Honolulu: University of Hawaii Press, 1985), hlm. 11.

Pemerintah pusat dianggap feodal karena masih memakai bekas pegawai Belanda sebagai tenaga administrasi, dan pemerintah juga masih mempergunakan sejumlah hukum Belanda. Pemerintah pusat dianggap sebagai alat fasisme Jepang karena dalam pemerintahan elit pusat banyak didominasi orang-orang yang dulu pernah bekerja pada pemerintahan Jepang. Lihat susunan kabinet RI yang pertama (lampiran 1) disitu tampak didominasi oleh orang-orang yang pernah bekerja dalam departemen-departemen pemerintahan Jepang di Indonesia.

Revolusi sosial ini akhirnya dihentikan oleh pemerintah pada Desember 1945, karena dirasa merugikan. Bagi para pemimpin pusat, kaum revolusioner di tiga daerah dianggap telah melampaui batas-batas revolusi nasional. Gerakan revolusi sosial yang mereka lakukan, berusaha menghancurkan struktur kekuasaan pribumi, dianggap membahayakan kelangsungan revolusi nasional, maka harus dibasmi.²⁸ Nampaknya ada perbedaan pemahaman tentang prinsip revolusi dari kedua belah pihak. Menurut pendapat elit nasional revolusi nasional yaitu perjuangan menentang kolonialisme Belanda, dan terlepas dari usaha-usaha penghancuran struktur kekuasaan pribumi (revolusi sosial). Sementara para pemimpin di daerah Karisidenan Pekalongan menganggap antara revolusi menentang kolonialisme dan revolusi sosial adalah satu kesatuan, yang tidak mungkin

²⁸ Ibid., hlm. 112.

dipisahkan. Struktur pribumi yang ada adalah bekas antek-antek penjajah yang telah ikut andil menyengsarakan rakyat.²⁹

Demikianlah uraian diatas, pada bab berikutnya akan diuraikan mengenai perkembangan PKI dari mulai berdirinya kembali pada 7 November 1945 sampai tahun 1948. Uraian tersebut akan dibagi dalam beberapa sub, yaitu: perjuangan PKI secara legal, Aliansi PKI dengan beberapa partai kiri dalam Front Demokrasi Rakyat dan Koreksi Moeso terhadap PKI.

²⁹ *Ibis.*, hlm. 104.

BAB IV

PERJUANGAN PKI

SEJAK BERDIRINYA KEMBALI SAMPAI PEMBERONTAKAN MADIUN

Periode ini ditandai oleh semakin menguatnya keberadaan Pemerintah Republik Indonesia. Rakyat mendukung sepenuhnya usaha-usaha Soekarno-Hatta dalam mengkonsolidasikan negara. Iklim demokrasi semakin tumbuh dengan baik ketika pada tanggal 3 Nopember 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat, yang berisi anjuran mendirikan partai politik, dalam rangka memperkuat perjuangan kemerdekaan (lampiran 2). Reaksi positif muncul dari masyarakat, dalam waktu relatif singkat partai-partai politik mulai bermunculan, di antaranya PKI.

A. Perjuangan PKI Secara Legal Parlementer

1. Dalam Bidang Politik

Setelah mengalami kegagalan dalam usaha perebutan kekuasaan di beberapa daerah, atau yang lebih dikenal dengan revolusi sosial, orang-orang komunis secara perseorangan menyusup ke dalam organisasi-organisasi non-komunis. Mereka masuk bukan untuk membantu melainkan untuk memanfaatkan organisasi tersebut bagi kepentingan golongan komunis. Mereka akan menyusun kekuatan baru dalam organisasi tersebut guna memukul lawan-lawan politiknya dan bahkan untuk merebut kekuasaan pada saat yang tepat

di kemudian hari. Lenin sendiri mengajarkan bahwa selama posisi kaum komunis masih lemah, mereka harus mencari kerja sama dengan golongan-golongan yang termasuk golongan kaum borjuis kecil, seperti kaum nasionalis, sosialis dan lain-lain.¹

Dalam kehidupan politik saat itu, PKI bersikap pasif dan belum muncul secara legal melalui kegiatan-kegiatan terbuka. Mereka hanya menampilkan individu-individu dalam segala bidang, dengan menyembunyikan identitasnya. Strategi bersembunyi dan tertutup itu tidak sepenuhnya disetujui oleh kader-kader komunis yang ada. Sebagian orang-orang komunis menentang sikap lunak tersebut. Pada tanggal 21 Oktober 1945 golongan itu menghidupkan kembali partai, dengan dipimpin oleh Mr. Moh. Yusup, tetapi secara resmi baru diperkenalkan secara terbuka pada 7 Nopember 1945. Golongan Yusuf tidak mempunyai hubungan dengan golongan komunis lainnya, baik dengan PKI angkatan 1926 maupun PKI angkatan 1935 (PKI ilegal pimpinan Moeso). PKI di bawah pimpinan Yusuf hanya memperoleh pengikut yang relatif kecil jumlahnya sampai Februari 1946.²

¹ Panitia Peringatan 75 Tahun Kasman, **Hidup Itu Berjuang, Kasman Singodimedjo 75 Tahun**, (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), hlm.500.

² G. Moedjanto, **Indonesia Abad ke-20 Jilid I : Dari Kebangkitan Nasional Sampai Linggarjati** (Yogyakarta: Kanisius, 1988), hlm.126.

Semenjak 14 Nopember 1945 kabinet presidensial di bawah Soekarno-Hatta digantikan oleh sebuah kabinet parlementer di bawah Perdana Menteri Sutan Syahrir. Sistim parlementer dipilih setelah sebelumnya, berhasil memenangkan proses pemungutan suara dengan sistim "Direktorium". Sistim direktorium diusulkan oleh Mr. Hindromartono, seorang sosialis komunis pengikut Amir Syarifudin. Direktorium adalah suatu bentuk pemerintahan di bawah direktur. Hendromartono mengusulkan suatu dewan direktur yang terdiri atas Mohammad Hatta dari golongan nasionalis, Wahid Hasyim dari golongan Islam, dan Samodro dari golongan komunis. Pemerintahan Direktorium ini, menurut Hendromartono, merupakan bentuk pemerintahan front nasional, yang mewakili berbagai golongan yang ada di Indonesia.³

Sebagian anggota kabinet Syahrir I terdiri dari tenaga-tenaga ahli, yang mayoritas bekas tenaga administrasi pemerintah Hindia Belanda sebelum pendudukan Jepang. Mereka bukan dari kalangan politisi, mungkin hanya Syahrir dan Amir Syarifudin saja yang berlatar belakang politisi, di mana keduanya berasal dari partai sosialis. Sebagai kabinet parlementer maka mereka tidak bertanggungjawab Presiden, tetapi bertanggungjawab

³ Soebadio Sastrosatomo, *Perjuangan Revolusi* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), hlm.96.

kepada KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat), yang telah diubah fungsinya menjadi Badan Legislatif sejak 16 Oktober 1945, berdasarkan Maklumat Pemerintah No. X (baca: eks) (lampiran 3). PKI sudah memiliki 35 wakil dalam Komite Nasional Indonesia Pusat pada tahun 1946. PKI beserta Partai Sosialis, Partai Buruh Indonesia dengan jumlah perwakilan yang sama masing-masing 35 wakil, menduduki peringkat keempat setelah golongan tidak berpartai yang memiliki 184 wakil, Masyumi dengan 60 wakil dan PNI dengan 45 wakil. PKI dalam hal ini dapat dikatakan memiliki kedudukan yang kuat dalam parlementer, apalagi bila ditambah dengan wakil-wakil dari Partai Sosialis dan Partai Buruh Indonesia yang berideologi komunis (lampiran 4).⁴

Program kabinet adalah menyempurnakan susunan pemerintah daerah berdasarkan kedaulatan rakyat, mencapai koordinasi seluruh kekuatan rakyat dalam usaha menegakkan negara Republik Indonesia, serta pembangunan masyarakat yang berdasarkan keadilan dan kemanusiaan, berusaha memperbaiki kemakmuran rakyat, dan berusaha mempercepat penyelesaian masalah pengedaran uang Republik Indonesia.⁵

⁴ Miriam Budiardjo, **Dasar-dasar Ilmu Politik** (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm.193

⁵ G. Moedjanto, *op.cit.*, hlm.147.

Pendukung utama dari kabinet Syahrir adalah Partai Sosialis dan Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia), di mana dalam kedua organisasi tersebut terdapat elemen komunis, yang dipimpin oleh Amir Syarifudin dan Tan Ling Djie. Meskipun mereka orang komunis namun mereka lebih suka bergerak dalam Partai Sosialis. Bagi Amir Syarifudin, dengan bekerja di dalam Partai Sosialis dan mendukung kabinet merupakan tindakan politik yang sangat rasional dan baik bagi perkembangan golongan komunis sendiri. Amir Syarifudin juga menganggap citra PKI sudah buruk dan teralienasi dari masyarakat semenjak pemberontakan tahun 1926, sehingga sudah tidak strategis lagi untuk berjuang di dalamnya. Sementara bagi Tan Ling Djie, Sekjen Partai Sosialis dan anggota terkemuka Polit-Biro PKI ilegal, menganggap Partai Sosialis adalah partai penampung. Partai penampung berfungsi menampung orang-orang yang sebenarnya pro-PKI, tetapi karena alasan tertentu tidak berani masuk PKI.⁶

Posisi golongan komunis dalam Partai Sosialis semakin kuat ketika sejumlah tokoh komunis yang baru datang dari negeri Belanda bergabung dengannya. Pada bulan Nopember 1945 sejumlah tokoh komunis dari Belanda di antaranya: Abdulmadjid, Rustam Effendi, Setiadjit, Muwaladi, Soeripno, Tamsil dan lain-lain.

⁶ D.N. Aidit, *Pilihan Tulisan I*, (Republik Rakyat Tiongkok : Jajasan Pembaharuan, 1965), hlm.251.

Pemerintah Belanda mengirim mereka kembali ke Indonesia dalam rangka membebaskan Indonesia dari Jepang, dan memperkuat pemerintahan Hindia Belanda. Mereka menemukan kenyataan bahwa Indonesia sudah merdeka dan didukung sepenuhnya oleh rakyat. Akhirnya pada tanggal 22 Nopember 1945, mereka menyampaikan sebuah memorandum kepada pemerintah Belanda dan menyatakan bahwa pengakuan Republik Indonesia oleh Belanda adalah satu-satunya pemecahan untuk mengatasi jalan buntu, sehingga dapat dicegah terjadinya pertumpahan darah. Kemudian mereka melepaskan diri dari Belanda dan sebagian bergabung dengan Partai Sosialis. Beberapa lagi masuk Pesindo dan PBI (Partai Buruh Indonesia). Mereka tidak mau memasuki Partai Komunis Indonesia, karena tidak suka terhadap Moh. Yusuf yang dinilai lebih bersifat nasionalis dari pada internasionalis.⁷

Keberadaan mereka dalam Partai Sosialis, tidak lebih sebagai infiltran, seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa keberadaannya dalam Partai Sosialis bukanlah untuk memperkuat Partai Sosialis. Mereka berusaha menyebarkan indologi komunis dalam Partai Sosialis. Bahkan mereka berusaha merebut kepemimpinan Partai Sosialis, kasus serupa pernah terjadi

⁷ B.R.O'G. Anderson, *The Pemuda Revolution Indonesia Politics 1845-1946* (Michigan : University Microfilms, 1967), hlm.541.

dalam tubuh SI (Sarekat Islam), pada tahun 1923.⁸ Posisi yang demikian itu, kalau menurut Mao Tje Tung, adalah "Duduk di Puncak Gunung Menonton Hari-mau Berkelahi", yaitu melihat perseteruan politik golongan Syahrir dengan golongan politik lain, sementara sambil mengamati situasi PKI berusaha mengambil keuntungan dari situasi-situasi tertentu.⁹

Adapula tokoh-tokoh komunis yang datang dari negeri Belanda yang masuk ke dalam PKI pimpinan Yusuf. Bahkan jumlah mereka yang memasuki PKI mungkin sebesar jumlah yang masuk ke dalam Partai Sosialis, Pesindo dan PBI. PKI pada mulanya mendukung pula kabinet Syahrir, namun ketika pada akhir Desember 1945 pemerintah Syahrir menindak dengan tegas, baik secara militer maupun politik, terhadap revolusi sosial di kerisidenan Pekalongan, PKI mulai beroposisi pada pemerintah. Tindakan itu diambil karena PKI Yusuf sebenarnya ikut bertanggung jawab dalam peristiwa revolusi sosial tersebut.¹⁰

Sewaktu kepemimpinan komunis belum terkonsolidasikan dengan baik, pada bulan Januari 1946 PKI di

⁸ G. Moedjanto, *op.cit.*, hlm.30. Lihat juga Bernhard Dahm, **History of Indonesia in Twentieth Century** (London, New York : Praeger Publisher, 1971), hlm.52.

⁹ Dewan Redaksi Renmin Ribao dan Honggi, **Pengalaman Sedjarah Perang Anti-Fasis** (Peking : Pustaka Bahasa Asing, 1964), hlm.21.

¹⁰ G. Moedjanto, *op.cit.*, hlm.126.

bawah kepemimpinan Yusuf melakukan pemberontakan. Mereka melakukan aksi provokasi, penculikan, pembantaian, dan pengerusakan sejumlah pos polisi di Cirebon. Pemberontakan bisa ditumpas dalam waktu singkat dan Yusuf ditahan. Tindakan Yusuf semakin menghancurkan reputasi PKI, kesalahan Yusuf ini tidak termaafkan oleh kaum komunis sampai tahun 1950-an.¹¹

Setelah mengalami kegagalan dalam pemberontakan di Cirebon, pada tanggal 27 Januari 1946 PKI bergabung dengan PP (Persatuan Perjuangan) yaitu suatu organisasi aliansi golongan oposisi yang dipimpin oleh Tan Malaka. Dalam Kongres PP yang pertama, 6 Januari 1946 di Purwokerto, mereka sepakat menolak segala bentuk perjuangan perundingan dengan Belanda yang dilakukan oleh kabinet. Orang-orang komunis yang tergabung dalam Partai Sosialis memandang PP tidak lebih sebagai aliansi kekuatan Trotskys yang beroposisi pada pemerintah. Mereka juga mengecam dengan keras tindakan PKI bergabung dengan PP, mereka menganggap PP adalah kumpulan kekuatan Trotskys. Bagi kaum sosialis komunis ini, orang komunis harus senantiasa menilai setiap kejadian dengan pisau analisis Marxis-Leninis, dan dengan memakai

¹¹ B.R.O'G. Anderson, *Loc.cit.*, Lihat juga Sudijono Djojoprajitno, **PKI-Sibar Contra Tan Malaka** (Jakarta: Jajasan Massa, 1962) hlm.21.



ukuran-ukuran garis perjuangan Kominisan, serta mendasarkan perjuangan pada dalil Dimitroff.

Tri tunggal Amir Syarifudin, Tan Ling Djie, dan Abdul Madjid, berusaha keras untuk dapat mengkondisikan PP dan kabinet Syahrir dalam suatu bentuk hubungan antara oposisi dan partai berkuasa, karena hanya dalam kondisi seperti itu mereka akan bisa menghancurkan PP dengan melalui tangan pemerintah yang berkuasa. Namun sebelum usaha mereka berhasil kabinet telah jatuh duluan. Pada 16 Februari 1946 PKI bersama-sama dengan Masyumi dan PNI mengeluarkan mosi tidak percaya terhadap kabinet. Ketiga partai menuntut bubarnya kabinet dan dibentuknya kabinet koalisi dari partai-partai politik yang ada. Akhirnya pada tanggal 23 Februari 1946 Syahrir mengembalikan mandat dan diterima oleh Presiden pada tanggal 28 Februari 1946.¹³

Perselisihan pemerintah dengan PP semakin menguat. Pemerintah menginginkan terbentuknya kabinet Koalisi yang lebih luas keanggotaannya, tetapi tetap harus meneruskan kebijakan perundingan kabinet Syahrir. Sebaliknya, PP bersikukuh menuntut diterimanya Program Minimum Sebagai program pemerintah dan menuntut posisi-posisi kunci dalam kabinet yang

¹² Bernhard Dahm, *op.cit.*, hlm.123. Lihat juga Soebadio Sastropatomo, *op.cit.*, hlm.212.

¹³ B.R.O'G. Anderson, *op.cit.*, hlm.431.

akan dibentuk. KNIP menawarkan jalan tengah dengan membentuk suatu komite 11 orang (dari pendukung Syahrir dan Tan Malaka) yang akan membantu formateur yang akan ditunjuk. Menurut Kahin, Soekarno pada mulanya menunjuk Tan Malaka sebagai formateur, namun karena gagal akhirnya Syahrir ditunjuk sebagai formateur. Hatta mengumumkan penunjukan kembali Syahrir sebagai formateur kabinet, serta 5 pasal program yang harus dijalankan kabinet dalam sidang KNIP tanggal 2 Maret 1946 (lampiran 5).¹⁴

Kabinet Syahrir II terbentuk pada 12 Maret 1946 dan berlangsung sampai bulan Juli 1946. Namun di dalam kabinet Koalisi ini pun PKI tetap tidak mendapatkan perwakilan di dalam kabinet. Meskipun di dalam kabinet terdapat dua orang komunis, yaitu Amir Syarifudin dan Tan Ling Djie, namun keduanya bukanlah wakil dari PKI. Keduanya duduk di dalam kabinet sebagai wakil dari Partai Sosialis. Secara umum susunan kabinet menunjukkan bahwa pemerintah Koalisi nasional belum seperti yang diharapkan. Partai Sosialis masih mendominasi kabinet, di samping itu banyak tokoh-tokoh non partai. Tenaga profesional banyak menduduki kabinet yang berjumlah 18 dari 27 menteri adalah tenaga profesional yang berpendidikan

¹⁴ G. McT. Kahin, **Nationalism and Revolution in Indonesia** (New York: Ithaca, 1970), hlm.52.

Barat.¹⁵

Pada masa kabinet Syahrir II, suasana politik Indonesia diwarnai dengan nuansa kebencian terhadap Belanda. Partai-partai yang tergabung dalam PP merupakan simbol kekuatan politik yang anti asing. Mereka rata-rata tidak mau menerima tawaran untuk duduk dalam kabinet, kecuali Masyumi. Mereka memilih berdiri sebagai oposisi. PP semakin kuat ketika militer di bawah Soedirman mulai mendukung gerakannya. Keberadaan PP sebagai oposisi semakin mengancam berlangsungnya proses perundingan dengan Belanda. Pemerintah pada mulanya tidak terlalu berbuat banyak dalam menghadapi oposisi PP, karena dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi parlementer, seperti Indonesia saat itu, keberadaan oposisi adalah sah. Mereka berfungsi sebagai alat kontrol terhadap pemerintah namun ketika oposisi sudah sangat mengancam perjuangan pemerintah, akhirnya melakukan penangkapan terhadap tokoh-tokoh PP pada bulan Maret 1946.¹⁶

Semakin kondusifnya iklim demokrasi di Indonesia, merupakan faktor pendukung tersendiri terhadap perkembangan PKI. Adanya jaminan kebebasan dalam mengekspresikan hak-hak politik dalam nuansa

¹⁵ G. Moedjanto, *op.cit.*, hlm.161.

¹⁶ *Ibid.*, hlm.163.

demokrasi parlementer pada saat itu, telah memicu kedatangan sejumlah tokoh komunis dari persembunyiannya di luar negeri. Pada bulan Februari 1946 telah datang tokoh komunis dari pelariannya di Australia, dia adalah Sarjono. Dalam bulan April 1946 Sarjono berhasil menjadi ketua PKI, menggantikan M. Yusuf. Kemudian menyusul kedatangan Alimin pada tanggal 12 Agustus 1946, setelah lama di pengasingannya di Cina dan Rusia.¹⁷ Meskipun secara resmi Sarjono adalah ketua partai, namun tugas sebagai ketua ternyata banyak dipegang oleh Alimin. Walaupun keduanya mempunyai prestise yang tinggi, tetapi sampai tahun 1948, partainya tidak pernah bisa menandingi pertumbuhan PNI dan Masyumi, bahkan tidak juga PS.

Kegagalan Sarjono dan Alimin dalam mengembangkan PKI secara luas dikarenakan terjadinya perpecahan di dalam golongan komunis sendiri. Baik kaum komunis pengikut Muso maupun kaum komunis yang dari negeri Belanda, sama-sama masih merasa enggan untuk bergabung di dalam PKI. Mereka tidak suka sikap Alimin dan Sarjono yang cenderung masih mau mentolerir perkembangan nasionalisme dalam PKI. Tokoh komunis dari negeri Belanda yang mau masuk PKI hanyalah Maruto Darusman. Golongan komunis pada saat

¹⁷ Arnold C. Brachman, *Indonesian Communism A History* (New York : Frederick A. Preager, 1963), hlm.55-56.

itu menyebar dalam empat wadah legal yaitu, PS, PKI, PBI, Pesindo serta beberapa wadah ilegal. Keberadaan mereka dalam berbagai wadah bukanlah pencerminan dari penerapan strategi *Double Revolutioner* yang diajarkan oleh Lenin, seperti anggapan kebanyakan orang selama ini. Strategi *Double Revolutioner* adalah suatu strategi perjuangan radikal bersenjata dan perjuangan diplomatik yang dilakukan secara variatif dan kondisional, kadang dilakukan serentak dan kadang dilakukan secara bergantian. Semua dalam rangka terwujudnya suatu masyarakat komunis, yaitu kemenangan dan kehancuran musuh. Kondisi kaum komunis pada saat itu lebih merupakan suatu bentuk perpecahan, akibat kegagalan dalam proses konsolidasi.¹⁸ Sikap orang-orang komunis yang masih memegang teguh doktrin Divitrov, dengan mendukung perjuangan diplomasi yang dilakukan oleh kabinet, membuat keberadaannya semakin tidak populer di mata rakyat Indonesia. Kondisi obyektif saat itu menunjukkan bahwa rakyat sangat anti penjajahan dan anti perundingan dengan Belanda. Tindakan kaum komunis mendukung tindakan perundingan dari kabinet, pada hari kemudian dianggap suatu tindakan yang keliru dalam menilai dan memanfaatkan kondisi obyektif yang ada pada saat itu. Kaum komunis terlalu terikat dan

¹⁸ Dewan Redaksi Renmin Ribao, *op.cit.*, hlm.13.

terkungkung oleh Doktrin Dimitrov.

Pada perkembangan selanjutnya, yakni pada masa kabinet Syahrir III, aktivitas kaum komunis baik yang berada dalam Partai Sosialis maupun dalam PKI sendiri, semakin menonjol. Kabinet Syahrir III berumur kurang lebih satu tahun, yaitu antara tanggal 3 Juli 1946 sampai 20 Juli 1947. Pemerintah pada saat itu sangat direpotkan oleh kegiatan oposisi dari PP, yang semakin keras menentang langkah-langkah diplomasi Syahrir dengan Belanda. Belanda sendiri merupakan ancaman potensial bagi bangsa Indonesia.

Pada tanggal 11-13 Januari 1947 PKI melakukan kongres nasional IV di Surakarta. Kongres ini dapat dikatakan sebagai bentuk konsolidasi pertama partai dalam atmosfir Republik Indonesia.¹⁹ Kongres ini menghasilkan sebuah anggaran dasar/anggaran rumah tangga, program partai dan susunan Polit Biro PKI, (lampiran 6).²⁰ Keberhasilan PKI dalam mengadakan konres IV menjadi pemicu tersendiri bagi kaum komunis yang tergabung dalam Partai Sosialis. Idiologi Marxis-Leninis semakin berkembang pesat di dalam Partai Sosialis. Kaum sosialis komunis di bawah

¹⁹ Subhan Sd., **Langkah Merah Gerakan PKI 1950-1955** (Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya, 1996), hlm.8.

²⁰ Kementerian Penerangan RI., **Kepartaian Indonesia** (Djakarta: Deppen RI, 1951), hlm.281.

kepemimpinan Amir Syarifudin dan Tan Ling Djie berusaha mendominasi kepemimpinan di dalam Partai Sosialis. Kekuatan kaum komunis di dalam Partai Sosialis mencakup pengikut Amir dari Pesindo Jawa Timur, pengikut Tan Ling Djie, dan sejumlah tokoh komunis yang baru datang di Negeri Belanda.

Ketika Amir Syarifudin semakin aktif menggalang kekuatan-kekuatan partai kiri ke dalam bentuk aliansi sayap kiri, Partai Sosialis akhirnya terpecah dalam dua kubu. Kubu pertama didominasi para tokoh yang condong pada kepemimpinan Amir Syarifudin. Tokoh-tokoh tersebut antara lain Hendromartono, Oey Gie Hwat, Sutrisno, Usman Sastroamidjojo, Tan Ling Djie, Sukandar, Djunaedi, Subianto Kusumo, A. Fatah, Abdul Madjid dan lain-lain. Sementara kutub yang lain condong pada kepemimpinan Sutan Syahrir, di antaranya Subadio Sastrosatomo, Djohan Syahrurah dan lain-lain.

Persetujuan Linggarjati yang diratifikasi oleh KNIP pada tanggal 25 Maret 1947, menimbulkan perasaan pro dan kontra bagi bangsa Indonesia. Berbagai partai politik, mulai dari pihak oposisi tetapi kemudian juga partai-partai pemerintah mulai menentang kebijaksanaan kabinet tersebut. Kubu Amir dalam Partai Sosialis ikut menentang, sehingga kabinet

jatuh pada tanggal 27 Juni 1947.²¹

Pada tanggal 3 Juli 1947 Amir Syarifudin berhasil membentuk pemerintahan baru. Kabinet Amir adalah kabinet Koalisi dari Partai Sosialis, PNI, PBI, Masyumi dan sejumlah partai kecil. Program kerja kabinet pada dasarnya masih meneruskan kebijaksanaan diplomasi dari kabinet sebelumnya. Hal itu sesuai dengan doktrin Dimitrov yang masih dianut kaum komunis sampai saat itu. Walaupun kabinet memberikan konsesi yang lebih besar dari pada yang telah diberikan oleh Syahrir kepada Belanda, perundingan tetap menemui jalan buntu. Belanda rupanya sudah bertekad untuk menyingkirkan Republik Indonesia. Pada tanggal 21 Juli Belanda melancarkan serangan terhadap Republik Indonesia, peristiwa ini dikenal dengan Agresi Militer Belanda I. Agresi ini diakhiri dengan persetujuan Renville pada tanggal 17 Januari 1948 (lampiran 7).²²

Setelah Amir Syarifudin menandatangani persetujuan itu pada tanggal 17 Januari 1948 terjadilah krisis kabinet. Masyumi dan PNI menarik menteri-menterinya dari kabinet kemudian menyatakan menolak persetujuan

²¹ G. Moedjanto, *op.cit.*, hlm.187.

²² G. McT. Kahin, *op.cit.*, hlm.216.

menuntut pembubaran kabinet.²³ Golongan lain yang menentang perjanjian ini adalah Gerakan Revolusi Rakyat (GRR), yang dipimpin oleh dr. Muwardi.

Sementara itu kekuatan sayap kiri yang terdiri dari PKI, PS, Pesindo, dan PBI, mengadakan demonstrasi secara besar-besaran mendukung kabinet Amir Syarifudin. Sekretariat pusat sayap kiri yang dimotori oleh D.N.Aidit segera menjawab penolakan partai-partai terhadap perjanjian Renville dan tuntutan pembubaran kabinet. Pada tanggal 22 Januari 1948 sayap kiri memberikan penjelasan yang ditandatangani oleh D.N.Aidit, Tan Ling Djie, Luat Siregar, Asmu dan Sudisman. Dalam pernyataan tersebut sayap kiri menganggap, tuntutan PNI tidak memiliki landasan politik, karena PNI ikut duduk dalam Kabinet Amir Syarifudin. Golongan sayap kiri bahkan menuduh PNI, sebagai organisasi rakyat yang tidak bertanggung jawab. Terhadap Masyumi pun pihak sayap kiri melancarkan kecaman sebagai organisasi rakyat yang tidak bertanggung jawab. Pihak sayap kiri bahkan dengan jelas menguraikan sikap Masyumi sejak pembentukan kabinet Koalisi yang diprakarsai oleh Amir Syarifudin, A.K. Gani, Setiadjit sampai penolakan partai tersebut terhadap hasil perjanjian Renville.

²³ Ulf Sundhaussen, **Politik Militer Indonesia 1945-1967 Menuju Dwi Fungsi ABRI** (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm.62.

Karena oposisi terhadap kabinet Amir semakin hari semakin besar, maka usaha golongan sayap kiri membe-
la kabinet gagal. Kabinet jatuh pada tanggal 23
Januari 1948. Pada saat itu pula berakhir perjuangan
parlementer yang pertama dari golongan komunis. Pada
masa selanjutnya pertentangan ideologi yang mengaki-
batkan perpecahan, senantiasa mewarnai kehidupan
politik nasional.²⁴

2. Dalam Bidang Militer

Keberadaan Amir Syarifudin sebagai menteri
pertahanan secara berturut-turut, semenjak dari
Kabinet Syahrir I, II, III dan pada Kabinet Amir
sendiri, telah memberi sumbangan yang tidak kecil
bagi perkembangan golongan sayap kiri pada umumnya
dan PKI khususnya. Kekalahan golongan komunis dalam
serentetan aksi anti pemerintah atau yang dikenal
dengan revolusi sosial pada akhir tahun 1945, telah
memberi pelajaran penting bagi golongan komunis akan
pentingnya penguasaan kekuatan bersenjata untuk
mewujudkan cita-citanya. Semasa berkuasa menteri
pertahanan Amir Syarifudin sangat berambisi untuk
menempatkan tentara reguler di bawah pengawasannya,
atau setidaknya mengimbangnya dengan laskar

²⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia, **Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia** (Jakarta : PT. Ghalia Indonesia, 1994), hlm.19.

rakyat yang kuat.²⁵

Sejak awal kemerdekaan hubungan sipil dan militer senantiasa terjalin dalam ketidakharmonisan. Berbagai persoalan yang muncul telah mengakibatkan semakin meruncingnya perselisihan. Pertikaian semakin melembaga ketika Kabinet Sosialis berkuasa di Indonesia. Perbedaan konsep ideal tentang tentara di antara kalangan elit sipil dan elit militer telah menimbulkan masalah yang berkepanjangan. Krisis kepercayaan mewarnai hubungan keduanya selama kurun waktu berkuasanya kabinet-kabinet sosialis.

Pada lanjutan rapat besar TKR (Tentara Keamanan Rakyat) dalam bulan Nopember 1945 di Yogyakarta, diusulkan agar segera dibentuk badan pendidikan tentara. Usul tersebut pada waktu itu dianggap masuk akal oleh karena itu disetujui. Untuk merealisasikannya, maka pada tanggal 24 Januari 1946 diputuskan untuk membentuk sebuah komisi yang bertugas menetapkan pola dasar tentang pendidikan tentara.²⁶ Selain itu dibentuk pula badan pendidikan, namun pola badan pendidikan ini disesuaikan dengan konsepsi Amir Syarifudin yang tertuang di dalam suatu pengumuman Departemen Keamanan Rakyat, tanggal 14 Nopember 1945. Pola

²⁵ Ulf Sundhaussen, *op.cit.*, hlm.43.

²⁶ Nugroho Notosusanto, *Pejuang dan Prajurit Konsepsi dan Implementasi Dwi Fungsi ABRI* (Jakarta: Sinar Harapan, 1984), hlm.44.

tersebut merupakan hasil interaksi antara Panglima Besar Jenderal Soedirman beserta stafnya pada satu pihak yang menginginkan mempertahankan otonomi angkatan perang, dengan Menteri Pertahanan Amir Syarifudin yang menganut prinsip supremasi sipil terhadap angkatan perang. Menurut konsepsi Amir, tentara harus mempunyai dasar keyakinan politik yang teguh sesuai dengan partai sipil yang berkuasa, seperti halnya tentara merah di Uni Soviet. Hal ini sesuai dengan prinsip pengendalian sipil subyektif menurut istilah Samuel P. Huntington.²⁷

Dalam bulan Februari 1946 badan itu kembali merumuskan sistem pendidikan bagi TRI berdasarkan hasil interaksi Soedirman dan Amir, di mana konsep Amir lebih bertujuan menempatkan tentara reguler di bawah pengaruhnya. Tujuan itu hendak dicapai melalui indoktrinasi politik. Landasan bagi kebijaksanaan-nya itu telah dia letakkan di dalam pidatonya pada tanggal 17 Nopember 1945. Dalam pidato itu Amir menuduh KNIL (Koninlijke Nederlands Indische Leger) dan PETA (Pembela Tanah Air) sebagai tentara tanpa keyakinan politik, dan anggota-anggotanya hanya serdadu bayaran saja.

²⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia, *op.cit.*, hlm.18.

Sebaliknya, para pemuda yang masuk angkatan bersenjata sesudah proklamasi kemerdekaan adalah orang-orang yang berjiwa patriot sejati. Tentara yang berideologi diharapkan bisa mengetahui dengan pasti kewajiban-kewajiban dan hak-haknya di zaman revolusi ini. Kampanye tersebut tidak lain adalah sebuah usaha dari Amir Syarifudin untuk mengikat loyalitas mereka.²⁸

Pada tanggal 19 Februari 1946, Amir Syarifudin mengumumkan bahwa sebuah staf pendidikan telah dibentuk di dalam lingkungan kementeriannya. Tugasnya adalah untuk meletakkan garis-garis pedoman bagi pendidikan politik tentara. Dalam pengumuman tersebut Amir mengatakan:

"Pendidikan itu materinya tidak akan berupa pandangan-pandangan politik dari suatu partai politik atau pendapat suatu golongan tertentu, melainkan ideologi yang sudah tercakup dalam UUD. Garis-garis besar ideologi ini akan ditetapkan oleh sebuah komisi untuk menjamin, bahwa seluruh materi yang diberikan kepada angkatan bersenjata akan mempunyai landasan ideologis yang terdapat dalam UUD.... di antara para pendidikannya akan terdapat juga

²⁸ B.R.O'G. Anderson, *op.cit.*, hlm.362.

ahli-ahli mengenai agama Islam, sehingga segala propaganda bagi tentara di dalam staf pendidikan akan dapat diselaraskan dengan ajaran agama".²⁹

Staf pendidikan dikepalai oleh Soekono Djojopratiknjo, anggota Partai Sosialis. Anggota lain terdiri dari dua orang sosialis, tiga politisi Islam dari Masyumi dan seorang militer bernama dr. Moestopo. Kecuali Moestopo tidak seorangpun dari mereka berpendidikan militer. Walaupun demikian, orang-orang tersebut mendapat pangkat militer. Soekono Djojopratiknjo mendapat pangkat Letnan Jenderal, setingkat dengan Oerip Soemohardjo sebagai kepala staf di markas besar tentara. Anggota lainnya mendapat pangkat mayor jenderal, setaraf dengan panglima divisi.

Setelah diadakan reorganisasi, badan pendidikan yang semula berada dalam lingkungan markas besar tentara dipindahkan ke kementerian pertahanan. Pada tanggal 30 Mei 1946 nama badan itu diubah menjadi staf Pendidikan Politik Tentara (Pepolit). Staf Pepolit membawahi Korps Pepolit yang terdiri dari 55 opsir politik yang pada mulanya semua diambil dari Pesindo. Sehingga partai-partai politik memprotes

²⁹ Ibid., hlm.375.

pengangkatan yang sepihak itu.³⁰ Mereka disebar ke seluruh Indonesia kepada tiap divisi diperbantukan lima orang. Kedudukan mereka dalam divisi bebas dari campur tangan Markas Besar Tentara.

Keputusan rapat besar TKR mengenai pendidikan tentara yang semula dianggap masuk akal itu, sejak menjadi Pepolit menimbulkan banyak persoalan, karena menyimpang dari tujuan semula. Pepolit ternyata dimanfaatkan oleh Menteri Pertahanan Amir Syarifudin untuk kepentingan politik golongannya. Karena sehaluan dengan menteri, maka Pepolit tumbuh menjadi tempat indoktrinasi dan sekaligus tempat menyebarkan ideologi komunis bagi anggota-anggota tentara dan laskar rakyat. Keberadaan Korps Pepolit dan Staf Pepolit banyak ditentang oleh para panglima divisi dan para perwira Markas Besar Tentara. Menurut Simatupang, pemberian pangkat tinggi kepada para politisi yang duduk di dalam Pepolit, telah menimbulkan kejengkelan dan iri hati yang mendalam di kalangan Korps Perwira Markas Besar Tentara.³¹

Untuk membendung aktivitas Amir dengan pepolitnya, pada tanggal 20 April 1946 Markas Besar Tentara membentuk Dewan Penasehat Pimpinan Tentara

³⁰ A.H. Nasution, **Tentara Nasional Indonesia**, Vol. I (Jakarta : Angkasa Bandung, 1963), hlm.269.

³¹ T.B. Simatupang, **Pelopop Dalam Perang, Pelopor Dalam Damai** (Djakarta: Disjarah AD, 1954), hlm.60.

(DPPT), dengan tujuan untuk memberikan nasehat kepada Mabes mengenai soal-soal politik. Selain itu para panglima divisi diminta juga untuk membentuk badan-badan penasehat pada tingkat mereka. Dengan membentuk badan penasehat tersebut, tentara berusaha menyingkirkan staf Pepolit dan korps Pepolit. Sementara tindakan itu sendiri sudah merupakan suatu pembangkangan, tentara bertindak lebih jauh lagi dengan menentang kementerian pertahanan dengan jalan mengangkat tokoh-tokoh pemuda yang terkemuka dari Persatuan Perjuangan sebagai penasehat politik mereka.³²

Dalam bulan Mei 1946 Menteri Pertahanan Amir Syarifudin membentuk sebuah badan baru yang bernama Biro Perjuangan. Biro ini merupakan biro khusus dalam lingkungan kementerian pertahanan. Tujuan biro tersebut ialah untuk menampung sejumlah laskar yang tadinya didirikan oleh partai-partai politik. Pada bulan September 1946 Dewan Pertahanan Negara mengeluarkan peraturan negara mengenai organisasi laskar dan barisan. Dalam peraturan itu disebutkan bahwa laskar adalah organisasi militer di luar tentara resmi. Laskar mendapat biaya dari pemerintah dan hak-haknya disamakan dengan tentara. Laskar dipimpin oleh seorang perwira cadangan yang diangkat

³² Ulf Sundhaussen, *op. cit.*, hlm.48.

oleh menteri pertahanan. Biro perjuangan adalah wadah bagi laskar dan badan perjuangan, karena itu dibenarkan untuk membentuk inspektorat pusat dan daerah. Keberadaan biro perjuangan sebagai lembaga di bawah kementerian pertahanan dan pengangkatan personilnya juga menjadi wewenang menteri pertahanan, maka seperti halnya Pepolit biro perjuangan akhirnya menjadi alat politik Menteri Amir Syarifudin juga. Amir mengangkat dua orang komunis, yaitu Djokosujono dan Ir. Sakirman sebagai Kepala Biro Perjuangan, dengan pangkat mayor jenderal.³³

Berbagai badan perjuangan yang ada pada saat itu diorganisasikan menjadi brigade-brigade. Brigade-brigade tersebut ditempatkan di bawah pengawasan biro perjuangan. Amir Syarifudin sangat berambisi menguasai kelaskaran dan badan-badan perjuangan. Hampir sebagian besar laskar yang ada bisa dikuasainya, melalui biro perjuangan. Suatu perbandingan mengenai jumlah personil antara pasukan yang berada langsung di bawah komando biro perjuangan dan yang berada di bawah komando markas besar tentara, sampai tingkat tertentu menunjukkan keunggulan Amir. Menjelang 1946 personel TRI berjumlah sekitar 200.000 orang, sementara jumlah personil yang berada di bawah menteri pertahanan

³³ Nugroho Notosusanto, *op.cit.*, hlm.46.

jauh lebih besar.³⁴ Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin telah menguasai Angkatan Udara, Angkatan Laut (termasuk 80.000 orang marinir), Polisi Militer dan juga Korps Polisi Mobil yang sudah dikembangkan menjadi pasukan tempur yang tangguh.³⁵

Aktivitas orang-orang komunis di dalam wadah biro perjuangan, diimbangi pula dengan aktivitas di lapangan. Orang-orang komunis di dalam kondisi itu mendirikan Marx House di Solo, untuk melatih kader-kadernya dalam hal penguasaan ideologi maupun dalam hal penguasaan senjata. Pasukan-pasukan komunis sedikit demi sedikit ditarik dari garis depan pertempuran di Front Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan bahkan juga luar Jawa, hingga hanya sebagian kecil saja yang ditinggal di garis depan. Tindakan tersebut seolah-olah hanya sebagai lambang, bahkan PKI terwakili juga di garis depan. Kesatuan-kesatuan tersebut lengkap dengan senjatanya sebagian besar ditarik ke belakang dan tidak dipakai untuk keperluan menghadapi Belanda di garis depan. Baru di kemudian hari diketahui bahwa mereka dipersiapkan untuk merebut kekuasaan di Madiun, sebelumnya mereka digunakan untuk mengawal pemimpin-pemimpin PKI seperti Muso, Amir dan lain-lain pada waktu mereka

³⁴ A.H. Nasution, *op.cit.*, hlm.294.

³⁵ Ulf Sundhaussen, *op.cit.*, hlm.45.

berkeliling mengadakan rapat-rapat akbar. Biro perjuangan berakhir riwayatnya pada bulan Juli 1947, setelah dibentuknya TNI yang merupakan penyatuan TRI dengan laskar-laskar. Setelah dihapuskannya biro perjuangan Menteri Pertahanan Amir Syarifudin membentuk TNI Bagian Masyarakat. Pembentukan badan tersebut berdasarkan pertimbangan politis, guna memperkuat pengendalian kelompoknya terhadap Angkatan Perang. Pimpinan TNI Bagian Masyarakat adalah tokoh komunis yang bernama Ir. Sakirman, Amir juga membentuk direktorat jenderal angkatan laut di Lawang Jawa Timur, yang dipimpin oleh Atmadji, bekas sekretaris Gerindo. Direktorat jenderal ini membentuk Tentara Laut Republik Indonesia (TLRI). Melalui organisasi-organisasi tersebut golongan komunis berusaha mewujudkan tujuannya untuk dapat membentuk kekuatan bersenjata.³⁶

Walaupun menurut Wakil Perdana Menteri Setiadjit, TNI Bagian Masyarakat adalah jembatan antara tentara dan rakyat dalam usaha mempersatukan tenaga-tenaga pertahanan. TNI bagian masyarakat berkewajiban memberikan pendidikan ideologi kepada tentara. Namun pada hakekatnya TNI bagian masyarakat adalah biro perjuangan dalam bentuk baru. Hal itu adalah suatu rangkaian usaha Amir Syarifudin untuk

³⁶Sekretaris Negara Republik Indonesia, *op.cit.*, hlm.18.

mempersenjatai golongannya dengan biaya dari pemerintah.³⁷

Usaha golongan komunis dalam menguasai tentara, tidak hanya ditempuh melalui kementerian pertahanan, tetapi juga melalui jalur parlementer. Pada akhir Desember 1947, Z. Baharuddin, anggota KNIP dari sayap kiri, menyampaikan kepada pemerintah mosi rasionalisasi angkatan perang, yang antara lain berisi:

1. Rasionalisasi dalam kesatuan angkatan perang (dalam struktur komando dan pimpinan angkatan perang).
2. Menteri Pertahanan bertanggung jawab penuh terhadap masalah-masalah angkatan perang, baik dalam hal organisasi maupun dalam hal siasat.

Tujuan mosi itu sebenarnya untuk menguasai angkatan perang sebagaimana telah diusahakan sebelumnya, dengan berbagai cara. Dengan mengingat kondisi angkatan perang saat itu, tampaknya mosi itu cukup simpatik dan rasional. Partai-partai lain menyetujui mosi tersebut, karena sangat rasional dan mereka tidak memahami apa yang menjadi tujuan sebenarnya dari mosi tersebut.³⁸ Selama bulan Desember 1947

³⁷ Nugroho Notosusanto, *op.cit.*, hlm.48.

³⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia, *op.cit.*, hlm.19.

sampai Januari 1948, BPKNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat) membicarakan Undang-Undang No.3. Isi dari undang-undang tersebut merupakan usul dari Baharudin, yang antara lain menyatakan bahwa APRI (Angkatan Perang Republik Indonesia) supaya ditempatkan di bawah menteri pertahanan. Z. Baharudin pada dasarnya menuntut kesatuan antara kementerian pertahanan dengan angkatan perang.

B. Aliansi PKI Dalam Front Demokrasi Rakyat

Kegagalan kelompok sayap kiri dalam mempertahankan kabinet Amir, telah menyulut suatu pertentangan ideologi dan politik antara sayap kiri dengan kelompok lain yang menentanginya, bahkan merupakan awal dari suatu krisis negara yang berkepanjangan. Presiden Soekarno akhirnya memerintahkan Wakil Presiden Hatta untuk turun tangan menyelesaikan krisis dan membentuk kabinet. Hatta semula bermaksud hendak membentuk suatu kabinet nasional yang didukung oleh seluruh partai besar, bukan saja Masyumi dan PNI, tetapi juga Partai Sosialis, partainya Amir Syarifudin. Tujuan dari Hatta adalah agar tetap dapat mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional dalam menghadapi ancaman Belanda. Tetapi ketika itu Amir terlalu banyak menuntut kursi, yaitu 10 kursi dalam kabinet. Amir Syarifudin sendiri meminta kementerian pertahanan, dan bagi kawan-kawannya dari sayap kiri ia meminta kementerian perburuan dan sosial, kementerian kemakmuran, kementerian

pembagian makanan, kementerian penerangan, kementerian luar negeri, kementerian perhubungan, kementerian pendidikan dan kebudayaan, kementerian kehakiman dan kementerian dalam negeri. Amir Syarifudin meminta sepuluh kursi dalam kabinet dengan alasan bahwa partainya sudah berpengalaman dalam menghadapi Belanda.³⁹

Usaha gigih Amir Syarifudin untuk mendapatkan sepuluh kursi dalam kabinet, terutama kementerian pertahanan adalah suatu upaya untuk tetap dapat mengendalikan pemerintahan dan angkatan perang. Hal itu mutlak dilakukan mengingat segala bentuk kebijaksanaan Amir sewaktu menjabat sebagai perdana menteri maupun menteri pertahanan, semata-mata untuk kepentingan golongan sayap kiri dalam rangka merebut kekuasaan secara parlementer. Kegagalan Amir mendapatkan posisi-posisi penting dalam kabinet Hatta sangatlah merugikan eksistensi sayap kiri, karena segala kebijaksanaan yang dahulu sengaja dikeluarkan untuk kejayaan golongan sayap kiri dan kehancuran golongan politik sayap kiri, kini berbalik arah menjadi bumerang bagi kekuatan sayap kiri dan dirinya sendiri.

Hatta menolak tuntutan Amir, sehingga akhirnya terpaksa meninggalkan Amir, membentuk kabinet koalisi Masyumi, PNI, tanpa keikutsertaan Partai Sosialis apalagi golongan kiri lainnya.⁴⁰ Kabinet nasional tersebut terben-

³⁹ Panitia Peringatan 75 Tahun Kasman, *op.cit.*, hlm.151.

⁴⁰ Arnold C. Brackman, *op.cit.*, hlm.69.

tuk pada tanggal 29 Januari 1948. Sejak itulah untuk pertama kali Partai Sosialis berdiri di luar sebagai Partai Oposisi. Program kabinet Hatta ketika itu sederhana saja, yaitu menyelenggarakan persetujuan Renville, mempercepat terbentuknya Negara Indonesia Serikat, mengadakan rasionalisasi dan rekonstruksi aparatur negara dan melaksanakan pembangunan.⁴¹

Amir Syarifudin semakin mempererat aliansinya dengan kekuatan sayap kiri, dalam rangka menghadapi Kabinet Hatta. Amir tidak akan bisa berbuat banyak sekiranya tanpa dukungan partai-partai sayap kiri, karena semenjak perpecahan dengan Sutan Syahrir posisinya menjadi sangat terjepit. Sutan Syahrir yang mendapat dukungan hampir sebagian besar tokoh-tokoh Partai Sosialis yang duduk dalam KNIP dan BPKNIP telah mendukung sepenuhnya keberadaan Kabinet Hatta dengan segenap program kerjanya. Akibatnya Amir tidak lagi memiliki kekuatan yang memadai dalam parlemen, meskipun hampir sebagian besar anggota Partai Sosialis setia kepadanya.⁴²

Salah satu kekuatan sayap kiri yang mulai nampak menonjol dan kuat adalah PKI. Sejak awal kemunculannya, PKI terus melakukan gerak penyusunan kekuatan secara intensif. Kondisi obyektif Indonesia pada saat itu yang diwarnai dengan penindasan, penghisapan dan ketidakadilan

⁴¹ Ide Anak Agung Gde Agung, *Renville* (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), hlm.79.

⁴² G. Moedjanto, *op.cit.*, hlm.31.

yang terjadi akibat penjajahan, telah mendorong tumbuh suburnya sosialisme. Sosialis merupakan falsafah anti ketidakadilan yang sedang berkembang pesat di dunia pada saat itu. Sementara menurut R.T. McVey bentuk sosialisme yang paling ampuh dan revolusioner adalah komunisme. PKI dan komunis manapun di dunia pastilah akan mengamini pendapat R.T. McVey tersebut.⁴³ PKI secara intensif melakukan pendidikan kader komunis di berbagai tempat, di Madiun pendidikan kader terutama dalam hal penguasaan Marxisme diserahkan kepada Abdurrachman dan Muwaladi, dengan pengajar-pengajarnya seperti Tan Ling Djie.⁴⁴

PKI dan sayap kiri umumnya, mendukung sepenuhnya Amir dalam perseteruannya dengan pemerintah, karena meski Amir tidak mau bergabung dengan PKI, sebagai seorang komunis Amir telah banyak membantu perkembangan PKI baik secara langsung maupun tidak langsung. Sayap kiri menolak kabinet dan program kerjanya dengan berbagai cara. Sebuah dokumen tertanggal 5 Februari 1948, yang diketemukan pada hari setelah pemberontakan Madiun usai, menguraikan dengan rinci program kerja partai-partai yang tergabung dalam sayap kiri. Dokumen tersebut secara rinci menyatakan:

1. Kabinet presidensial harus dibubarkan dan diganti secepatnya dengan kabinet parlementer. Kabinet

⁴³ Colin Wild and Peter Carey, **Gelora Api Revolusi, Sebuah Antologi Sejarah (terj)** (Jakarta: Gramedia, 1986) hlm.26.

⁴⁴ Nugroho Notosusanto, *op.cit.*, hlm.46.

parlemonter harus dibentuk oleh sayap kiri.

2. Kabinet yang ada bukan kabinet ahli melainkan kabinet Masyumi yang ditutupi oleh Hatta. Dengan dalih apapun sayap kiri tidak dapat menerima kabinet Masyumi tersebut, sebab pemerintah berbau agama. Padahal prinsip sosialisme dan komunisme bertentangan dengan agama.
3. Kabinet Hatta pastilah tidak dapat melaksanakan keempat programnya.
4. Sayap kiri tidak mengizinkan Amir Syarifudin menjadi ketua delegasi dan dia harus mundur.
Amir harus kembali ke dalam kabinet, setidaknya menjadi menteri pertahanan. Dari kedudukan itu sayap kiri akan mempertahankan posisi-posisi kunci sehingga dapat membiayai partai-partai di sayap kiri. Amir telah bekerja sangat baik untuk partai-partai tersebut.
5. Kita harus menjelaskan
 - a. Siapa sebenarnya yang memecah belah rakyat.
 - b. Mengapa sayap kiri tidak dapat ikut serta dalam kabinet Hatta.
 - c. Mengapa kabinet Amir Syarifudin bubar.
 - d. Dalam persatuan nasional, kita tetap berusaha untuk mewujudkannya dengan syarat-syarat yang menguntungkan persatuan tadi, juga sejarah dan ideologi kita.
 - e. Syarat mutlak untuk mempertahankan kemerdekaan

nasional adalah aksi-aksi konkret buruh tani dan pemuda. Kita harus menggunakan ~~pernyataan~~ sayap kiri sebagai pegangan kita.



6. Cara melaksanakan kampanye untuk ~~mencapai~~ tujuan-tujuan tersebut pada tingkat pertama disesuaikan dengan situasi.
 - a. Aksi-aksi di kota (buruh dan pemuda) harus sesuai dengan aksi-aksi yang dijalankan di desa-desa.
 - b. Dalam keadaan sekarang dan pertimbangan butir 6 ayat a, waktunya belum tiba untuk melancarkan pemogokan dan boikot, bila waktunya telah tiba maka instruksi akan diumumkan.
 - c. Aksi-aksi sekarang diarahkan kepada propaganda dengan cara-cara pertemuan umum, pertemuan tertutup, pertemuan bersama dengan partai-partai dan organisasi-organisasi lain seperti PNI, PSII, Masyumi, Parkindo, BPRI, serta pertemuan-pertemuan dengan pejabat pemerintah, polisi, tentara, terutama dengan bawahan. Kampanye pers, pamflet, poster, radio dan cara-cara propaganda lain.
 - d. Penerimaan anggota baru secara besar-besaran terutama setelah pertemuan-pertemuan.
 - e. Dalam propaganda, agama jangan dihina. Sebaliknya, haruslah ditekankan kepada pemeluk agama tadi bahwa mereka harus menjaga kesucian agama mereka. Kita harus waspada agar agama jangan digunakan oleh para pemimpinnya untuk kepentingan mereka sendiri. Hal

itu bahwa sayap kiri menyetujui ajaran agama...." dengan *delicate teaching*".... Tetapi bagaimanapun tujuan sosialis ekonomi adalah tujuan ideal kita. Jika kekuasaan telah berada di tangan kita semuanya akan beres.

7. Semua pertemuan butir 6 ayat d haruslah diselenggarakan dalam hubungan dengan sayap kiri dan bukan untuk kepentingan partai yang lain, walaupun pertemuan tidak diselenggarakan oleh semua partai dalam sayap kiri.
8. Kelompok-kelompok yang memecah persatuan aksi buruh, petani, pemuda harus diserang dalam berbagai segi, pemerintahan, parlemen, organisasi massa, sarekat buruh BTI dan lain-lainnya.
9. Menurut pasal 28 UUD 45 anggota tentara tidak dilarang untuk ikut demonstrasi sebagai warga negara biasa.
10. Kita harus waspada terhadap kaum radikal kiri supaya mereka tidak mengambil keuntungan dengan membuka kedok dan usaha-usaha kita.
11. Di samping hal-hal yang telah dinyatakan dalam butir 6 di atas, aksi-aksi ilegal dan positif harus diambil.
 - a. Selama kabinet Masyumi masih memerintah, aksi akan menimbulkan kekacauan di mana-mana, dengan cara mengarahkan gerombolan-gerombolan kriminal untuk merusak dan merampok secara intensif siang dan malam. Polisi tidak cukup kuat untuk menumpasnya.

Jika hal ini dapat dilaksanakan dengan efisien dan tepat seluruh rakyat akan hidup dalam ketakutan yang tetap dan sebagai akibatnya rakyat akan kehilangan kepercayaan kepada pemerintah.

- b. Tindakan-tindakan keras harus dijalankan, seperti menculik, kalauperlu terhadap mereka yang menentang rencana sayap kiri.

Dokumen ini pernah disiarkan oleh harian Murba edisi 5 Februari 1948, namun disangkal oleh golongan sayap kiri. Lepas dari benar tidaknya keberadaan dokumen tersebut, yang jelas perkembangan sayap kiri selanjutnya, hampir tidak jauh melenceng dari isi dokumen tersebut.⁴⁵

Pada tanggal 26 Februari 1948 diadakan suatu rapat akbar partai-partai sayap kiri di Surakarta. Dalam rapat tersebut para peserta menyepakati untuk menghapuskan sayap kiri dan membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) yang terdiri dari PKI, PS, PBI, SOBSI, Pesindo dan Sarbupri, Amir Syarifudin terpilih sebagai ketuanya. FDR kemudian menyusun program nasional terdiri atas empat pasal, yang pada dasarnya merupakan anti tesis dari program Kabinet Hatta. Adapun isi dari empat pasal program FDR tersebut adalah:

1. Pembatalan persetujuan Renville
2. Penghentian perundingan-perundingan dengan Belanda

⁴⁵ Tim Jawa Pos, **Lubang-lubang 30 Pembantaian** (Jakarta: Grafiti, 1990), hlm.13-14. Lihat juga Arnold C. Brackman, *op.cit.*, hlm.72.

sampai mereka menarik diri dari bumi Indonesia

3. Nasionalisasi semua kekayaan Belanda tanpa pemberian ganti rugi
4. Pembubaran Kabinet Presidensial Hatta dan pembentukan Kabinet Parlementer di mana wakil-wakil FDR diikutsertakan dengan menduduki kursi-kursi yang penting.⁴⁶

Program FDR tersebut pada dasarnya merupakan anti tesis dari program pemerintah. Pemerintah Hatta menyadari bahwa program FDR hanya untuk mencemarkan reputasinya dalam masyarakat dan lebih jauh untuk menjatuhkannya. Untuk itulah Hatta tidak menolak program nasional FDR kecuali yang tersebut terakhir. Hatta menganggap program nasional FDR pada hakekatnya adalah program pemerintah, sehingga untuk melaksanakan program tersebut tidak diperlukan pergantian kabinet. Amir Syarifudin kembali gagal menjatuhkan kabinet, karena tindakan politis Hatta.⁴⁷

Setelah segala usaha untuk menjatuhkan kabinet menemui kegagalan, FDR mengajukan tuntutan yang lebih lunak yaitu pendemokrasian kabinet. Usaha itu pun tidak berhasil karena keteguhan sikap Hatta. Tuntutan pendemokrasian kabinet semacam itu menjadi pola klasik dari gerakan komunis di manapun, termasuk pula di

⁴⁶G. Moedjanto, *op.cit.*, hlm.46.

⁴⁷*Ibid.*, hlm.32.

Indonesia. Ketika keberadaan mereka lemah dan terjepit mereka akan berkampanye, seolah-olah mereka adalah pejuang terdepan perdamaian dan demokrasi.⁴⁸ FDR semakin lama semakin gencar dalam menyerang pemerintah, bahkan dari beberapa dokumen rahasia mereka dapat diketahui bahwa aksi-aksi yang dilakukan adalah dalam rangka merebut kekuasaan. Dokumen-dokumen tersebut antara lain menyebutkan bahwa:

1. revolusi bersenjata direncanakan pada bulan Nopember 1948
2. rencana perebutan kekuasaan, baik dengan jalan parlementer maupun dengan jalan non parlementer direncanakan sejak Juli 1948
3. perebutan kekuasaan dengan sendirinya merupakan tujuan akhir. Tidak ada kompromi lagi tentang masalah ini. Pencapaian sasaran yang telah digariskan oleh strategi komunis dunia lebih diutamakan, bukan kepentingan Republik Indonesia. Bahwa Republik sedang melakukan perjuangan mati-matian mempertahankan kemerdekaannya menghadapi agresi Belanda tidak terlalu menjadi masalah bagi PKI.⁴⁹

Perebutan kekuasaan secara non parlementer, baik dengan tindakan-tindakan politik maupun militer, telah dirumuskan

⁴⁸Miriam Budiardjo, *op.cit.*, hlm.85.

⁴⁹ Himawan Soetanto, *Perintah Presiden Soekarno, "Rebut Kembali Madiun"* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm.110.

dalam sebuah konsep yang disebut "Menginjak Perjuangan Militer Baru". Konsep tersebut antara lain menyebutkan hal-hal sebagai berikut:

1. Usaha-usaha perwira yang pro FDR dalam angkatan perang untuk mempengaruhi jalannya program rasionalisasi agar menguntungkan FDR
2. Hanya dari 20 kedudukan penting dalam Angkatan Perang masih berada di dalam tangan orang-orang FDR
3. TNI masyarakat praktis telah dibekukan.

Jadi kekuatan militer di tangan FDR boleh dibilang masih cukup kuat. FDR masih cukup yakin bahwa seandainya, oposisi berubah menjadi bentuk oposisi non parlementer, situasi dalam APRI (Angkatan Perang Republik Indonesia) masih sangat menguntungkan FDR. Mengenai program FDR untuk perjuangan secara parlementer adalah sebagai berikut:

1. mempengaruhi BP KNIP untuk menggolkan mosi yang isinya menyatakan bahwa program nasional FDR harus dijadikan program pemerintah, oleh karena itu pemerintah yang ada sekarang harus dibubarkan dan dibentuk pemerintah baru yang parlementer
2. mempercepat pembentukan front nasional, terutama front nasional daerah
3. front nasional akan mengadakan kampanye luas untuk membubarkan kabinet yang sekarang
4. jika rencana tersebut gagal akan diadakan demonstrasi-demonstrasi luas oleh kaum buruh, tani, prajurit dan

golongan-golongan lain yang dapat diajak bergabung dengan mereka. Demonstrasi-demonstrasi itu harus diikuti dengan pemogokan umum, jika perlu dengan tindak kekerasan.⁵⁰

Selanjutnya ada strategi tahap kedua, adapun bentuk strategi tersebut dikatakan bahwa "kami akan memutuskan hubungan dengan pemerintah dan meneruskan perjuangan kami dengan pimpinan kami sendiri, baik dalam bentuk pemberontakan maupun dalam bentuk pemerintahan sendiri. Guna mempersiapkan program selanjutnya maka telah digariskan rencana-rencana sebagai berikut:

1. Menarik sebagian pasukan-pasukan dari front.
 - a. Brigade Martono dan Yadaoe akan diperintahkan untuk memperkuat operasi-operasi di dalam.
 - b. Jika dipaksa untuk mengirimkan pasukan-pasukan ke front, maka akan dikirimkan pasukan-pasukan yang belum dipercaya.
2. Memindahkan pasukan-pasukan ke daerah-daerah yang dianggap strategis dan menarik pasukan-pasukan dari daerah-daerah yang tidak dapat dipertahankan lebih lama lagi:
 - a. Daerah Madiun akan dijadikan basis gerilya paling kuat untuk melakukan perjuangan jangka panjang.
 - b. Sedikitnya harus menempatkan 5 Batalyon di Madiun dan harus sudah ada di kota itu dalam bulan Agustus

⁵⁰ Himawan Soetanto, *op.cit.*, hlm.138.

1948.

- c. Akan membuat Solo sebagai *Wild West* untuk mengalihkan perhatian umum ke sana, tetapi kita harus mempunyai pasukan -pasukan terkuat di Solo, agar kekuasaan *de facto* selalu di tangan kita.
 - d. Kedu, Yogyakarta, Pati, Semarang, Bojonegoro, Surabaya, dan Kediri akan dijadikan daerah-daerah netral, yang berarti bahwa jika keadaan mengijinkan kita akan memperkuat daerah-daerah tersebut atau meninggalkannya. Kekuatan di daerah tersebut tidak boleh melebihi..... Batalyon.
 - e. Daerah-daerah Malang, Pekalongan, dan Banyumas dapat sepenuhnya ditinggalkan.
3. Di samping tentara TNI yang resmi, mulai sekarang kita harus membangun tentara rakyat dalam arti kata yang seluas-luasnya. Dalam arti umum kita harus membentuk pasukan-pasukan tersebut secara ilegal.
- a. Di setiap daerah kecamatan yang kita anggap strategis letaknya dan di mana pengaruh kita tertanam akan ditempatkan sekelompok prajurit yang terdiri dari 60 orang yang dipimpin oleh seorang komandan pasukan.
 - b. Keenam puluh orang itu akan dibagi menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil yang terdiri dari 6 sampai 10 orang untuk dikirim ke desa-desa.
 - c. Program kita untuk tahap kedua ini dapat ditentukan lebih lanjut menurut keadaan. Kita dapat mengatakan terlebih dahulu bahwa kita akan merealisasikan

program nasional terutama yang berhubungan dengan *land reform*, pertahanan rakyat dan perjuangan kaum buruh.

Demikianlah beberapa isi dokumen yang merupakan program FDR untuk mengadakan oposisi terhadap pemerintah Kabinet Hatta, baik yang bersifat parlementer maupun non parlementer.⁵¹

FDR menolak pelaksanaan rasionalisasi dan rekonstruksi (Rare), meskipun dahulu yang mengusulkan program ini adalah golongan FDR sendiri. Bahkan pada tanggal 27 Desember 1947 Kabinet Amir sendiri telah menyiapkan perintah pelaksanaan mosi tersebut, berupa dekrit presiden/panglima tertinggi. Namun gagal karena kabinet terlanjur jatuh duluan. Amir sebenarnya bermaksud menguasai militer dan memukul lawan-lawannya dengan program Rare tersebut. Namun setelah ia jatuh dan gagal menduduki kementerian pertahanan dalam Kabinet Hatta, apa yang dikhawatirkan selama ini benar-benar terjadi. Penguasa yang baru, dalam hal ini merupakan lawan politiknya, menggunakan program Rare tersebut untuk menghancurkan kekuatan persenjataan FDR.

Hatta bertekad melaksanakan Rare, karena telah menjadi program Kabinet dan telah ditetapkan menjadi Undang-Undang. Hatta melaksanakan Rare dalam rangka

⁵¹ K.M.L Tobing, *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia Renville* (Jakarta: Gunung Agung, 1986), hlm.115. Lihat juga Nasution, *Memenuhi Panggilan Tugas*, Jilid II (Jakarta: Gunung Agung, 1983), hlm.47.

memperbaiki kondisi ekonomi yang buruk, meningkatkan kualitas militer dan menghancurkan kekuatan bersenjata golongan oposisi FDR.⁵² Pemerintah bermaksud mendemobilisir tentara dari jumlah angkatan perang saat itu yang mencapai 453.000 orang, hingga akhirnya tinggal 57.000 orang. Tenaga-tenaga produktif dari sektor pertahanan tersebut akan dialihkan ke dalam sektor-sektor produktif. Adapun sektor-sektor tersebut mencakup lahan-lahan pertanian di desa-desa, pekerjaan-pekerjaan di sektor industri baik itu di perusahaan-perusahaan yang diselenggarakan oleh kementerian pembangunan dan pemuda maupun perusahaan-perusahaan yang diselenggarakan oleh sub-teritorial komando.⁵³

Setelah dilakukan reorganisasi dalam MBAP (Markas Besar Angkatan Perang), semua pangkat tentara diturunkan setingkat, agar antar jabatan dan pangkat seimbang. Sejumlah perwira akan diberhentikan dari jabatan dan diangkat sebagai perwira cadangan. Jumlah divisi dalam TNI diperkecil, dengan meleburkan beberapa divisi, hingga akhirnya hanya terdapat tiga divisi di seluruh Jawa. (lampiran 7) TNI masyarakat yang dulu dibentuk Amir seba-

⁵² G. McT. Kahin, *op.cit.*, hlm.260.

⁵³ A.H.Nasution, **Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia, Jilid 8, Pemberontakan PKI-1948** (Bandung: Angkasa Bandung, 1977), hlm.112-117.

gai basis kekuatan FDR akhirnya dibubarkan.⁵⁴ Divisi IV, Panembahan Senopati yang berkedudukan di Surakarta, merupakan salah satu divisi yang akan dilebur. Divisi yang dipimpin oleh Soetarto ini beranggotakan kurang lebih 5000 orang, separonya terdiri dari kesatuan ALRI pimpinan Letnan Kolonel Yadaoe (seorang komunis) dan pasukan Pesindo. FDR dapat mempengaruhi Soetarto untuk menolak dan melawan Rare tersebut, sehingga memicu ke tegangan di Solo dan sekitarnya.⁵⁵

FDR menentang keras penghapusan TNI masyarakat yang dilakukan pemerintah, di beberapa tempat sampai timbul demonstrasi dari anggota TNI masyarakat menentang tindakan pemerintah tersebut. FDR menuduh politik rasionalisasi Hatta sebagai usaha melemahkan FDR benar-benar terjepit, di satu sisi tindakan Hatta berhasil menghancurkan kekuatan-kekuatan bersenjatanya, di lain pihak rakyat menjadi kurang simpatik terhadap aksi-aksi yang dilakukan FDR.

C. Pemberontakan Madiun

Pada tanggal 3 Agustus 1948 Soeripno tiba di Bukit Tinggi dari Praha, melalui Rangoon. Dia membawa serta sekretarisnya yang bernama Soeprapto, yang sesungguhnya

⁵⁴ Disjarahdam VII/Diponegoro, **Sirnaning Yakso Katon Gapuraning Ratu** (Semarang: Dinas Sedjarah Militer, 1968), hlm.129-132.

⁵⁵ Himawan Soetanto, **op.cit.**, hlm.116.

merupakan nama samaran dari Moeso. Moeso semenjak 1935 menetap di Moskow, Uni Soviet. Pada tanggal 10 Agustus 1948 keduanya sampai di Yogyakarta, setelah berhasil menembus blokade Belanda dengan pesawat *Amphibi Catalina* dan mendarat di Campur Darat, Tulung Agung.⁵⁸ Kemudian pada tanggal 13 Agustus 1948 Moeso menghadap Presiden dan Wakil Presiden, setelah sebelumnya mengadakan hubungan dengan dua tokoh komunis terkemuka, yaitu Maroeto Daroesman dan Setiadjit. Presiden dan wakil berharap kedatangan Moeso dapat ikut membantu meredakan pertentangan politik yang sedang memanas.⁵⁹ FDR mendapatkan harapan besar dengan kedatangan Moeso ke Indonesia. FDR menerima segala konsep politik dan strategi perjuangan baru, yang dibawa oleh Moeso. FDR secara sistematis melancarkan kembali kecaman-kecaman, dan agitasi politik terhadap pemerintah. Hal itu dilakukan melalui mass media, rapat raksasa, demonstrasi maupun pemogokan-pemogokan dari kaum buruh.⁶⁰

Harapan berbagai pihak, yang disandarkan terhadap Moeso akhirnya tetap menjadi harapan yang tak pernah terwujud. Moeso tidak membawa perdamaian seperti yang diharapkan pemerintah selama itu, sebaliknya keberadaan Moeso juga tidak membawa kebesaran bagi FDR. Kedatangan

⁵⁸ Arnold C. Brackman, *op.cit.*, hlm.80.

⁵⁹ Himawan Soetanto, *op.cit.*, hlm.111.

⁶⁰ Moekhardi, *Akademi Militer Yogyakarta Dalam Perjuangan Pisik 1945-1949* (Jakarta: P.T. INALTU, 1977), hlm.84.

Moeso ke Indonesia bukanlah untuk memperkuat pemerintah, juga tidak untuk kebesaran FDR, kedatangannya semata-mata hanyalah untuk kejayaan PKI. Moeso datang ke Indonesia dengan membawa garis perjuangan baru yang telah ditetapkan oleh *cominform*, yaitu Doktrin Zhadanov. Doktrin tersebut menggariskan:

"Bahwa imperialis Barat dalam usahanya menyelamatkan dirinya di Asia telah melakukan kompromi-kompromi dengan kaum kanan di koloni mereka dan kemudian membentk negara-negara baru yang kenyataannya adalah pembagian kekuasaan dengan kaum reaksi dan kaum kompormis. Dalam hubungan itu tugas kaum komunis adalah menentanginya." ⁶¹

Usahanya yang pertama setibanya di Yogyakarta adalah mengambil alih pimpinan FDR dan menjadikan organisasi itu menjadi organisasi komunis. Moeso melakukan kritik dan oto kritik terhadap PKI, kemudian secara berturut-turut diikuti oleh SOBSI, PBI, dan PS. Hal itu sesuai dengan garis yang telah ditentukan di dalam doktrin komunis.⁶²

Pada tanggal 25 Agustus 1948 diadakan sidang partai dengan agenda antara lain pembentukan front nasional. Konsep ini disetujui PBI, PS, dan Pesindo, sehingga akhirnya lahirlah Partai Komunis Indonesia yang lebih kuat. Konsep yang ditawarkan Moeso tersebut dikenal dengan "Jalan Baru". Pokok-pokok pikiran yang termuat dalam Jalan Baru antara lain:

⁶¹ Ruth T. McVey, *The Calcutta Conference and The Southeast Asian Uprising* (Ithaca, New York : Cornell Universty Press, 1957), hlm.38-46.

⁶² D.N. Aidit, *op.cit.*, hlm.106.

1. Di bidang organisasi, golongan kiri seperti PBI, PKI, PS, harus melebur dan hanya membentuk satu partai dengan nama PKI.
2. Di bidang politik, menentang politik luar negeri RI yang kompromis, sedangkan untuk politik dalam negeri agar diadakan pembenahan struktur dan aparatur pemerintahan.
3. Sangat penting membentuk front nasional sebagai prasyarat tercapainya revolusi demokrasi, serta mengerahkan kekuatan massa untuk menghadapi Belanda.

Konsep Jalan Baru, pada hakekatnya merupakan suatu koreksi yang tidak hanya ditujukan kepada gerakan-gerakan komunis itu sendiri, tetapi sekaligus merupakan evaluasi terhadap berbagai kebijakan pemerintah RI, terutama yang menyangkut politik luar negeri.

Dari latar belakang perubahan strategi itulah maka sejak itu FDR menuntut pembatalan persetujuan Renville, mengecam Hatta yang hendak merealisasikan persetujuan itu sebagai penjual bangsa dan negara kepada imperialis. Pada hal yang menandatangani persetujuan itu tidak lain adalah Amir Syarifudin sendiri. FDR meminta agar politik luar negeri RI yang anti imperialis itu dengan tegas memihak blok Rusia, sebagai kubu anti imperialis. Tetapi Hatta, sebagai seorang nasionalis menolak tuntutan tersebut. Baginya bangsa Indonesia harus tetap percaya terhadap diri sendiri, berjuang atas tenaga dan kesanggupan yang ada

pada diri sendiri pula.⁶³

Moeso akhirnya melakukan suksesi dalam tubuh PKI, dengan cepat menggeser pimpinan polit biro PKI yang dipe oleh Sardjono dan Alimin. Keduanya disertai bidang propaganda di bawah kepemimpinan M.H. Lukman. Tokoh lainnya, Soeripno mengurus masalah luar negeri, Amir memegang bidang pertahanan, Wikana memegang bidang kepemu- daan. Nyoto memegang bidang perwakilan dan Aidit membi- dangi masalah perburuhan.⁶⁴

Rivalitas antara partai-partai politik yang semakin menajam, akhirnya menyeret pula keterlibatan pasukan- pasukan bersenjata yang ada di Solo. Terutama, pasukan- pasukan yang berafiliasi terhadap partai-partai politik. Aksi-aksi teror penculikan dan sabotase meningkat. Situasi antagonisme terjadi dan sangat sukar untuk diselesaikan secara tuntas, karena para pelakunya berlindung pada salah satu kelompok politik atau militer.⁶⁶ Pada tanggal 15 September 1948 Presiden Soekarno menyatakan daerah Solo dan sekitarnya dalam keadaan bahaya perang. Presiden mengangkat Kolonel Gatot Soebroto menjadi Gubernur Militer daerah tersebut, dengan tugas mendamaikan pasukan-pasukan

⁶³ Pinardi, **Peristiwa Coup Berdarah PKI September 1948 di Madiun** (Djakarta: InKopak Hazera, 1996), hlm.49.

⁶⁴ Subhan Sd., **op.cit.**, hlm.10.

⁶⁶ Arnold C. Brackman, **The Communist Collapse** (New York : Norton Company, Inc, 1969), hlm.26. Lihat juga Djamal Marsudi, **Menyingkap Tapir Fakta-fakta Pemberontakan PKI dalam Peristiwa Madiun** (Djakarta: Merdeka Press, 1966), hlm.26.

yang bertempur dan merasionalisasi pasukan. Namun pertempuran tersebut masih terus berlanjut sampai tanggal 17 September 1948.⁶⁷

Selagi perhatian orang masih terpusat ke Solo, tiba-tiba pada tanggal 18 September 1948 pasukan bersenjata PKI yang meliputi Brigade 29 TNI masyarakat pimpinan Let. Kol Dahlan dan pasukan Pesindo pimpinan Soemarsono melakukan pemberontakan di Madiun. Soemarsono, Djoko Sujono dan Dachlan, sepakat untuk mengambil inisiatif sendiri merebut kekuasaan di Madiun, tanpa menunggu keputusan dari pemimpin-pemimpin politiknya.⁶⁸ Pasukan bersenjata PKI dengan cepat menduduki gedung-gedung pemerintahan, Markas Komando Pertahanan Jawa Timur, Markas Subteritorial Command (setingkat KOREM), Corps Polisi Militer (CPM), kantor-kantor polisi, bank-bank, kantor pos, dan telepon.

Perebutan kekuasaan secara serentak dilakukan di kota-kota dan di desa-desa di Keresidenan Madiun, Ponorogo, Magetan, Pacitan, Gorang Gareng, dan lain-lain. Perebutan kekuasaan dilanjutkan dengan penangkapan aparaturnya pemerintahan, anggota-anggota tentara, polisi, dan pemimpin-pemimpin partai politik yang bertentangan dengan PKI. PKI kemudian membantai mereka secara massal di dalam

⁶⁷ Kursus Kader Katolik, **Dari Madiun ke Lubang Buaya dari Lubang Buaya ke....** (Djakarta: Gunung Sahari, 1966), hlm.8.

⁶⁸ Moehkardi, *op.cit.*, hlm.92.

dalam sumur-sumur tua⁶⁹. Strategi yang digunakan PKI sangat rapi. PKI menempatkan 60 tentara komunis di setiap kecamatan, dari jumlah itu dibagi lagi menjadi golongan-golongan kecil, yang masing-masing berjumlah enam orang. PKI menempatkan setiap golongan kecil itu di desa-desa.⁷⁰

Lebih lanjut Soemarsono, Gubernur Militer Pemerintah Komunis Madiun, mengumumkan PKI Madiun tidak terikat lagi dengan Pemerintah Republik Indonesia, pimpinan Soekarno-Hatta. Ia memaklumkan pembentukan Republik Rakyat Indonesia di Madiun, dengan Internasionale sebagai lagu kebangsaan baru, dan merah putih bergambar palu arit sebagai bendera mereka. PKI mengecam pemerintah sebagai pengkhianat, karena telah menyerahkan puluhan ribu rakyat kepada Jepang untuk menjalani romusa. Pemerintah dituduh telah bekerja sama dengan Belanda untuk menjajah rakyat. Beberapa waktu kemudian PKI mengumumkan pemerintah baru, Soemarsono sebagai Gubernur Militer, Kolonel Djoko Sudjono sebagai Komandan Militer pasukan PKI, Abdulmutalib sebagai Residen, dan Supardi sebagai Wali Kota. PKI membentuk pula sejumlah kementerian, di antaranya kementerian pertanian, kementerian keuangan, kementerian buruh, kementerian sosial, kementerian kebudayaan. PKI menghapuskan adanya pajak dalam usaha mendapatkan simpati dari rakyat. PKI menganggap keberadaan pajak tidak selaras dalam suatu

69 A.H. Nasution, *op.cit.*, hlm. 258.

70 Tim Jawa Pos, *op.cit.*, hlm.30.

negara yang demokratis. Dalam pemerintahan yang baru rakyat Madiun harus mendaftarkan beberapa jumlah emas dan permatanya kepada penguasa, bahkan akhirnya kepemilikan uang juga harus didaftarkan, tidak seorang pun memiliki uang lebih dari Rp 500.⁷¹ PKI juga memberlakukan jam malam di daerah-daerah yang dikuasainya. Hal ini dilakukan dalam rangka mempercepat usaha pembersihan lawan-lawan politiknya. Politik intimidasi diberlakukan dalam rangka mempertahankan kekuasaannya. PKI menghimbau agar rakyat membantu pemerintah komunis, dan mengeluarkan ancaman dengan tindakan keras terhadap yang membangkang. Soemarsono berseru kepada kaum komunis di mana pun juga mengikuti jejaknya, dan pada akhirnya dia berkata "..... dan dari Madiun dimulai kemenangan (Van Madiun begint de victorie)⁷²

Ketika pemberontakan mulai meletus, Moeso beserta beberapa tokoh politik PKI lainnya sedang berada di Purwodadi. Akhirnya mereka membatalkan seluruh rencana rapat akbar, yang telah siap diadakan, setelah mendengar berita bahwa rekan-rekannya di Madiun telah merebut kekuasaan. Para politisi PKI sebelumnya tidak pernah menduga, kekuatan militernya akan melakukan pemberontakan secepat itu. Pada hal Moeso sedemikian jauh masih mengharapkan untuk bisa meneruskan oposisinya secara

⁷¹ Arnold C. Brackman, *op.cit.*, hlm.89.

⁷² Pinardi, *op.cit.*, hlm.88.

parlementer, selama dukungan dari rakyat belum memadai. Mereka selama ini dengan giat melaksanakan safari politik dari kota ke kota dalam usahanya merebut simpati dan dukungan dari masyarakat. Usaha kerasnya menjadi sia-sia oleh tindakan tokoh-tokoh militernya di Madiun. Moeso terpaksa menghentikan perjalanan kampanyenya yang telah dirintis selama kurang lebih tiga minggu itu. Moeso benar-benar dalam kondisi *fait accompli*, andai kata mendukung dan bergabung dengan pemberontakan yang prematur tersebut resikonya sangat besar, dan sebaliknya bila ia tidak bergabung juga akan tetap hancur karena pemerintah pasti akan membekukan partainya. Moeso tidak punya pilihan lain kecuali bergabung dan meneruskan perjuangan yang telah dibuka oleh kekuatan militernya di Madiun, sambil menunggu kemungkinan-kemungkinan adanya campur tangan dari kegiatan-kegiatan komunis Internasional.

Moeso dengan rombongannya mengadakan perjalanan kembali ke Madiun meski dengan perasaan bimbang. Moeso menjadi tiga ragu-ragu lagi setelah Soemarsono melaporkan secara rinci tentang kemenangan yang diraihnya. Gerakan tersebut semakin jelas sebagai sebuah pemberontakan, ketika sehari kemudian Moeso berpidato mengajak rakyat melawan pemerintah Soekarno-Hatta.⁷³ Bagi Soemarsono keputusan Moeso merupakan perintah untuk melanjutkan gerakan

⁷³ Sudarisman Purwokusumo, **Pemerontakan Madiun, Ditinjau dari Hukum Negara Kita** (Yogyakarta: Sumber Kemanusiaan Rakyat, 1951), hlm.8.

pembersihan terhadap mereka yang menentang PKI dan mempergiat serangan-serangan untuk memperluas daerah kekuasaannya.

Kabinet Hatta memutuskan untuk segera menumpas pemberontakan tersebut, dengan menugaskan Panglima Besar Jenderal Soedirman untuk melaksanakan operasi penumpasan. Pada tanggal 19 September 1948 Soekarno mengucapkan pidato melalui RRI (Radio Republik Indonesia) Yogyakarta. Dalam pidatonya Soekarno menyatakan agar rakyat memilih Bung Karno atau Moeso (lampiran 8). Pidato Presiden Soekarno tersebut besar sekali pengaruhnya, pihak-pihak yang semula masih ragu-ragu dalam menghadapi peristiwa Solo dan Madiun, kemudian menjadi tegas menentukan pilihannya di mana harus berdiri. BP KNIP, sebagai badan perwakilan rakyat dalam sidangnya tanggal 20 September 1948, secara bulat memberikan dukungannya kepada kebijaksanaan pemerintah, dengan memberi Presiden kekuasaan penuh selama tiga bulan.⁷⁴

Belanda yang selama ini menuduh RI sebagai komunis, menawarkan bantuan untuk menumpas pemberontakan PKI di Madiun. Pemerintah menolak dengan tegas bantuan tersebut dan menyatakan pemberontakan Madiun merupakan urusan dalam negeri RI. Operasi penumpasan dilakukan dari dua arah. Divisi Siliwangi, yaitu Brigade Sadikin dan Kusno Utomo,

⁷⁴ Sejarah Militer Kodam VII/Diponegoro, **Sirnaning Jakso Katon Gapuraning Ratu** (Semarang : Jajasan Penerbit Diponegoro, 1968), hlm.146.

mengepung dan menyerang Madiun dari arah barat. Divisi Brawijaya yang dipimpin Kol. Soengkono dan Mayor Yonosewoyo menyerbu dari arah timur. Pada tanggal 30 September 1948 pasukan Siliwangi berhasil membebaskan kota Madiun dan mencerai-beraikan pasukan-pasukan yang pro PKI. Dalam kondisi yang terjepit tersebut, beberapa tokoh politik PKI mulai sibuk membangun opini massa, bahwa peristiwa Madiun bukanlah suatu pemberontakan. Pada tanggal 20 September 1948 Soeripno mengumumkan melalui radio gelora Madiun bahwa PKI terpaksa bertindak untuk membela diri, karena sikap anti komunis pemerintah Hatta. Peristiwa itu bukanlah suatu *coup d'etat* terhadap pemerintah RI, bukan suatu revolusi, tetapi hanyalah sebuah pemerintah Front Persatuan Nasional Daerah Madiun.⁷⁵ Tindakan para politisi PKI tersebut sebenarnya sudah terlambat, rakyat sudah terlanjur mengerti bahwa peristiwa Madiun adalah pemberontakan PKI. Rakyat mendukung sepenuhnya pemerintahan Soekarno-Hatta. Dengan bantuan rakyat pasukan-pasukan pemerintah dapat dengan cepat menumpas pemberontakan PKI tersebut.

⁷⁵ John Hughes, *Indonesia Upheaval* (New York : David Mckay Company, Incm 1967), hlm.80. Lihat juga Nugroho Notosusanto, *op.cit.*, hlm.26-27.

BAB V

PERKEMBANGAN PKI

SETELAH PEMBERONTAKAN 1948 SAMPAI PEMILU 1955

Setelah mengalami kegagalan dalam pemberontakan Madiun 1948, posisi PKI secara organisasi menjadi sangat lemah, bahkan eksistensinya sudah dibubarkan, meskipun keputusan secara tertulis tidak pernah diumumkan. PKI hancur semenjak pemerintah aktif melakukan operasi pembersihan tanggal 30 Desember 1948.¹ Peristiwa tersebut telah banyak membawa korban termasuk dari pihak PKI sendiri, sebagian besar kader dan tokoh-tokohnya musnah. Muso sebagai tokoh kunci dalam gerakan tersebut, tertembak mati oleh TNI dalam penyamarannya sebagai kusir delman di Ponorogo. Mr Amir Syarifudin beserta kawan-kawannya terjepit di daerah rawa-rawa di utara Purwodadi. Pasukan Amir menyerah dalam sergapan TNI tersebut karena mereka tidak berhasil memasuki daerah Belanda.² Peristiwa penangkapan Amir dan kawan-kawannya telah melemahkan pendapat sebagian orang bahwa ada suatu bentuk kerja sama rahasia antara PKI dengan Belanda untuk menghancurkan pemerintahan RI. Amir Syarifudin dan pasukannya pasti akan memasuki wilayah pendudukan Belanda untuk menghindari

¹ Ali Sastroamidjojo, **Tonggak-tonggak di Perjalananku** (Jakarta: PT Kinta, 1976), hlm.236.

² Kursus Kader Katulik, **Dari Madiun ke Lubang Buaya dari Lubang Buaya ke ...?** (Djakarta: Gunung Sahari, 1967), hlm.8.

sergapan TNI, kalau bentuk kerja sama itu memang ada. Belanda sendiri memberlakukan larangan bagi hidupnya Partai Komunis di wilayah pendudukannya. Bersamaan dengan tertangkapnya Amir Syarifudin, ditangkap pula sejumlah tokoh komunis seperti Mayor Jendral Djoko Sujono, Drs. Maruto Darusman, Suripno, Sardjono, Hardjono Katamhadi, Oey Bie Hwat, Ronomarsono, D. Mangku, Sukarno dari Pesindo.³ Sementara pemimpin-pemimpin PKI seperti Tan Ling Djie, Abdul Madjid, Ir. Sakirman ditangkap di Yogyakarta. Mereka ketika ditangkap mengaku tidak mengerti akan adanya pemberontakan di Madiun.⁴ Menurut D.N. Aidit korban peristiwa Madiun, terutama dari pihak PKI jauh lebih besar dari yang terekspos pemerintah saat itu. Pemerintah telah melakukan penangkapan terhadap anggota-anggota Pesindo dan sejumlah perwira yang terlibat dalam peristiwa Madiun, seperti Mayor Jendral Ir. Sukriman, Letnan Kolonel Martono, Mayor Pamudji. Pemerintah juga telah menangkap Dr. Wioreno, Dr. Rustam dan Sutrisno.⁵

Peristiwa Madiun telah menyeret ribuan orang PKI ke penjara. Penangkapan besar-besar terjadi di mana-mana selama masa pembersihan yang dilakukan TNI dan anggota-

³ Subhan Sd., **Langkah Merah Gerakan PKI 1950-1955** (Yogyakarta: Bentang Budaya, 1996), hlm 10. Lihat juga Tim Jawa Pos, **Lubang-lubang Pembantaian** (Jakarta: Grafiti, 1990), hlm.172.

⁴ Kursus Kader Katulik, *op.cit.*, hlm.15.

⁵ D.N. Aidit, **Aidit Menggugat Peristiwa Madiun** (Djakarta : Jajasan Pembaharuan, 1965), hlm.41.

anggota masyarakat. Namun banyak pula orang komunis yang berhasil melarikan diri keluar negeri antara lain Abdul Madjid, Alimin, Ngadiman, Hardjosuprpto, D.N. Aidit, Njono, Tan Ling Djie, dan Sumarsono, Setiadjid, Wikana, Lukman. Sebagian besar di antara mereka berhasil melarikan diri pada saat situasi kacau akibat agresi militer Belanda II.⁶ Kehancuran PKI diikuti pula dengan kehancuran FDR, partai-partai kiri yang dulu disatukan oleh Muso dalam FDR, kini terpecah belah kembali. Para anggota partai-partai kiri tersebut sibuk menyelamatkan diri, salah satunya dengan cara memasuki partai-partai non FDR.⁷ PKI mengalami stagnasi selama masa itu, jumlah anggotanya merosot sampai beberapa ribu saja, tidak ada kader yang berkapasitas sebagai pimpinan. Sebagian tokohnya yang masih hidup telah melarikan diri dan bersembunyi. Organ-organ partai sebagian besar telah hancur berantakan.⁸

Sesudah pemberontakan Madiun dapat ditumpas, negara masih tetap melaksanakan Undang-undang darurat perang, untuk membersihkan sisa-sisa pemberontakan PKI. Baru pada 15 Desember 1948 keadaan darurat perang diakhiri.⁹

⁶ Antonie C.A. Dake, *In The Spirit of The Red Banteng : Indonesian Communist Between Moscow and Peking 1959-1965* (Mouton, Paris : The Hague, 1973), hlm.12.

⁷ Rosihan Anwar, *Sutan Syahrir* (Jakarta: Gramedia, 1981), hlm.301.

⁸ Kursus Kader Katulik, *op.cit.*, hlm.23.

⁹ Arief Priyadi, *Wawancara dengan Sayuti Melik* (Jakarta: CSIS, 1986), hlm.30.

A. Pengaruh Agresi Belanda II Bagi PKI

Pemerintah berusaha keras mengusahakan penyelesaian kasus Madiun sebaik-baiknya dan dalam waktu yang secepatnya. Sebelum pemerintah berhasil menyelesaikan peristiwa Madiun secara tuntas, Belanda melakukan agresi militer II pada 19 Desember 1948. Belanda mengerahkan hampir 140.000 tentara, termasuk 63.000 personal KNIL, untuk menyerbu RI yang beribukota di Yogyakarta.¹⁰ Serangan Belanda yang kedua kalinya tersebut, meskipun kekuatannya jauh lebih besar dari pada kekuatan pemberontakan di Madiun, tidak begitu mengejutkan pejuang-pejuang kemerdekaan Indonesia. Mereka sudah dapat meramalkan sebelumnya, jika gagalnya pelaksanaan persetujuan Linggarjati mengakibatkan terjadinya agresi militer Belanda yang pertama, maka sudah dapat dipastikan, bahwa gagalnya pelaksanaan persetujuan Renville akan diikuti terjadinya agresi militer Belanda yang kedua. Pejuang-pejuang Indonesia tidak terkejut, dan meskipun saat itu seperempat kekuatan tentara sudah hilang, sebagai akibat pemberontakan Madiun, namun dengan gigih mereka melakukan perlawanan terhadap tentara Belanda. TNI dan masyarakat bergerilya di desa-desa.¹¹

¹⁰ Moehkardi, *Akademi Militer Yogyakarta Dalam Perjuangan Fisik 1945-1949* (Jakarta: P.T. Inaltu, 1977), hlm.146.

¹¹ Arief Priyadi, *op.cit.*, hlm.303.

Agresi Militer II mengakibatkan situasi politik yang sangat labil dan tidak terkontrol. Organ-organ pemerintah baik di bidang eksekutif, legislatif maupun yudikatif hancur dan praktis tidak dapat menjalankan fungsinya. Pihak-pihak yang menangani masalah PKI menjadi sangat dilematis, untuk menyelesaikan dikhawatirkan para tahanan akan dibebaskan Belanda atau bahkan membebani para tahanan akan dibebaskan Belanda atau bahkan membebani jalannya gerilya melawan Belanda, dan kalau dilepas begitu saja lebih tidak mungkin mengingat kesalahan-kesalahan yang pernah mereka buat. Dalam situasi bimbang sejumlah tindakan cepat diambil seiring gentingnya situasi. Pada tanggal 19 Desember 1948, malam, tepatnya jam 23.30 WIB, Gubernur Militer Gator Subroto memerintahkan agar sebelas tokoh PKI yang ada dijatuhi hukuman mati. Hukuman mati tersebut berlangsung di dusun Ngalihan, Kalurahan Laleng, Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah. Kepolisian kerisidenan Surakarta mengumumkan kepada masyarakat pelaksanaan hukuman mati tersebut pada 20 September 1950:

"Betul pada hari Minggu tanggal 19-20 September 1948 jam 23.30 pemerintah telah memberikan hukuman secara militer kepada Mr. Amir Syarifudin, Mayor Jendral Djoko Sujono, Drs. Maruto Darusman, Soeripno, Sardjono, Harjono, Katamhadi, Oey Bie Hwat, Ronomarsono, D. Mangku dan Sukarno dari Pesindo."¹²

Setelah peristiwa itu, tindakan eksekusi tanpa prosedur hukum yang memang tidak memungkinkan pada saat itu, berlangsung di beberapa kota, seperti: Magelang, Kediri,

¹² Tim Jawa Pos, *op.cit.*, hlm.172.

Pati, Blora, Rembang, Kudus, Purwodadi, Cepu, Kediri dan lain-lain.¹³

Beberapa tokoh komunis berusaha melarikan diri dari tahanan-tahanan, setelah mendengar aksi-aksi eksekusi yang terjadi tanpa proses verbal tersebut, bahkan ada pula yang sengaja dibebaskan karena situasi semakin tidak terkendali. Mereka banyak yang akhirnya memilih bergabung dengan pasukan gerilya, atau membentuk pasukan gerilya sendiri dan banyak pula yang tidak diketahui lagi aktivitasnya.¹⁴ Mereka kembali membangun partai mulai dari titik nol. Sambil bergerilya mereka membentuk sel-sel bawah tanah, yang sifatnya terpisah satu sama lain. Mereka menyebarkan ideologi komunis kepada tentara-tentara, laskar-laskar, buruh dan para petani selama masa gerilya, tentu saja aktivitas tersebut dilakukan dalam tingkat kehati-hatian yang sangat tinggi. Mereka menyadari bahwa masyarakat masih trauma terhadap pemberontakan PKI di Madiun.

B. Razia "Agustus 1951"

Situasi politik yang tidak menentu dan tidak menguntungkan bagi perkembangan PKI itu berlangsung hingga 7 September 1949. Menteri kehakiman Mr Soesanto Tirtopradjo pada tanggal tersebut mengeluarkan pernyataan yang sangat melegakan kaum komunis, bahwa pelaku yang

¹³ D.N. Aidit, *loc.cit.*

¹⁴ Arnold, C. Brackman, *Indonesian Communism A History* (New York : Frederick A. Draeger, 1963), hlm.103.

terlibat dalam peristiwa Madiun tidak akan dituntut, kecuali bagi mereka yang terlibat tindak kriminal. Pemerintah Hatta merealisasikan keputusan tersebut, dengan melepaskan sejumlah anggota PKI dari tahanan.¹⁵ Kebijakan pemerintah tersebut telah menimbulkan suasana pro dan kontra bagi masyarakat Indonesia. Bagi pemerintah dan pihak yang pro dengan tindakan pengampunan terhadap PKI, menganggap bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan realistik dan positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. PKI bukan lagi ancaman karena sebagian besar anggotanya telah musnah. Bahkan tenaga PKI yang tersisa bisa bermanfaat dalam melawan Belanda dan dapat dimanfaatkan pula untuk merealisasi modal asing yang beroperasi di Indonesia. Pemerintah sendiri, merasa lebih mudah mengawasi gerakan legal PKI dari pada yang ilegal. Tindakan pemerintah sangat menguntungkan perjuangan politik luar negeri Indonesia. Bangsa-bangsa di dunia akan mengenal Indonesia sebagai negara Demokratis dengan politik luar negeri yang bebas dan aktif.¹⁶ Sementara pihak yang menentang mempunyai alasan bahwa tindakan PKI telah merugikan bangsa Indonesia, kondisi politik dan ekonomi negara menjadi sangat buruk. Pemberontakan PKI telah melemahkan bangsa Indonesia; akibat pemberontakan tersebut kekuatan TNI berkurang hingga 25%. Mereka ber-

¹⁵ Subhan Sd., *op.cit.*, hlm.11.

¹⁶ Arnold Brackman, *op.cit.*, hlm.123-124.

pendapat bahwa PKI tidak layak untuk diampuni.¹⁷

Nasib PKI dan kaum komunis menjadi semakin jelas ketika pada tanggal 4 Februari 1950 pemerintah menegaskan kembali bahwa PKI tidak dilarang dengan catatan apabila mau mematuhi hukum dengan tata tertib negara.¹⁸

Sesudah pemerintah RI membiarkan eksistensi PKI, berarti partai tersebut mempunyai kesempatan untuk melakukan kembali aktivitasnya secara legal. Sikap pemerintah itu memberikan dampak yang sangat besar terhadap tokoh-tokoh PKI. Mereka yang menghilang sejak kegagalan aksi kudeta di Madiun 1948, muncul kembali dari tempat persembunyiannya. Pada bulan September 1949, Alimin Prawirodirdjo kembali ke Indonesia. Dengan modal pengalaman akhirnya dia dipilih sebagai pemimpin partai. Alimin berusaha mengkonsolidasikan sel-sel partai yang tersisa ke dalam PKI. Persoalan pertama yang dihadapi Alimin adalah hancurnya struktur partai akibat pemberontakan Madiun. Bahkan individu yang menghidupi partai tak jelas rimbanya. Kader partai banyak yang terbunuh, serta tidak sedikit yang masih mendekam di penjara. Konsekuensi lainnya yaitu citra buruk yang menimpa PKI pada saat itu.¹⁹

Alimin benar-benar menghadapi kondisi obyektif yang

¹⁷ Soejitno Hardjoseodiro, *Dari Proklamasi ke Perang Kemerdekaan* (Jakarta : Balai Pustaka, 1987), hlm.16.

¹⁸ Subhan Sd., *op.cit.*, hlm.13.

¹⁹ *Ibid.*, hlm.25.

sangat berat. Ia mulai melakukan evaluasi terhadap peristiwa Madiun, sebelum membenahi partai. Salah satu hasil evaluasinya adalah strategi yang diterapkan PKI dalam peristiwa Madiun 1948, tidak tepat. Muso telah keliru menilai kondisi obyektif yang ada dan keliru menjalankan strateginya. Muso sangat percaya pada kekuatan massa, padahal kondisi PKI tidak didukung oleh faktor itu. Masyarakat yang bercerai-berai dan terkotak-kotak masa itu tidak difahami oleh Muso. Muso terobsesi dengan keberhasilan pemberontakan kaum komunis di Cekoslovakia, kekeliruan Muso adalah dia hanya melihat persamaan dari kondisi obyektif di Cekoslovakia dengan Indonesia, sebaliknya tidak mau melihat perbedaan kondisi obyektif yang ada.²⁰ Alimin mempergunakan hasil evaluasi tersebut untuk menentukan langkah-langkah pembangunan PKI. Alimin menghendaki PKI menjadi partai kader, yakni kuat secara kualitas. Intinya adalah kelompok kecil dan militan. Mereka disebar ke dalam berbagai kelompok masyarakat, baik itu kelompok buruh, kelompok tani, kelompok wanita, kelompok pemuda, dan lain-lain.²¹ Pengembangan sayap dengan strategi infiltrasi tersebut telah memberikan angin segar bagi Tan Ling Djie yang hendak membangun kembali Partai Sosialisnya. Pada tanggal 10 Juni 1950 PKI mulai membentuk Sekretariat Central Komite. Susunan sekretariat tersebut

²⁰ Arief Priyadi, *op.cit.*, hlm.38.

²¹ Subhan Sd., *op.cit.*, hlm.38.

terdiri dari : Sudisman, Djaetun, dan Ngadiman. Namun sesungguhnya kegiatan partai belum ada, kecuali pekerjaan yang dilakukan Tan Ling Djie dalam parlemen.

Pada bulan Djuli 1950 D.N. Aidit dan M.H. Lukman mendarat di Tanjung Periok, berkat pertolongan Syam Kamaruzaman, pemimpin serikat buruh kapal dan pelabuhan, mereka berhasil masuk ke Indonesia. Konon mereka telah menyaksikan kesuksesan revolusi Cina dan revolusi Vietnam, selama 1949-1950.²² Golongan muda yang dimotori Aidit memiliki cara pandang yang berbeda dengan golongan tua, terutama dalam hal pemahaman kondisi obyektif yang ada, dan strategi yang harus ditempuh dalam pembangunan partai. Perbedaan pendapat tersebut semakin lama semakin menguat, dan polarisasi kekuatan antara golongan tua dan golongan muda tidak bisa dihindari. Golongan muda tidak setuju dengan strategi yang ditempuh dengan oleh tua, karena dirasa lamban dan tidak sesuai dengan semangat jaman. Mereka menentang perjuangan lewat jalur parlementer dan menghidupkan kembali Partai Sosialis sebagai "Partai Penampung", yang dilakukan oleh Tan Ling Djie. Strategi partai kadar yang dijalankan golongan tua lama akan mengakibatkan PKI tidak populer di masyarakat. Itulah yang menjadi sengketa golongan muda. Mereka mengkritik habis-habisan golongan tua di dalam rapat komite central. (Kritik Otoritik). Friksi kedua golongan itu pada akhirnya

²² Kursus Kader Katulik, *op.cit.*, hlm.22-23.

mengarah pada perebutan posisi-posisi kunci di dalam partai.²³

Perseteruan internal tersebut akhirnya dimenangkan oleh golongan muda. Pada tanggal 7 Januari 1951 terjadi suksesi kepemimpinan dalam partai. Aidit berhasil mengambil alih posisi Alimin sebagai ketua partai. Pada tanggal itu juga CC PKI memilih Polit Biro baru, yang beranggotakan lima orang, yaitu: Aidit, Njoto, Loekman, Sudisman dan Alimin. Aidit sendiri menjadi sekjen I dan Sudisman sebagai ketua sekretariat komite sentral. Alimin tetap didudukkan dalam CC PKI, dengan harapan golonganmuda masih bisa mengontrol golongan tua.²⁴ Aidit mengeluarkan Jargon "Era Baru" sebagai legitimasi kekuasaannya. Dia bertekad menjalankan konsep "Jalan Baru" dari Moeso secara konsekuen. Polit Biro yang baru mendapat tugas untuk memelihara kemurnian dan mewujudkannya dalam praktek nyata. konsep tersebut. Aidit dengan keras menindak orang-orang golongan tua dengan tuduhan sebagai oportunist yang anti pada "Jalan Baru".²⁵ Rapat Pleno CC PKI bulan Januari 1951, selain memilih Aidit sebagai ketua Polit Biro yang baru, juga telah memvonis Tan Ling Djie dan mengikuti ajarannya adalah suatu bentuk penyelewengan dari konsep

²³ Subhan Sd., *op.cit.*, hlm.28.

²⁴ Kursus Kader Katulik, *op.cit.*, hlm.25.

²⁵ D.N. Aidit, **Pilihan Tulisan I** (Republik Rakyat Tiongkok : Panitia Penerbitan Karya-Karya Aidit, 1965), hlm.15.

"Jalan Baru". Kemudian dalam sidang Pleno CC PKI 1951, PKI telah berhasil membentuk konstitusi baru, sebagai penyempurnaan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) yang telah disahkan dalam kongres ke IV tahun 1947 di Solo.²⁶ Aidit menyadari bahwa polarisasi visi dalam internal partai yang telah berlangsung semenjak penandatanganan Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949. Tidak akan bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat. Kelompok pertama berpikir sangat dogmatis, yaitu menginginkan agar PKI terus bersikap keras dan tak kompromi, serta tak henti melakukan perlawanan terhadap pemerintahan RI. Kelompok kedua cenderung bersikap anti dogmatis, mereka lebih suka mempertahankan eksistensi partai secara legal dalam wilayah RI.²⁷ Aidit sendiri sebenarnya dahulu termasuk dari golongan radikal namun ketika berhasil menjadi pemimpin partai, mau tidak mau dia harus bersikap rasional revolusioner bukannya emosional revolusioner. Aidit menguasai partai dengan legitimasi, melaksanakan konsep Jalan Baru secara konsekuen, maka strategi yang ditempuhnyapun tidak akan jauh berbeda dari apa yang pernah dilakukan Moeso. Asas dan tujuan Aidit pada hakekatnya sama dengan asas dan tujuan Muso. Asasnya adalah pertentangan golongan dalam masyarakat (pertentangan kelas), tujuannya adalah merebut kekuasaan negara untuk mencapainya dipergunakan dalil *Het Doel*

²⁶ Kementerian Penerangan RI., **Kepartaian di Indonesia** (Djakarta: Deppen RI, 1951), hlm.280.

²⁷ Dinas Sejarah TNI-AD., *op.cit.*, hlm.212.

Heiligt de Middelen (tujuan menghalalkan segala cara). Aidit menyadari beban berat yang dihadapinya, karena tidak memiliki modal yang cukup besar, seperti yang dimiliki Moeso ketika memimpin partai. Moeso memiliki cukup besar anggota partai, mewarisi organisasi yang solid dan memiliki kekuatan bersenjata yang cukup besar. Sementara Aidit hanya mewarisi puing-puing partai dari pendahulunya.²⁸ Aidit merasa sangat berkepentingan untuk merangkul kekuatan-kekuatan dari beberapa golongan yang bisa bermanfaat bagi perkembangan partai. Dalam urusan-urusan internal partai, akhirnya dia lebih banyak menempuh jalan tengah sebagai bentuk kompromis dari friksi-friksi yang ada. Ia mengarahkan partai agar menjadi besar dan mendapat simpati di kalangan masyarakat luas, tapi sekaligus membangun struktur partai dengan kuat agar posisi partai tidak goyah, kongkretnya melahirkan penggalangan berbagai kekuatan massa, karena merekalah yang akan bekerja keras di tengah-tengah masyarakat dan mampu menggerakkan massa rakyat. Aidit tanpa malu-malu menjalin kerja sama dengan berbagai kekuatan massa.

Strategi yang diterapkan Aidit tampaknya sangat kontradiksi dengan peran-peran PKI di bawah kendalinya. Boleh jadi ia menjalankan dua cara sekaligus, di tingkat suprastruktur memainkan peran yang resmi tetapi di infrastruktur menjalankan program-program provokatif, nyata-

²⁸ Arief Priyadi, *op.cit.*, hlm.316.

nya PKI menjadi penggerak dalam aksi-aksi pemogokan dan kekerasan endemi sepanjang tahun 1950-1951. Pelaku pemogokan itu umumnya SOBSI, BTI, PKI yang pada gilirannya berakibat fluktuatif. Pada mulanya aksi pemogokan itu dirasakan sebagai respon untuk menandingi kekuatan asing, namun pada akhirnya menjadi ancaman bagi kepentingan nasional. Maka pada tanggal 13 Februari 1951 Perdana Menteri Natsir mengeluarkan keputusan No.1 untuk meredam pemogokan itu.²⁹ PKI mengeluarkan pernyataan pada 15 Februari 1951, berkaitan dengan keputusan No.1 tersebut, menurut PKI larangan tersebut merupakan pelanggaran hak-hak asasi manusia. PKI menuduh pemerintah lebih melindungi golongan pemilik modal dari pada kepentingan buruh.

Aksi-aksi pemogokan berlangsung terus hingga masa pemerintahan Perdana Menteri Soekiman. Pemerintah Soekiman melakukan beragam upaya agar aksi-aksi pemogokan itu tidak meluas. Kendati demikian aksi tidak juga reda. Akhirnya Soekiman bertindak tegas, pada tanggal 11 Agustus 1951 sejumlah 600 pengacau di perkebunan Sumatra Timur ditangkap. Pemerintah juga menangkap 15 anggota DPR yang sebagian besar komunis, sekretariat CC PKI dan SOBSI digeledah. Pada tanggal 16 Agustus 1951 200 orang di Jawa Timur dan 50 orang di Jawa Barat ditahan. Presiden Soekarno sendiri membenarkan tindakan tersebut. Penggeledahan-pengeledahan baru berakhir pada bulan Nopember, hasilnya

²⁹ Subhan Sd., *op.cit.*, hlm.31.

15.000 orang dari golongan ekstrim baik kiri maupun kanan ditahan.³⁰ Tokoh-tokoh kiri banyak yang tertangkap dan tak bisa menghindar antara lain Tjugito, K Werdojo, Peris Pardede, Sidik Kertapati, Djaetun Dirdjowijoto, Muchfaruddin, Tan Ling Djie, Siauw Giok Tjan. Anehnya tokoh-tokoh sentral PKI justru luput dari razia itu. Alimin Prawirodirdjo kabarnya minta perlindungan di kedutaan RRC, sementara Aidit dan golongan muda lainnya menghilang.

Razia itu tidak sebatas terhadap para pelaku pemogokan, karena berbagai instrumen yang menyangkut gerakan komunis diincar, kantor CC PKI dan markas SOBSI di Jakarta digeledah. PKI menyebut peristiwa itu sebagai razia Agustus 1951, yang tidak lain adalah tindakan provokasi pemerintah Sukiman dalam mencari alasan untuk membubarkan PKI.³¹ Kekuatiran PKI akan adanya aliansi Soekarno-Masyumi dan kekuatan anti komunis dalam memprovokasi PKI seperti pada peristiwa Madiun akhirnya menjadi kenyataan. Tindakan Sukiman yang tegas itu melemahkan sekali pemogokan SOBSI, PKI terpaksa terkubur di bawah tanah lagi. Alimin mencari suaka politik di kedutaan besar RRT. Aidit, Lukman dan Njono menyembunyikan diri. Kader-kader PKI yang belum ditahan tidak berani berbuat banyak, karena ketakutan akan

³⁰ Herbert Feith, **The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia** (New York : Ithaca University Press, 1964), hlm.187-192.

³¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, **Gerakan 30 September Pemberontakan PKI Latar Belakang, Aksi dan Penumpasannya** (Jakarta : PT Ghalia Indonesia, 1994), hlm.23.

terulangnya peristiwa pembersihan yang terjadi di Madiun. Dengan demikian PKI sekali lagi terisolir, perkembangannya terhalang dan sampai 1953 sukar untuk maju dengan pesat.³²

C. Sikap PKI Terhadap Kekuatan Politik Lain

Reaksi keras pemerintah terhadap pelaku aksi pemogokan sangat memukul PKI, karena banyak aktivis partai yang ditahan dan banyak pula yang tewas. Hal itu menjadikan Aidit melakukan manover baru dengan membawa PKI bergerak secara ilegal (bawah tanah), selama satu tahun lamanya (1951-1952). Baru setelah kabinet Soekiman jatuh pada tanggal 23 Februari 1952, PKI muncul kembali secara terang-terangan. PKI berusaha menjalin aliansi dengan kekuatan politik lain untuk mengisolasi kekuatan yang anti komunis (Masyumi). PNI akhirnya terpilih menjadi teman kerja PKI. Kedua partai sama-sama berkepentingan untuk menyingkirkan Masyumi dari pemerintahan. PNI menganggap Masyumi sebagai saingan terbesarnya di dalam usaha mendominasi pemerintahan selama ini. Sedangkan PKI sendiri menganggap Masyumi sebagai musuh, pemerintahan dari kabinet Masyumi tidak akan pernah menguntungkan bagi ruang gerak PKI. Maka ketika Kabinet Wilopo dari PNI, menggantikan Kabinet Soekiman yang telah jatuh pada 22 April 1952, PKI langsung mengeluarkan pernyataan dukungan kepada Kabinet Wilopo. PKI memberikan jaminan kepada

³² Kursus Kader Katulik. *op.cit.*, hlm.31.

kabinet, bahwa SOBSI (ormas PKI) tidak akan menggerakkan aksi-aksi pemogokan yang dapat mengganggu eksistensi kabinet. CC PKI mengumumkan dukungannya terhadap kabinet Wilopo secara luas melalui surat kabar "Harian Rakyat" tertanggal 14 Juli 1952.³³

PKI akan tetap memberi dukungan kepada Kabinet Wilopo dengan catatan bahwa kabinet itu tetap progresif dan anti fasis. PKI menyatakan dukungan terhadap kabinet Wilopo, dengan alasan kabinet lebih demokratis, terbukti kabinet mau mencabut SOB (Staat van Oorlog en Beleg) dan memperbesar hak-hak parlemen. Pada masa pemerintahan Wilopo, PKI berusaha merehabilitasi namanya yang telah cemar akibat pemberontakan Madiun dan rasia Agustus 1951. PKI senantiasanya mengidentifikasikan diri sebagai partai nasionalis, yang sangat agresif membela kepentingan nasional. Aksi-aksi pemogokan tidak lagi ditujukan untuk merongrong pemerintah, tetapi lebih diarahkan pada dukungan terhadap usaha-usaha pemerintah menguasai kilang minyak-kilang minyak asing, mengawasi perusahaan-perusahaan asing dan usaha penolakan terhadap modal asing.³⁴

Semenjak tahun 1952, PKI mulai dapat diterima oleh kekuatan-kekuatan politik lainnya. PKI mulai dapat

³³ Herbert Feith, *op.cit.*, hlm.272. Lihat juga Soe-bagiyo IN., **Wilopo 70 Tahun** (Jakarta: Gunung Agung, 1976), hlm.117.

³⁴ Benhard Dahm, **Sejarah Indonesia Abad Kedua Puluh** (terj) (Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, 1988), hlm.206.

mengikuti kembali acara-acara resmi kenegaraan. Berbeda dengan sikap PNI, Presiden Soekarno masih tidak suka terhadap PKI. PKI menangani sikap Soekarno secara persuasif. Pada saat peringatan harijadi PKI yang ke-32, tanggal 23 Mei 1952, orang-orang PKI meneriakkan slogan baru yaitu, "Hidup Bung Karno, Hidup PKI". Slogan tersebut merupakan siasat PKI dalam menetralisasi sikap Soekarno. PKI berusaha keras mengisolasi Masyumi dengan cara mendekati PNI dan Presiden Soekarno.³⁵

Dalam konferensi nasional partai yang berlangsung pada tahun 1952, PKI melakukan evaluasi apa yang telah dicapai dan berhasil menggariskan program kerja selanjutnya. Konferensi memutuskan untuk memperkuat pemahaman ideologi bagi para kadernya, dan melakukan penambahan anggota sampai 100.000 dalam jangka waktu enam bulan.³⁶ Untuk merealisasikan sasaran tersebut, partai menempuh berbagai macam cara. Sejak tahun 1953, dalam rangka meningkatkan pemahaman ideologi para kadernya, secara intensif partai melakukan pendidikan kader, menyediakan bahan bacaan murah, sederhana dan mudah dimengerti. PKI secara intensif menterjemahkan buku-buku tentang komunisme ke dalam bahasa Indonesia, menerbitkan kembali "Bintang

³⁵ Subhan Sd., *op.cit.*, hlm.51.

³⁶ D.N. Aidit, *op.cit.*, hlm.411.

Merah" dan "PKI Buletin" sebagai corong partai.³⁷ Bagi PKI pendidikan sistematis tahap demi tahap, sangatlah penting untuk membina politikus-politikus yang cakap, berani dan penuh pengabdian.

Central Komite PKI menyelenggarakan ceramah-ceramah, diskusi-diskusi dengan organisasi-organisasi di bawahnya, sebagai bentuk tindak lanjut dari pendidikan kader. Mereka mendiskusikan berbagai macam topik, baik tentang ajaran Marxis-Leninis, tentang program kerja partai, maupun permasalahan-permasalahan yang dihadapi para kadernya di lapangan. Kegiatan itu paling tidak dilakukan sebulan sekali.³⁸ PKI menugaskan para kader yang telah dianggap matang untuk terjun langsung ke masyarakat, dengan tugas menyebarluaskan ajaran-ajaran Marxisme-Leninisme dan program-program partai baik dengan ceramah, diskusi maupun dengan cara membagikan bacaan-bacaan pendukung.

PKI mendirikan suatu jaringan organisasi massa, yang langsung dipimpin oleh kader-kader partai. Usaha itu menghasilkan jutaan simpatisan PKI, sehingga target 100.000 selama enam bulan dapat tercapai. Fungsi ormas yang sesungguhnya adalah sebagai perhimpunan sosial yang memperjuangkan kepentingan lapisan tertentu dalam masyarakat. PKI memfungsikan ormas tidak lain hanya sebagai alat dari partai yang berfungsi mempengaruhi semua bidang

³⁷ Donald Hindley, **They Communist Party of Indonesia 18\951-1963** (Berkeley and Los Angeles : University of California Press, 1964), hlm.72-94.

³⁸ Kursus Kader Katulik, *op.cit.*, hlm.44.

masyarakat yang belum atau bahkan tidak terbuka bagi partai sendiri. Ormas-ormas tersebut juga menjadi sumber anggota baru bagi PKI. Rekrutmen anggota baru yang dilakukan oleh PKI tersebut, telah melahirkan dua karakter anggota, yaitu *direct structure* dan *indirect structure*. Direct Structure adalah tipe anggota yang memiliki kesadaran untuk masuk dan mengikatkan diri ke dalam partai tanpa pemaksaan. Sedangkan Indirect Structure adalah anggota yang diperoleh PKI dari organisasi massa yang berafiliasi dengan PKI, seperti BTI, SOBSI, BAPERKI (Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia), Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia) dan lain-lain. Anggota ormas-ormas tersebut secara otomatis menjadi anggota PKI.³⁹ PKI menawarkan bentuk kerjasama dengan partai-partai lain dalam bentuk Front Persatuan Nasional yaitu:

1. Front Persatuan Nasional buruh tani serta golongan-golongan borjuis kecil.
2. Front persahabatan antara kaum proletariat dengan para penghisapnya, majikan, pegawai pemerintahan, serta kelompok borjuis nasional lainnya.⁴⁰

PKI semakin lama semakin erat dengan PNI, bahkan pada bulan Maret 1953 PNI menyatakan bahwa ia bukan komunis, tetapi juga bukan anti komunis. Sejak saat itu PKI semakin giat berusaha mengisolasi kekuatan-kekuatan anti komunis.

³⁹ Cheppy Haricahyo, *Ilmu Politik dan Perspektifnya* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1986), hlm.220

⁴⁰ Depagitprop CC PKI, *Front Persatuan Nasional* (Djakarta : Jajasan Pembaharuan, 1964), hlm.50-56.

Setelah Kabinet Wilopo jatuh, PKI menuntut pembentukan kabinet baru sesuai dengan Front Persatuan Nasional, yang di dalamnya termasuk PKI, tetapi tanpa Masyumi dan PSI. PKI gagal dan mencabut tuntutanannya. Kabinet Ali I (PNI) menjadi pengganti Kabinet Wilopo. PKI mendukung kabinet yang baru, meskipun dia sendiri tidak ikut dalam kabinet. Dukungan PKI lebih dikarenakan oleh tidak ikut sertanya Masyumi dan PSI dalam kabinet.⁴¹ Kabinet Ali I yang sudah terbentuk sejak 30 Juli 1953 mendapat dukungan penuh dari Persatuan Indonesia Raya (PIR) dan PKI. Ketika PIR pecah, pemerintah Ali Sastroamidjojo menjadi sangat tergantung terhadap suara PKI di parlemen. Konstelasi politik nasional mulai bergeser, kalau dulu PNI secara politis menjadi pelindung PKI, maka pada masa kabinet Ali I, PNI menjadi sangat tergantung pada PKI. Keuntungan-keuntungan PKI selama dua tahun mendukung kabinet Ali I, antara lain:

1. PKI dan ormas-ormasnya dapat berkembang dengan lebih cepat sehingga anggotanya melonjak hingga 1.000.000 orang.
2. Peran aktif PKI dalam mempertahankan kabinet hampir selama dua tahun, telah menyebabkan banyak golongan nasionalis termasuk Soekarno mulai beranggapan bahwa PKI merupakan partai yang berguna, tidak lagi destruktif.

⁴¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, *op.cit.*, hlm.27. Lihat juga Herbert Feith, *op.cit.*, hlm.332.

3. Berkat kerjasama dengan PNI, luka-luka PKI mulai sembuh, bahkan orang mulai melihat PKI sebagai partai yang sangat nasionalis dan anti imperialisme.
4. Ketika kabinet jatuh akibat korupsi, PKI tetap bersih karena tidak terlibat dan tidak ikut duduk dalam kabinet.
5. Ketika partai-partai sibuk berebut kursi di kabinet, PKI menggunakan waktunya justru untuk membangun partai dan melakukan perekrutan anggota.⁴²

Pada tanggal 16-20 Maret 1954 PKI mengadakan kongres nasional V di Jakarta. Kongres itu telah memutuskan masalah penting mengenai konsolidasi partai. Struktur organisasi partai disempurnakan, baik kedudukan maupun nama. Komisariat CC diiadakan dan diganti dengan provinsi comite (provcom) untuk tingkat propinsi dan termasuk pula wilayah Ibu Kota Jakarta. Di tingkat kabupaten dan kota besar PKI membentuk seksi comite (secom). Di tingkat kecamatan atau kota kecil PKI membentuk sub seksi comite (subsecom). Di tingkat kelurahan dan klasifikasi cabang-cabang produksi tetap tingkat resort comite (recom). Namun jika anggota recom lebih dari 100 orang maka harus dibentuk grup-grup yang anggotanya tidak lebih besar dari tujuh orang.⁴³

Kongres nasional V, telah melegitimasi dominasi

⁴² Donald Hindley, *op.cit.*, hlm.251.

⁴³ Subhan Sd., *op.cit.*, hlm.52.

golongan muda, regenerasi telah terjadi dalam tubuh partai. Tan Ling Djie dipecat dari comite central, dalam politbiro Alimin digantikan dengan Ir. Sakirman, dengan alasan kesehatan. Panca Tunggal, Aidit, M.H. Lukman, Sudisman, Ir. Sukirman dan Njoto menduduki politbiro. CC PKI praktis berisikan golongan muda PKI seperti, Peris Parded, Jusuf Aditorop, Bachtarudin, Nursuhud, K. Supit, dan M.Zaelani D.N. Aidit sendiri menduduki posisi sekjend CC PKI dengan M.H.Lukman sebagai wakil I, dan Njoto sebagai wakil II.⁴⁴ Dalam pidato penutupan kongres sekretaris jenderal partai menegaskan:

"Karena CC PKI yang baru terbentuk adalah pilihan anggota sendiri untuk memajukan partai, maka setiap anggota arus meyakini kebenaran dari setiap putusan CC PKI dan harus dijadikan pegangan. Hasil kongres ini adalah simbol kemenangan Marxisme Leninisme atas musuh-musuhnya. Kongres ini akan membawa partai puluhan tahun lebih maju. Keberhasilan kongres adalah simbol persatuan pimpinan pusat dan daerah, yang harus dikembangkan menjadi persatuan seluruh partai."⁴⁵

Kongres itu juga telah menyepakati suatu era baru PKI, dengan program kerja yang baru pula. Di bidang politik dan militer, PKI berhasil merumuskan strategi baru,

⁴⁴ Kementerian Penerangan Republik Indonesia, *op.cit.*, hlm.513.

⁴⁵ D.N. Aidit, *op.cit.*, hlm.262-264.

yang mereka kenal dengan Metode Kombinasi Tiga Bentuk Perjuangan (MKTBP). Melalui sidang polit biro CC PKI, partai melakukan pengesahan metode revolusioner tersebut. Metode tersebut mencakup:

1. Perjuangan gerilya di desa-desa yang terdiri dari kaum buruh tani dan tani miskin.
2. Perjuangan revolusioner kaum buruh di kota-kota, terutama kaum buruh angkutan.
3. Bekerja secara intensif di kalangan musuh, terutama di kalangan Angkatan Bersenjata.

MKTBP merupakan program PKI untuk menyebarluaskan pengaruhnya, menetralisasi lawan-lawan politiknya, serta menyiapkan dukungan yang luas di kalangan rakyat terhadap program-programnya. PKI menyusupkan kader-kadernya yang tangguh ke dalam partai-partai politik dan ormas-ormas, dalam rangka mencapai sasaran tersebut. Khusus mengenai pelaksanaan metode yang ketiga, yaitu bekerja secara intensif di kalangan musuh, terutama di kalangan ABRI, pelaksanaannya langsung di bawah D.N. Aidit, oleh kader-kader yang terpilih.⁴⁶ PKI secara sistematis dan metodis berusaha menguasai ABRI (Angkatan Darat) sejak tahun 1953.⁴⁷

⁴⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Op.cit.*, hlm.38.

⁴⁷ Hidayat Mukmin, *TNI Dalam Politik Luar Negeri Studi Kasus Penyelesaian Konfrontasi Indonesia-Malaysia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991), hlm.67.

D. PKI Berusaha Memenangkan Pemilihan Umum

Pemilu menjadi suatu keharusan bagi negara-negara yang demokratis semacam Indonesia saat itu. Keputusan pemerintah mengenai Pemilu secara kongkret tertuang dalam agenda nasional sejak RI dibentuk kembali pada tahun 1950. Kabinet Natsir dan Soekiman mencanangkan Pemilu sebagai program politik akan tetapi belum dapat dilaksanakan ketika kedua kabinet jatuh. Baru pada masa Kabinet Wilopo program Pemilu menunjukkan tanda-tanda yang semakin jelas. Pada tanggal 25 Nopember 1952 Kabinet Wilopo menyampaikan Rencana Undang-Undang (RUU) kepada parlemen (DPRS), lima bulan kemudian tepatnya tanggal 4 April 1953, RUU Pemilu tersebut disahkan menjadi Undang-Undang No.7 tahun 1953. UU itu ditandatangani oleh Presiden Soekarno dan dua anggota panitia Ad Hoc, yaitu Menteri Dalam Negeri Mohamad Roem dan Menteri Kehakiman Indonesia Wiriadinata. Pemerintah mulai memberlakukan undang-undang ini pada tanggal 7 April 1953.⁴⁸

Pemerintah membagi Indonesia ke dalam 16 daerah pemilihan, yaitu Jakarta Raya, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara-Tengah, Sulawesi Selatan Tenggara, Maluku, dan Irian Jaya. Namun untuk daerah pemilihan Irian Jaya tidak diadakan

⁴⁸ Subhan Sd., *op.cit.*, hlm.55.

pemilihan karena masih dikuasai Belanda. Pemerintah mem-berlakukan sistem pengangkatan di daerah itu. Pada tanggal 28 Nopember 1953, pemerintah melantik Panitia Pemilihan Indonesia (PPI).

Pemerintah Ali I memperkirakan jumlah penduduk Indo-nesia pada saat itu sebanyak 77.987.879, sementara jumlah pemilih yang terdaftar adalah 43.104.464, sedangkan jumlah pemilih yang sah adalah 37.875.294. Pemerintah mencatat adanya 172 macam gambar yang ikut pemilihan.⁴⁹ PKI selama masa kampanye berusaha meningkatkan aktivitasnya dalam rangka memenangkan pemilu. PKI banyak membuka cabang-cabang partai di daerah-daerah mulai dari desa sampai kota-kota. PKI menyebarkan brosur, pamflet, bill board, kartu-kartu kecil berlambang palu arit dan menambah pekerja full timer partai.⁵⁰ Rapat-rapat besar sebagai suatu media pendidikan politik masyarakat terus ditingkatkan frekuen-sinya. PKI mengikutsertakan tanda gambarnya untuk diguna-kan bagi calon-calon tak berpartai.⁵¹ PKI menyusupkan kader-kadernya ke dalam aparatur pemerintahan, mulai dari tingkat rendah di desa-desa sampai ke tingkat pusat di departemen-departemen. Mereka menguasai kaum buruh di

⁴⁹ Alfian, *Hasil Pemilihan Umum 1955 Untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)* (Jakarta: LEKNAS LIPI, 1971), hlm.4. Lihat juga Daniel Dha Kidae, *Pemilihan Umum di Indonesia Saksi Pasang Naik dan Surut Partai Politik* (Jakarta : LP3ES, 1981), hlm.17-40.

⁵⁰ Donald Hindley, *op.cit.*, hlm.125.

⁵¹ Alfian, *op.cit.*, hlm.45.

berbagai lapangan kerja swasta maupun negeri. PKI berusaha menempatkan orang-orangnya di Kantor Berita Antara dan hampir sebagian besar media masa yang ada di Indonesia. Hal itu dilakukan dalam rangka mempermudah propaganda partai.⁵² Bahkan PKI secara diam-diam menjalankan organisasi lain, yaitu PKI-malam yang bersifat ilegal. Organisasi ini merupakan bayangan yang berfungsi untuk menyelamatkan partai, apabila partai yang legal berada dalam posisi yang gawat.⁵³ PKI bahkan memanfaatkan kedatangan Presiden Uni Soviet Woroshilov ke Indonesia untuk kepentingannya. Dana penyambutan sebesar 11 Juta rupiah dihaburkan untuk kampanye partai yaitu, untuk membuat simbol-simbol, bendera, pamflet dan sebagainya.

Pemilihan umum I itu diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955, yaitu pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap. Pada saat itu setiap warga negara yang telah berusia 18 tahun ke atas, atau yang kurang dari 18 tahun tapi sudah kawin melakukan hak politiknya untuk memilih wakil-wakil mereka di DPR. Jumlah kursi yang diperebutkan sebanyak 257 buah. Masing-masing anggota DPR mewakili 300.000 penduduk. Jumlah keseluruhan ada 272 wakil dalam DPR, dengan rincian 257 diperebutkan dalam Pemilu, 3 orang diangkat sebagai wakil dari Irian Jaya, ditambah 6 orang

⁵² L. Rusli Karim, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia Sebuah Potret Pasang-Surut* (Jakarta: Rajawali Press, 1993). hlm.124.

⁵³ Subhan Sd., *op.cit.*, hlm.52.

wakil dari golongan Tionghoa, 3 orang wakil dari golongan Arab dan 3 orang wakil dari golongan Eropa.⁵⁴

Hasil pemilu untuk parlemen (DPR) yang berlangsung pada tanggal 29 September tersebut, baru diumumkan pada 1 Maret 1956. PKI mampu keluar sebagai partai terbesar keempat setelah NU diperingkat ketiga, Masyumi diperingkat kedua dan PNI di peringkat pertama. Kemenangan PKI tersebut sungguh di luar dugaan banyak pihak, bahkan di luar perkiraan PKI sendiri. Bagi PKI, hasil itu merupakan suatu yang menaklukkan suatu yang menakjubkan dan bertolak belakang dengan citra buruk PKI selama itu, sebab ternyata trauma politik peristiwa Madiun 1948 dan peran PKI dalam aksi mogok sepanjang 1950-1951 tidak berpengaruh. Perolehan suara itu sebagian besar datang dari Jawa yaitu 89,8%, sedangkan Sumatera menyumbang 8,6% dan sisanya dari pulau-pulau lain. Dalam pemilu 1955 itu, tanda gambar PKI sudah tersebar di seluruh daerah pemilihan.⁵⁵ PKI yang beranggotakan 500.000 orang dapat merebut 5.901.890 suara DPR dari 35.445.974 suara yang ada, sedangkan untuk konstituante dapat meraih 6.138.535 suara dari 37.063.054 suara yang terkumpul.⁵⁶

Dilihat dari kekuatan politik yang muncul setelah pemilihan umum itu, terlihat pergeseran yang menyolok.

⁵⁴ M. Rusli Karim, *op.cit.*, hlm.120.

⁵⁵ Alfian, *op.cit.*, hlm.1-4.

⁵⁶ Hidayat Mukmin, *op.cit.*, hlm.65. lihat Juga M. Rusli Karim, *op.cit.*, hlm.121.

Dalam DPRS terdapat 21 kekuatan politik yang mengelompok, baik berupa partai maupun fraksi, ditambah 12 orang anggota non partai dan fraksi. Dengan perincian, 93 kursi (40%) untuk partai, 42 kursi diantaranya diperuntukkan PNI, 18 untuk PIR Hazairin dan 13 bagi PRN, ditambah partai-partai kecil lainnya yang mendapat jatah kurang dari 10 kursi untuk masing-masing partai. Golongan Islam mendapat 24% (57 kursi), 44 diantaranya untuk Masyumi dan 8 untuk NU, dua partai lainnya hanya mendapat 5 kursi. Golongan komunis 9% (21 Kursi), 17 diantaranya untuk PKI. Sedangkan golongan sosialis dan Kristen mendapat 12,5%, 14 diantaranya untuk PSI (lampiran 9).⁵⁷

⁵⁷ Herberth Feith, *op.cit.*, hlm.120.

BAB VI

KESIMPULAN

Perkembangan PKI di Indonesia sangat fluktuatif, kadang mengalami pasang naik dan kadangkala surut sampai titik nol. Namun satu hal yang sangat menarik, bagaimanapun kondisi PKI baik dalam posisi naik maupun dalam posisi turun. PKI senantiasa dianggap sebagai ancaman bagi setiap pemegang kekuasaan di Indonesia. Sejarah telah membuktikan bahwa PKI senantiasa bangkit, tumbuh dan berkembang dalam suatu pola dasar yang sama dan terulang-ulang setiap saat. Mereka selalu bangkit dengan sistem sel, tumbuh dan dalam sebuah partai politik dan berkembang dalam politik nasional baik secara parlementer maupun non parlementer.

Dari uraian di depan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam lingkup sekecil apapun golongan atau bangsa manapun di dunia ini tidak akan pernah dapat mengasingkan dirinya dari pergaulan antar bangsa. Demikian pula dengan PKI (Partai Komunis Indonesia) sebagai partai politik penganut paham internasionalisme, mutlak memerlukan hubungan dengan pihak lain baik dari dalam maupun luar negeri. Menutup diri, hanya akan mempersulit dan menghambat kemajuan partai. Setiap hubungan yang dilakukan oleh PKI sudah terpola secara dokmatis dalam .FO

garis-garis besar Moskow. PKI sebagai salah satu elemen komunis internasional tidak bisa lepas begitu saja dari ikatan tersebut. Mereka terwadahi dalam *internasionale*, yaitu suatu gerakan Internasional dari golongan komunis.

2. Perbedaan kemampuan melihat kondisi obyektif yang ada dan perbedaan pemahaman dan cara pandang terhadap ideologi merupakan titik awal perpecahan yang terjadi dalam tubuh komunis di Indonesia khususnya. Pada tahun 1945 ada yang beranggapan bahwa ideologi Marxis harus dilihat secara doktriner, sehingga perjuangan komunis dimanapun adalah satu kesatuan integral dengan komunis Internasional. Namun ada pula yang memandang marxisme sebagai ilmu pengetahuan, petunjuk tindakan yang bisa dilengkapi dan disempurnakan dengan disesuaikan dengan kondisi obyektif daerah masing-masing, dalam rangka mewujudkan cita-cita mereka. Menurut PKI cita-cita tersebut harus bisa dicapai dengan jalan revolusi. Revolusi adalah usaha untuk melakukan perubahan secara total dalam waktu yang singkat (bukan dengan sistim tambal sulam). Revolusi di negeri-negeri jajahan harus bisa mengusir penjajahan dan menghancurkan setiap elemen birokrasi dan militer peninggalan penjajah. PKI tidak mau menerima bentuk-bentuk revolusi lain yang dilakukan oleh golongan lain (borjuis). Bagi orang-orang komunis PKI merupakan satu-satunya partai kaum buruh yang akan memperjuangkan nasib kaum buruh dan tani secara tulus dengan revolusi proletar.

3. Bagi PKI tujuan dari setiap partai politik adalah merebut kekuasaan dan politik tak lebih sebagai wahana untuk membentuk dan menggunakan kekuatan (*Machtsvorming en Machtscaanweding*). Dalam mewujudkan cita-citanya PKI senantiasa menghalalkan berbagai macam cara, baik secara parlementer maupun non parlementer. Dalam hal itu politik nampaknya benar-benar dipisahkan dari moralitas. Dalil yang lazim berlaku bagi kaum komunis. Dalam setiap percaturan politik adalah **Siapa yang paling mahir menggunakan siapa untuk tujuan apa, ia akan muncul sebagai pemenang.**
4. PKI dapat mendominasi politik nasional Indonesia, apa lagi bila iklim demokratisasi sedang berkembang dengan pesat. Ketika kondisi partai sangat lemah PKI akan selalu tampil sebagai pejuang terdepan dari perdamaian dan demokratisasi, namun tentu saja semua itu hanya kamufase belaka. Pengalaman di beberapa negara menunjukkan bahwa ketika PKI berhasil berkuasa, demokrasi tidak dapat tumbuh sama sekali, yang berlangsung tidak lebih sebagai Diktator Partai Komunis. PKI memiliki sejumlah keunggulan yang tidak dimiliki oleh partai-partai lain dan keunggulan-keunggulan itulah yang menjadi modal kemenangan PKI dalam Pemilu 1955. PKI merupakan satu-satunya partai politik di Indonesia yang pengorganisasiannya bersifat semi militer. PKI pandai memperhitungkan momentum-momentum revolusioner di Indonesia dan pandai mengidentifikasikan diri sepenuhnya dalam situasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Aboe Bakar Lubis
1992 **Kilas Balik Revolusi; Kenangan, Pelaku dan Saksi.** Jakarta: Universitas Indonesia.
- A.H. Nasution
1963 **Tentara Nasional Indonesia Jilid I.** Bandung: Angkasa.
- 1966 **Sedjarah Perjuangan Nasional di Bidang Bersendjata.** Djakarta: Mega Book Store.
- 1977 **Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 8 : Pemberontakan PKI. 1948.** Bandung: Angkasa.
- 1980 **Pokok-Pokok Gerilya.** Bandung : Angkasa.
- 1983 **Memenuhi Panggilan Tugas Jilid II.** Jakarta : Gunung Agung.
- Alfian
1971 **Hasil Pemilihan Umum 1955 Untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).** Jakarta : LEKNAS LIPI.
- Ali Sastroamidjoyo
1976 **Tonggak-Tonggak di Perjalananku.** Jakarta : PT. Kinta.
- Anderson, B.R.O"G.
1967 **The Pemuda Revolution : Indonesian Politics 1945-1946.** Michigan : University Microfilms.
- Arief Priyadi
1977 **Wawancara Dengan Sayuti Melik.** Jakarta: CSIS.
- Autorkhanov, Abdulrachman.
1965 **Communism Nationalism and One's Native Land dalam Problem's of The USSR.** Munich: ---.
- Brackman, Arnold C.
1963 **Indonesia Communism : A history.** New York : Frederickk Preager.
- 1969 **The Communist Collapse.** New York : Norton Company Inc.

- Erzeinski, Zbigniew
1990 **Kegagalan Besar, Munculnya dan Runtuhnya Komunisme Dalam Abad Kedua Puluh (terj).** Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Central Comite PKI
1964 **AD.ART (Konstitusi) PKI.** Djakarta : CC. PKI.
- Cheppy Haricahyo
1986 **Ilmu Politik dan Perspektifnya.** Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Dahm, Bernhard
1971 **History of Indonesia in Twentieth Century.** London: Praeger Publisher.
- Dake, Antonie C.A.
1973 **In The Spirit of The Red Banteng : Indonesian Communist Between Moscow and Peking 1959-1965.** Paris: The Hague.
- Daniel Dhakidae
1981 **Pemilihan Umum di Indonesia Saksi Pasang Naik dan Surut Partai Politik.** Jakarta: LP3ES.
- Depagitprop CC PKI
1964 **Front Persatuan Nasional.** Djakarta: Jajasan Pembaharuan.
- Dewan Redaksi Renmin Ribao dan Honggi
1964 **Pengalaman Sejarah Perang Anti-Fesis.** Peking: Pustaka Bahasa Asing.
- Duverger, Maurice
1981 **Partai-Partai Politik dan Kelompok-kelompok Penekan : Suatu Pengantar Komparatif.** Peking: Pustaka Bahasa Asing.
- 1964 **Dua Matjam Politik Ko-Eksistensi Damai Jang Bertentangan Sama Sekali.** Peking; Pustaka Bahasa Asing.
- Dinas Sejarah, TNI-AD
1968 **Sirnaning Yakso Katon Gapuraning Ratu.** Semarang: Pangdam VII/Diponegoro.
- 1977 **Cuplikan Sejarah Perjuangan TNI-AD.** Bandung : Fa. Mahjuma.
- 1979 **Sejarah TNI-AD 1945-1973**

- Djamal Marsudi
1966 **Menyikap Tabir Fakta-Fakta Pemberontakan PKI Dalam Peristiwa Madiun.** Djakarta: Merdeka Press.
- D.N. Aidit
1959 **Pengantar Filsafat Marxis.** Djakarta: DEPAGITPROP CC-PKI.
- 1964 **Tentang Marxisme.** Djakarta : Akademi Ilmu Sosial Aliarcham.
- 1965 **Pilihan Tulisan I. Tiongkok :** Panitia Penerbitan Karya-karya D.N. Aidit.
- 1965 **Aidit Menggugat Peristiwa Madiun.** Djakarta: Djajasan Pembaharuan.
- Angels, F.
1963 **Perkembangan Sosialisme Tetapi Menjadi Ilmu (terj).** Djakarta: Jajasan Pembaharuan.
- Ensiklopedia Indonesia Vol.III.** Jakarta : Ichtilsar Baru
1962 Van Hoeve.
- Feith, Herbert
1964 **The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia.** New York Ithaca University Press.
- Feith, Herbert and Costrle, Land.)ed)
1970 **Indonesian Political Thinking 1945-1965.** London : Cornell University Press.
- Goenawan Moehammad
1988 **Rangkaian Peristiwa Pemberontakan Komunis di Indonesia.** Jakarta: LSIK.
- Gottschalk, Louis
1975 **Mengerti Sejarah (terj).** Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Hadari Nawawi
1985 **Metode Penelitian Bidang Sosial.** Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hardi
1988 **Menarik Pelajaran Dari Sejarah.** Jakarta: Haji Masagung.

- Hidayat Mukmin
1991 **TNI Dalam Politik Luar Negeri Studi Kasus Penyelesaian Konfrontasi Indonesia-Malaysia.** Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Hidley, Donald
1966 **The Communist Party of Indonesia 1951-1963.** Barkeley and Los Angeles: University of California Press.
- Himawan Soetanto
1994 **Perintah Presiden Soekarno, "Rebut Kembali Madiun".** Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Hook, Sidney
1955 **Marx and Marxists.** London New-York: Van Nostrand Company Inc.
- Hughes, John
1967 **Indonesia Upheaval.** New York: David Mckoy Company Inc.
- Ide Anak Agung Gde Agung
1983 **Renville.** Jakarta: Sinar Harapan.
- I Gusti Ngurah Agung
1992 **Metode Penelitian Sosial: Pengertian dan Pemakaian Praktis.** Jakarta: PT Gramedia.
- Ingleson John
1974 **Road to Exile The Indonesian Nationalist Movement 1927-1934.** Singapore: Heinemann Educational Book.
- Kahin, Audrey.R.
1985 **Regional Dynamics of The Indonesian Revolution.** Honolulu. University of Hawaii Press.
- Kahin, G.McT
1970 **Nationalism and Revolution in Indonesia.** New York: Ithaca.
- Kementerian Penerangan Republik Indonesia
1951 **Kepartaian di Indonesia.** Djakarta: DEPPEN RI.
- Ketchum, Richard and Brumberg, Abraham
1971 **What is Communism? A Picture Survey of World Communisme (Sad).** Jakarta: Bulan Bintang.
- K.M.L. Tobing
1986 **Perjuangan Politik Bangsa Indonesia Renville.** Jakarta: Gunung Agung.

- Koentjaraningrat
1993 **Metode-Metode Penelitian Masyarakat.** Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Koentowijoyo
1995 **Pengantar Ilmu Sejarah.** Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Kursus Kader Katulik
1966 **Dari Madiun Ke Lubang Buaya dari Lubang Buaya ke?.** Djakarta : Gunung Sahari.
- Legge, John D.
1993 **Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan: Peranan Kelompok Syahrir.** Jakarta: Grafitti
- Lucas Anton E
1989 **Peristiwa Tiga Daerah Revolusi Dalam Revolusi.** Jakarta: Pustaka Utama Grafitti.
- Manai Sofyan
1994 **Kehormatan Bagi Yang Berhak.** Jakarta: Yayasan Mencerdaskan Bangsa.
- Marx.K.and Engels, F.
Manifesto of Communism Party. Moscow: Foreign Languages Publishing House.
- Masri Mangarimbun dan Sofian Effendi (ed)
1987 **Metode Penelitian Survei.** Jakarta: LP3ES.
- Meulen, Sd., Vander
1987 **Ilmu Sejarah dan Filsafat.** Yogyakarta: Kanisius/
- Miller, Rene F.,
1951 **Lenin dan Bandni.** Djakarta: Balai Pustaka.
- Miriam Budiardjo
1993 **Dasar-Dasar Ilmu Politik.** Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- M.I. Sajuti
1947 **Kesimpoelan-kesimpoelan Riwayat Partai Komoenis Roesia (sad).** Solo: Poestaka Rakjat.
- Moedjanto, G.
1993 **Indonesia Abad Ke 20 Jilid I dan II.** Yogyakarta: Kanisius.
- Moekhardi
1977 **Akademi Militer Yogyakarta Dalam Perjuangan Pisik 1945-1949.** Jakarta: P.T. Inaltu.

- M. Rusli Karim
1993 **Perjalanan Partai Politik di Indonesia Sebuah Protret Pasang Surut.** Jakarta: CV. Rajawali.
- Nugroho Notosusanto
1984 **Pejuang dan Prajurit Konsepsi dan Implementasi Dwi Fungsi ABRI.** Jakarta: Sinar Harapan.
- Panitia Peringatan 75 Tahun Kasman
1982 **Hidup itu Berjuang.** Jakarta: Bulan Bintang.
- Pinardi
1966 **Lihat Peristiwa Coup Berdarah PKI September 1948 di Madiun.** Djakarta: Ikopak Hazera.
- Poeze, Harry
1988 **Tan Malaka Pergulatan Menuju Republik Indonesia.** Jakarta: Grafitti.
- Politbiro CC-PKI
1971 **Tegakkan PKI Yang Marxis-Leninis Untuk Memimpin Revolusi Demokrasi Rakyat Indonesia.** Republik Rakyat Cina: Delegasi CC-PKI.
- Ramlan Surbakti
1992 **Memahami Ilmu Politik.** Jakarta: Gramedia.
- Ricklefs, M.C.
1991 **Sejarah Indonesia Modern (terj).** Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Soejitno Hardjosoediro
1987 **Dari Proklamasi ke Perang Kemerdekaan.** Jakarta: Balai Pustaka.
- Subhan Sd.,
1986 **Langkah Merah Gerakan PKI 1950-1955.** Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Sudarisman Purwokusumo
1951 **Pemberontakan Madiun Ditinjau dari Hukum Negara Kita.** Yogyakarta: Sumber Kemajuan Rakyat.
- Sudarminto, J.
1994 **Filsafat Pendidikan.** Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Sudijono Djojoprajitno
1962 **PKI-Sibar Contra Tan Malaka.** Djakarta: Djajasan Massa.
- Sundhaussen, Ulf.,
1986 **Politik Militer Indonesia 1945. 1967 Menuju Dwi Fungsi ABRI.** Jakarta: LP3ES.

- Sutan Syahrir
1982 **Sosialisme Indonesia Membangun Kumpulan Tulisan.** Jakarta : LEPPEAS.
- Sutarjo Adisusilo
1994 **Kapita Selekta Sejarah Eropa XVIII-XIX (Revolusi, Nasionalisme, Demokrasi, Komunisme).** Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Sutomo
1964 **Dari Madiun ke Lubang Buaya Sesudah itu ke....?.**
- T.B. Simatupang
1954 **Pelopor Dalam Perang, Pelopor Dalam Damai.** Djakarta : Disjarah - AD.
- Tim Jawa Pos
1990 **Lubang-lubang Pembantaian.** Djakarta: Graffiti.
- T. McVey, Ruth.
1957 **The Calcuta Conference and The South East Asian Uprising.** New York : Cornell University Press.
- Wild, Colin, and Carley, Peter.
1986 **Gelora Api Revolusi, Sebuah Antologi Sejarah (terj).** Jakarta: Gramedia.



L A M P I R A N

Lampiran. 1 :

1945 disusunlah Kabinet I Republik yang anggotanya adalah sebagai berikut:

Menteri Luar Negeri	: Mr. Subarjo, penasihat <i>Bukan fu</i> , kantor AL Jepang di bawah pimpinan Laksamana Maeda.
Menteri Dalam Negeri	: Wiranatakusuma, Kepala Departemen Dalam Negeri pemerintah Jepang.
Menteri Kehakiman	: Prof. Supomo, Kepala Departemen Kehakiman pemerintah Jepang.
Menteri Kesehatan	: Dr. Buntaran Martoatmojo, Penasihat Kantor Kesehatan dari Departemen Dalam Negeri pemerintah Jepang.
Menteri Pendidikan	: Ki Hadjar Dewantoro, Penasihat Kantor Pendidikan pemerintah Jepang.
Menteri Penerangan	: Mr. Amir Syarifuddin.
Menteri Sosial	: Mr. Iwa Kusumasumantri, Kepala Bagian Perburuhan Departemen Dalam Negeri pemerintah Jepang.
Menteri Perhubungan	: Abikusno Cokrosuyoso, Kepala Pemerintahan Umum pemerintah Jepang.
Menteri Keuangan	: Dr. Syamsi Sastrowidagdo, Penasihat Departemen Keuangan pemerintah Jepang.
Menteri Negara	: 1. Ki Wahid Hasyim, Penasihat Departemen Agama pemerintah Jepang. 2. Mr. Sartono, Penasihat Departemen Dalam Negeri pemerintah Jepang. 3. Mr. Maramis. 4. Otto Iskandardinata, Penasihat Departemen Keamanan pemerintah Jepang. 5. Dr. Amir, Penasihat pemerintah Jepang di Sumatra.

Satu-satunya menteri yang tidak pernah duduk dalam pemerintahan Jepang adalah Mr. Amir Syarifuddin yang pada tanggal 5 September 1945 masih belum dibebaskan dari penjara di Malang.

Sumber: Soebadio Sastrosatomo, *Perjuangan Revolusi* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997)

Lampiran. 2 :

Maklumat No. X

Presiden RI:

Sesudah mendengar pembicaraan Komite Nasional Pusat tentang usul supaya sebelum MPR dan DPR dibentuk yang hingga sekarang kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional, yaitu Komite Nasional Pusat (menurut pasal IV Aturan Peralihan dari UUD) dan supaya pekerjaan KNIP sehari-hari dijalankan oleh sebuah badan yang bernama Badan Pekerja yang bertanggung jawab kepada KNIP.

- Menimbang bahwa dalam keadaan yang genting ini perlu ada badan yang ikut bertanggung jawab tentang nasib bangsa Indonesia di samping pemerintah.
- Menimbang selanjutnya bahwa usul tadi berdasarkan paham kedaulatan rakyat.

Memutuskan :

Bahwa KNIP sebelum terbentuk MPR dan DPR diberi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis-garis besar haluan negara, serta menyetujui bahwa pekerjaan Komite Nasional Pusat sehari-hari, berhubungan dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah Badan Pekerja yang dipilih dari antara mereka dan bertanggung jawab kepada KNIP.

Jakarta, 16 Oktober 1945

Wakil Presiden Republik Indonesia

Moh. Hatta

Sumber: Soebadio Sastrosatomo, Perjuangan Revolusi
(Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987)

Lampiran. 3 :

MAKLUMAT PEMERINTAH.

PARTAI POLITIK.

Andjuran Pemerintah tentang pembentukan partai-partai politik.

Berhubung dengan usul Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat kepada Pemerintah, supaya diberikan kesempatan kepada Rakjat seluas-luasnja untuk mendirikan partai-partai politik, dengan restriksi, bahwa partai-partai politik itu hendaknja memperkuat perdjuaan kita mempertahankan kemerdekaan dan mendjamin keamanan Masjarakat, Pemerintah menegaskan pendiriannja jang telah diambil beberapa waktu jang lalu bahwa:

1. Pemerintah menjukai timbulnja partai-partai politik karena dengan adanya partai-partai itulah dapat dipimpin kedjaian jang teratur segala aliran paham jang ada dalam masjarakat.
2. Pemerintah berharap supaya partai-partai politik itu telah tersusun, sebelumnja dilangsungkan pemilihan anggota Badan-badan Perwakilan Rakjat pada bulan Djanuari 1946.

Djakarta, 3 Nopember 1945.

Wakil Presiden,
MOHAMMAD HATTA..

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

WAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

No.	PARTAI, GOLONGAN, FRAKSI PERWAKILAN DLL.	K.N.I.P.		DPR. RIS.	DPR.S. 1954	DPR 19 1956	PEMILU 55 1959	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG					DPR PE- MILU 1971
		1946	1949					A	B	C	D	E	
1.	MASYUMI	60	60		43	60	53	—	—	—	—	—	—
2.	P.N.I.	45	45		42	58	58	44	44	44	47	78	20
3.	N.U.	—	—		8	47	45	36	36	36	46	75	58
4.	P.K.I.	35	32		17	32	33	30	30	—	—	—	—
5.	PARKINDO	8	12		5	9	8	6	6	6	11	17	7
6.	P.S.I.I.	—	12		4	8	8	5	5	5	12	20	10
7.	KATHOLIK (P.K.R.I.)	4	12		9	8	8	5	5	5	11	15	3
8.	P.S.I.	35	36		15	5	5	—	—	—	—	—	—
9.	MURBA	—	8		4	—	—	1	1	—	4	4	—
10.	PERTI	—	—		1	4	4	2	2	2	6	9	2
11.	I.P.K.I.	—	—		—	—	5	—	2	2	9	11	—
12.	P.B.I. (Partai Buruh Indonesia)	35	34		6	—	—	—	—	—	—	—	—
13.	P.I.R. Hazairin	—	—		19	1	1	—	—	—	—	—	—
14.	P.I.R. Wongso	—	—		3	—	—	—	—	—	—	—	—
15.	P.R.N.	—	—		13	—	—	—	—	—	—	—	—
16.	PERSATUAN PROGRESIF	—	—		10	—	—	—	—	—	—	—	—
17.	DEMOKRAT	—	—		9	—	—	—	—	—	—	—	—
18.	PARINDRA	—	—		7	—	—	—	—	—	—	—	—
19.	S.K.I.	—	—		4	—	—	—	—	—	—	—	—
20.	SOBSI.	—	—		2	—	—	—	—	—	—	—	—
21.	B.T.I.	—	—		2	—	—	—	—	—	—	—	—
22.	G.T.I.	—	—		1	—	—	—	—	—	—	—	—
23.	NASIONAL PROGRESIF ²	—	—		—	11	12	—	—	—	—	—	—
24.	PENDUKUNG PROKLAMASI ³	—	—		—	11	5	—	—	—	—	—	—
25.	PEMBANGUNAN	—	—		—	7	6	—	—	—	—	—	—
26.	Gerakan Pembela Pancasila	—	—		—	2	1	—	—	—	—	—	—
27.	P3.R.I.	—	—		—	2	2	—	—	—	—	—	—
28.	Perorangan A.K.U.I.	—	—		—	1	—	—	—	—	—	—	—
29.	Perorangan P.P.T.I.	—	—		—	1	1	—	—	—	—	—	—
30.	Golongan/Perwakilan/Tak berpartai dan lain-lain	184	285		11	5	7	1	2	2	2	—	—
31.	PARTINDO	—	—		—	—	—	—	—	—	2	—	—
32.	PARMUSI	—	—		—	—	—	—	—	—	—	18	—
33.	GOLKAR	—	—		—	—	—	118	133	102	160	92	24
34.	A.B.R.I.	—	—		—	—	—	35	38	38	42	75	261 ⁴
			536	146 ¹	235	272	262	283	304	242	350	414	460

KETERANGAN

Dalam menyusun ikhtisar ini penulis dibantu oleh Drs. Abd. Mutalib berdasarkan "SEPEREMPAT ABAD DPR. R.I." dan keterangan-keterangan dari Seksi Dokumentasi DPRGR.

1 Keanggotaan DPR.RIS merupakan wakil-wakil dari Negara-Negara Bagian Republik Indonesia (49), Indonesia Timur (17), Jawa Timur (15), Madura (5), Pasundan (21), Sumatera Timur (4), Sumatera Selatan (4), Jawa Tengah (12), Bangka (2), Belitung (2), Riau (2), Kalimantan Barat (4), Dayak Besar (2), Banjar (3), Kalimantan Tenggara (2), Kalimantan Timur (2), sedangkan mengenai keanggotaan dari wakil-wakil partai politik kurang jelas.

2 Nasional Progresif; merupakan gabungan dari partai-partai/organisasi-organisasi: Bapkeri, Acoma, Murba, PRN, Grinda, P.I.R. Wongso dan anggota perorangan R. Soedjono Prawirosoedardjo.

3 Pendukung Proklamasi; merupakan gabungan dari partai-partai/organisasi-organisasi: I.P.K.I., Partai Buruh, PRIM, PRI dan PRD.

4 261 anggota Golkar terbagi atas 227 wakil yang dipilih, 25 wakil diangkat, 9 wakil Irian Jaya.

DPR-GR:

- Komposisi keanggotaan DPRGR dengan Keputusan Presiden No. 156/1960, tanggal 24 Juni 1960.
- Komposisi keanggotaan DPRGR sebelum/menjelang Peristiwa G.30.S/P.K.I.
- Komposisi keanggotaan DPRGR setelah adanya peristiwa G.30.S/P.K.I. di mana 62 orang anggota DPRGR diberhentikan dengan Keputusan Pimpinan DPRGR No. 31/Pimp/III/65-66, tanggal 30 Maret 1966.
- Komposisi keanggotaan DPRGR setelah adanya Redressing (penyegaran I) di DPRGR. Dengan Penetapan Presiden No. 7/1967, keanggotaan DPRGR ditambah dengan 108 orang.
- Komposisi keanggotaan DPRGR setelah adanya Redressing (Penyegaran II) di DPRGR, sesuai dengan Keputusan Presiden No. 57/1968 dan Keputusan Presiden No. 58/1968, jumlah anggota DPRGR menjadi 414 orang yang terbagi dalam 13 Fraksi.

Tempiran. 4 :

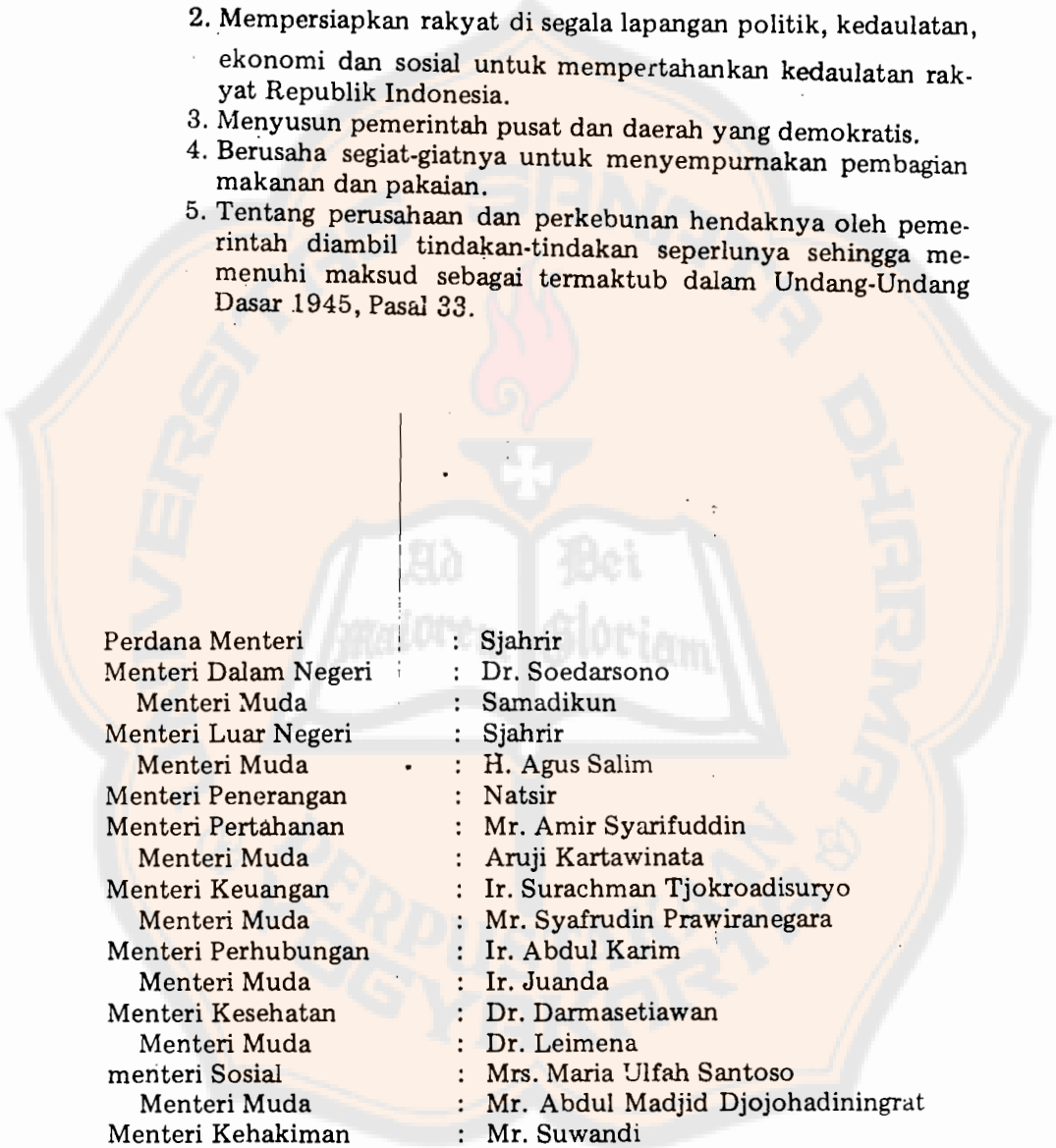
Sumber: Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia, 1983)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Lampiran. 5 :

suatu program yang terdiri lima pasal :

1. Berunding atas dasar pengakuan Republik Indonesia merdeka 100%.
2. Mempersiapkan rakyat di segala lapangan politik, kedaulatan, ekonomi dan sosial untuk mempertahankan kedaulatan rakyat Republik Indonesia.
3. Menyusun pemerintah pusat dan daerah yang demokratis.
4. Berusaha segiat-giatnya untuk menyempurnakan pembagian makanan dan pakaian.
5. Tentang perusahaan dan perkebunan hendaknya oleh pemerintah diambil tindakan-tindakan seperlunya sehingga memenuhi maksud sebagai termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33.



Perdana Menteri	: Sjahrir
Menteri Dalam Negeri	: Dr. Soedarsono
Menteri Muda	: Samadikun
Menteri Luar Negeri	: Sjahrir
Menteri Muda	: H. Agus Salim
Menteri Penerangan	: Natsir
Menteri Pertahanan	: Mr. Amir Syarifuddin
Menteri Muda	: Aruji Kartawinata
Menteri Keuangan	: Ir. Surachman Tjokroadisuryo
Menteri Muda	: Mr. Syafrudin Prawiranegara
Menteri Perhubungan	: Ir. Abdul Karim
Menteri Muda	: Ir. Juanda
Menteri Kesehatan	: Dr. Darmasetiawan
Menteri Muda	: Dr. Leimena
menteri Sosial	: Mrs. Maria Ulfah Santoso
Menteri Muda	: Mr. Abdul Madjid Djojohadiningrat
Menteri Kehakiman	: Mr. Suwandi
Menteri Muda	: Mr. Hadi
Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan:	Moh. Syafei
Menteri Muda	: Mr. Dr. T.G.S. Mulia
Menteri Pekerjaan Umum	: Ir. Putuhena
Menteri Muda	: Ir. Laoh
Menteri Kemakmuran	: Ir. Dermawan Mangunkusumo
Menteri Muda	: Syamsu Harya Udaya
Menteri Pertanian dan Persediaan	: Ir. Rasad
Menteri Muda	: Ir. Saksono
Menteri Negara	: Wikana

Lampiran. 6 :

Dewan Harian	- Sardjono (ketua I, Drs. Maruto Darusman (ketua II) Djokosoedjono (ketua III) Ngadiman Hardjosuprpto (Sek. umum I) Soetrisno (Sekum II)
Politbiro	- Alimin, Sardjono, Maruto Darusman, Soetrisno dan Ngadiman Hardjosuprpto
Biro Organisasi	- Djokosoedjono, DN. Aidit (Agitprop) Soekisman (agitprop) Roeskak (bendahara) Koesnadi (penghubung).
Pembantu Sekum	- Sabarisman (ketentaraan/kelaskaran), Boejoeng Saleh (buruh) Koebes (tani) Karsali (pemuda) Soepadrdiatmi (wanita)
Komisaris Daerah	- Moh. Ali, Moh. Toha, Hamid Soetan (Jawa Barat) Moh. Senan, ----- (Jawa Tengah) Lauw King Hoo, Trijosoenjoto (Jawa Timur) Abdulkarim M.S. (Sumatera).

Sumber: Brackman, Arnold C., Indonesian Communism : A history, (New York Frederick Preager, 1963)

Lampiran. ' / :

an Renville yang seluruhnya terdiri atas 3 naskah, yaitu:

- Persetujuan gencatan perang (senjata) yang antara lain berisi ketentuan an diterimanya garis demarkasi van Mook (...
- Dasar-dasar Politik Renville (*Renville Principles*) yang pada pokoknya berisi kesediaan kedua pihak untuk menyelesaikan pertikaian mereka dengan jalan damai dan dengan bantuan KTN. (...)
- 6 pasal tambahan dari KTN yang antara lain berisi ketentuan bahwa kedaulatan atas Indonesia tetap di tangan Belanda selama masa peralihan sampai kemudian kedaulatan diserahkan kepada pihak NIS (' -

Sumber: Moedjanto, G. Indonesia Abad ke 20 Jilid II (Yogyakarta: Kanisius, 1988)

Dalam mempertahankan daerah Renville, sesuai dengan kondisi dan situasi geografis, dan perhitungan maksud-maksud musuh, diadakan 3 divisi teritorial yang masing-masing meliputi daerah-daerah Jawa Tengah sebelah barat, Jawa Tengah sebelah timur dan sisa Jawa Timur yang masih dikuasai RI.

- a. Divisi I terbentuk dari Divisi II lama dan Divisi III lama, Brigade kelasykaran dan kesatuan TLRI di daerah itu. Calon Panglima Divisi adalah Jenderal Mayor Soesalit Panglima Divisi III lama dan Kolonel Bambang Soegeng, Kepala Staf Divisi II lama. Markasnya berkedudukan di Magelang dan daerah administrasinya meliputi Kedu, Yogyakarta dan sisanya daerah Banyumas yang masih dikuasai RI. Divisi ini terdiri dari 3 Brigade. Brigade I untuk tugas khusus yaitu menyusup kembali ke daerah Pekalongan dan bagian Banyumas yang diduduki Belanda.
- b. Divisi II terbentuk dari Divisi IV lama, Resimen Pati Soenandar dari Divisi V lama, Brigade-brigade lasykar dan TLRI di daerah tersebut. Calon Panglima untuk sementara belum ditentukan. Pusatnya berkedudukan di Solo dan di daerah tanggung jawabnya meliputi Solo, sisa Semarang dan Pati. Satu Brigade yang berasal dari daerah Semarang ditugaskan untuk menyusup ke Semarang yang diduduki.
- c. Divisi III terbentuk dari sisa Divisi V lama dan Divisi-divisi VI dan VII lama serta Brigade-brigade kelasykaran dan TLRI. Calon Panglima yaitu Kolonel Bambang Supeno dan Jendral Mayor Soengkono. Dari Divisi VI lama diambil satu Brigade yang ditugaskan untuk menyusup kembali ke daerah Surabaya sedangkan dua Brigade dari Divisi VII lama yang berasal dari daerah Malang dan Basuki harus menyusup kembali seluruhnya ke daerah tersebut.
- d. Divisi Siliwangi menjadi suatu bagian yang otonom dalam Kesatuan Reserve Umum yang berpusat di Solo. Divisi terbagi dalam 3 Brigade, 2 Brigade masing-masing untuk diinfiltrasikan ke daerah Jawa Barat Utara, Jakarta-Purwakarta-Cirebon dan Jawa Barat Selatan, Bogor-Priangan. Satu Brigade yang tenaga-tenaganya terutama diambil dari Resimen Perjuangan gabungan dari pasukan Hisbullah, Pesindo, Banteng dan BPRI dibangun khusus untuk dijadikan kesatuan teritorial.

Sumber: Himawan Soetanto, Perintah Presiden Soekarno, "Rebut Kembali Madiun" Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994

Lampiran. 8 :

Pidato Presiden RI pada malam hari 19 September 1948

"Kemarin pagi PKI Moeso, mengadakan kup, mengadakan perampasan kekuasaan di Madiun, dan mendirikan disana suatu pemerintah Soviet, di bawah pimpinan Moeso. Perampasan ini mereka pandang sebagai permulaan untuk merebut seluruh pemerintah RI.

Nyata dengan ini, bahwa peristiwa Sala dan Madiun itu, tidak berdiri sendiri, melainkan adalah suatu rangkaian tindakan untuk merobohkan pemerintah RI.

Buat itu digunakan kesatuan dari Brigade 29, bekas laskar di bawah pimpinan Letnan Kolonel Dahlan. Selain itu, Dahlan telah berkhianat kepada negara dan melanggar sumpah tentara.

Dahlan ini kami pecat dari tentara. Saudara-saudara, camkanlah benar-benar apa arti yang telah terjadi itu. Negara RI hendak direbut oleh Moeso.

Rakyat yang kucinta. Atas nama perjuangan untuk Indonesia Merdeka, aku berseru padamu: "Pada saat yang begini genting, dimana engkau dan kita sekalian mengalami percobaan yang sebesar-besarnya dalam menentukan nasib kita sendiri, dan kita adalah memilih antara dua: Ikut Moeso dengan PKI-nya, yang akan membawa bangkrutnya cita-cita Indonesia Merdeka, atau ikut Soekarno-Hatta, yang insya Allah dengan bantuan Tuhan, akan memimpin negara RI merdeka, tidak dijajah oleh negara apa pun juga.

Madiun harus lekas di tangan kita kembali!

Dari Madiun, PKI/Moeso setelah berkuasa, membalas pidato Presiden Soekarno, melalui Radio Gelora Pemuda menyatakan:

!!....."Sebaiknya anasir-anasir yang memerintah telah memakai revolusi kita sebagai kuda-kudaan untuk menguntungkan diri. Mereka sewaktu pendudukan Jepang telah menjadi quisling-quisling, budak-budak Jepang, tukang jual romusha dan propagandis-propagandis Heiho. Lebih dari dua milyon wanita Indonesia telah menjadi janda lan-taran lelaki-lelakinya menjadi romusha. Sekarang mereka akan menjual Indonesia dan rakyatnya sekali kepada imperialis Amerika ! Soekarno memakai alasan-alasan palsu telah menuduh FDR/ PKI Moeso sebagai tukang pengacau dan lain-lain. Lupakah Soekarno, bahwa ia di Solo telah memakai kaum pengkhianat Trotskyis untuk melakukan penculikan dan teror terhadap orang-orang komunis?. Lupakah Soekarno cs, bahwa ia telah membantu dan mensyahkan kejahatan-kejahatan Siliwangi dan kaum teroris itu ?. Apakah maksud Soekarnocs, ex-pedagang romusha, telah melepaskan penjahat-penjahat Trotskyis Malaka cs yang telah mencoba merobohkan ke-Presidenannya ?. Dalam tiga tahun ini teranglah pula bahwa Soekarno-Hatta ex-romusha verkopers, quislings telah menjalankan politik kapitulasi terhadap Belanda, Inggris dan sekarang juga akan menjual Indonesia dan rakyat kepada imperialis Amerika.

Bolehkah orang-orang semacam itu bilang, bahwa mereka mempunyai hak yang syah unruk memerintah Republik kita ?....."

Sumber: A.H. Nasution, Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia. Bandung: Angkasa, 1977

Lampiran. 9 :

Hasil Pemilu 1955 untuk DPR

Peringkat	Partai	Jumlah Suara	%
1	PNI	8.343.653	22,1
2	Masyumi	7.903.886	20,9
3	NU	6.955.141	18,4
4	PKI	6.176.914	16,3
5	PSII	1.091.160	2,9
6	Parkindo	1.003.325	2,7
7	Partai Katholik	770.740	2,0
8	PSI	753.191	2,0
9	IPKI	541.306	1,4
10	Perti	483.014	1,3
	Kontestan lain	3.762.969	10,0
Jumlah		37.785.299	100,0

Sumber: Alfian, 1971, *Hasil Pemilihan Umum 1955 untuk Dewan Perwakilan Rakyat*, halaman 9.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

<i>Parties</i>	<i>Number of votes</i>	<i>Percentage of total</i>	<i>Number of seats</i>	<i>Provisional seats in parliament</i>
PNI	8,434,653	22.3	57	42
Masjumi	7,903,886	20.9	57	44
NU	6,955,141	18.4	45	8
PKI	6,176,914	16.4	39	17
Others	8,404,705	22.0	59	122

<i>Regions</i>	<i>PKI vote</i>	<i>Percentage of total vote</i>
East Java	2,299,602	23.2
Central Java	2,326,108	25.8
West Java	755,634	10.8
Greater Djakarta	96,363	12.0
South Sumatra	176,900	12.1
Central Sumatra	90,513	5.8
North and East Sumatra	258,875	10.8
West Kalimantan	8,526	1.8
South Kalimantan	17,210	2.2
East Kalimantan	8,209	4.8
North and Central Sulawesi	33,204	4.4
South and Southeast Sulawesi	17,831	1.6
Maluku	4,792	1.4
East Nusatenggara	5,008	0.5
West Nusatenggara	66,067	5.3

Table 2. The results of the parliamentary elections

	No. of valid votes	Percentage of total valid votes	No. of seats	No. of seats in provisional parliament (at time of its dis- solution)
PNI	8,434,653	22.3	57	42
Masjumi	7,903,886	20.9	57	44
Nahdatul Ulama	6,955,141	18.4	45	8
PKI	6,176,914	16.4	39	17
PSII	1,091,160	2.9	8	4
Parkindo	1,003,325	2.6	8	5
Partai Katholik	770,740	2.0	6	8
PSI	753,191	2.0	5	14
IPKI	541,306	1.4	4	—
Perti	483,014	1.3	4	1
PRN	242,125	0.6	2	13
Partai Buruh	224,167	0.6	2	6
GPPS (Movement to De- fend the Pantja Sila)	219,985	0.6	2	—
PRI	206,261	0.5	2	—
PPPRI (Police Employ- ees' Association of the Republic of Indonesia)	200,419	0.5	2	—
Partai Murba	199,588	0.5	2	4
Baperki (Consultative Council on Indonesian Citizenship)	178,887	0.5	1	—
PIR-Wongsonegoro	178,481	0.5	1	3
Cerinda (Indonesian Movement)	154,792	0.4	1	—
Permai	149,287	0.4	1	—
Partai Persatuan Daya (Dayak Unity Party)	146,054	0.4	1	—
PIR-Hazairin	114,644	0.3	1	18
PPTI (Tharikah Unity Party)	85,131	0.2	1	—
AKUI (Islamic Victory Force)	81,454	0.2	1	—
PRD (Village People's Party)	77,919	0.2	1	—
PRIM (Party of the Peo- ple of Free Indonesia)	72,523	0.2	1	—
Acoma (Younger Gen- eration Communists)	64,514	0.2	1	—
R. Soejono Prawiro- soedarso and Asso- ciates	53,305	0.1	1	—
Other parties, organi- zations, and indi- vidual candidates	1,022,433	2.7	—	46
Total	37,785,299	100.0	257	233

Source: A. van Marle, "The First Indonesian Parliamentary Elections," *Indo-nesië*, IX (1956), 258.

